BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1390, 2020 KEMENHUB. Rencana Strategis. Tahun 2020-2024.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 80 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Peraturan mengenai Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang telah disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional;

b. bahwa rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

www.peraturan.go.id

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1555);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6

www.peraturan.go.id

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
2. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
3. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA-Renstra adalah aplikasi yang bersifat *web based* yang memuat data perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja Renstra K/L.
4. Rencana Kerja Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disebut Renja Kementerian adalah dokumen perencanaan Kementerian Perhubungan untuk periode 1 (satu) tahun.

www.peraturan.go.id

5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
7. Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.
8. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian.
9. Unit Kerja Eselon II adalah Direktorat, Biro, Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Badan, Pusat, Inspektorat, Balai Besar, dan unit kerja lainnya yang setara di lingkungan Kementerian.
10. Unit Kerja Eselon IV adalah subbagian, seksi, sub bidang, dan unit kerja lainnya yang setara di lingkungan Kementerian.
11. Satuan Kerja adalah Unit Kerja Mandiri/Unit Pelaksana Teknis yang mengelola APBN dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
13. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

BAB II
PELAKSANAAN RENSTRA

Pasal 2

(1) Renstra disusun untuk periode 5 (lima) tahun dengan mengacu pada RPJMN 2020-2024.

(2) Renstra Unit Kerja Eselon I disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah Renstra ditetapkan dan disahkan melalui Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

(3) Renstra Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja disusun paling lambat 2 (dua) bulan setelah Renstra Unit Kerja

www.peraturan.go.id

Eselon I ditetapkan dan disahkan melalui Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon II.

Pasal 3

(1) Renstra Kementerian memuat target dan indikator kinerja yang menggambarkan dampak dan hasil yang dihasilkan dan indikator kinerja lain yang relevan.
(2) Renstra Unit Kerja Eselon I memuat target dan indikator kinerja yang menggambarkan hasil dan/atau keluaran setingkat lebih tinggi dari keluaran unit kerja di bawahnya, yang dihasilkan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan Unit Kerja Eselon I.
(3) Renstra Unit kerja Eselon II dan Satuan Kerja memuat target dan indikator kinerja yang menggambarkan hasil atau keluaran yang dihasilkan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja.
(4) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
    a. spesifik (*specific*);
    b. dapat terukur (*measurable*);
    c. dapat dicapai (*attainable*);
    d. berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
    e. dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

Pasal 4

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Data dan informasi kinerja Renstra yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan satu kesatuan dengan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

www.peraturan.go.id

Pasal 6

Renstra dapat dilakukan perubahan/penyesuaian setelah mendapatkan persetujuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Evaluasi Renstra dilakukan untuk melihat capaian kinerja kebijakan, program, atau kegiatan dengan membandingkan antara target dengan capaian dalam satu periode Renstra.
(2) Evaluasi Renstra Kementerian dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal.
(3) Evaluasi Renstra Unit Kerja Eselon I dikoordinasikan oleh:
    a. Biro Perencanaan untuk Sekretariat Jenderal;
    b. Sekretariat Direktorat Jenderal untuk Direktorat Jenderal;
    c. Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk Inspektorat Jenderal; dan
    d. Sekretariat Badan untuk Badan.
(4) Evaluasi Renstra Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja dilakukan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja.

Pasal 8

Indikasi target dan pendanaan Renstra dapat dimutakhirkan melalui Rencana Kinerja Pemerintah dan Renja Kementerian dengan mempertimbangkan:
a. kesiapan dan kapasitas pelaksanaan;
b. ketersediaan dan sumber pendanaan; dan
c. keterlibatan peran pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat.

www.peraturan.go.id

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 80 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2020-2024

REKAPITULASI INDIKASI PENDANAAN BERDASARKAN PROGRAM

dalam miliar rupiah

RKL	NAMA SASARAN / NAMA PROGRAM / NAMA KEGIATAN / OUTPUT / KEGIATAN / DIMENSI	SIMBOL	SATUAN	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024											RONAPBN 2020-2024					RKL
										RPMN MODEL (RM)						PMDN / BLU	SMBR	PNBP	TOTAL APBN	RPM	SOMBR	APBN	PNBPTA	RON APBN	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2025										
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN									26.138,22	28.193,38	42.637,62	46.924,98	66.138,28	101.593,98	13.638,28	27.263,38	7.598,91	245.138,73	14.746,14	13.326,60	42.374,00	6.138,60	176.585,14	
01	Program Pendidikan dan Pelatihan Nasional									3.987,38	4.632,89	5.475,47	6.223,00	3.693,09	28.012,42	1.168,00	0,00	0,00	11.680,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prioritas Nasional									1.800,32	1.732,62	1.798,38	1.864,62	1.964,62	8.960,60	0,00	0,00	0,00	32.960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prioritas Bidang									162,97	260,40	274,73	325,02	264,97	1.287,62	128,28	0,00	0,00	2.300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prioritas K/L									6,77	6,82	9,49	11,32	9,79	43,30	92,49	0,00	0,00	9.521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Infrastruktur publik: Operasional Dukungan Manajemen/ Perencana Teknis									334,21	508,38	578,41	599,38	473,63	2.495,02	114,41	0,00	0,00	2.595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Infrastruktur Kewilayahan OPDMS									346,40	549,56	1.201,40	579,26	2.794,13	13.146,38	91,1	0,00	0,00	21.216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Program Infrastruktur Konektivitas									39.500,0	44.026,1	47.040,7	50.044,9	49.038,0	207.600,_	15.804,0	27.258,3	7.598,91	257.901,	146.746,	153.302,	82.375,0	6.138,00	370.085,	
	Prioritas Nasional									4.032,70	20.340,79	23.140,04	20.737,70	24.802,04	138.047,77	22,1,0	23.702,30	7.344,21	177.221,30	142.227,30	137.300,00	42.375,00	3.97,4,00	324.974,00	
	Prioritas Bidang									2.232,17	4.139,23	4.172,8	5.145,30	4.704,23	20.493,92	2.995,28	734,00	4,00	24.094,24	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
	Prioritas K/L									1.472,32	3.00,20	4.274,30	4.112,07	4.390,4	24.645,37	1.111,14	0,00	1,00	26.314,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	
	Infrastruktur Dukungan Manajemen/ Perencana Teknis									1.474,30	900,31	804,4	1.00,27	1.202,2	5.07,00	30.205,00	0,00	0,0	35.30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Infrastruktur Wilayah Operasional									0,00	0,00	0,10	0,30	0,1	0,30	0,00	0,00	0,00	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Infrastruktur Kewilayahan OPDMS									2.200,71	9.24,00	10.44,60,9	11.0,36,80	12.28,69,9	43.7,46,40	202,40	1.04,0,0	40,0	50.213,0,0	1.04,0,0	15.84,0,0	0,00	40,0,0	1.04,00,00	
03	Program Riset dan Inovasi Dan Pengetahuan dan Teknologi									79,18	108,00	132,00	138,00	142,21	57,1,78	0,00	0,00	0,00	57,1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prioritas Nasional									7,78	4,28	5,04	4,78	5,14	26,10	0,00	0,00	0,00	30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prioritas Bidang									56,00	78,49	72,97	46,32	84,27	337,06	0,00	0,00	0,00	337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

www.peraturan.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / KEG OUTPUT / INDIKATOR	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024										NON-APBN 2020-2024					NO
			2020	2021	2022	2023	2024	REPAM MENG (DIPA)						PNBP / BLU	RMBN	PHLN	TOTAL APBN	RPHU	DUMN	ANGG	PRIVATA	NON APBN	
								2020	2021	2022	2023	2024	DIR										
022	KEMENTERIAN PERUMAHAN							20.130,22	20.193,28	62.027,02	66.454,98	66.198,28	281.045,98	22.698,08	27.254,20	7.599,91	340.198,73	140.780,14	110.058,00	62.279,00	6.220,00	379.985,14	
	Indikator Dekanja Non-Operasional (Dukungan eMonitoring/ Pencerjaan Teknis							18,21	17,82	21,37	23,44	20,41	104,30	0,00	0,00	0,00	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikator Kebutuhan di Luar RPHUN							1,00	23,93	22,61	24,24	27,83	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WA	Program Dukungan Manajemen							6.304,09	8.040,99	9.403,01	10.003,0	10.004,7	47.375,8	2.638,76	0,00	0,00	50.003,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prioritas Hibrida							74,40	82,30	83,41	97,74	123,74	460,60	25,24	0,00	0,00	485,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prioritas K/L							341,56	400,26	404,84	365,19	404,14	2.016,00	43,61	0,00	0,00	2.087,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikator Dekanja Non-Operasional (Dukungan eMonitoring/ Pencerjaan Teknis							946,04	982,42	1.042,36	1.103,83	1.326,14	5.302,79	1.136,77	0,00	0,00	6.439,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikator Dekanja Operasional							6.034,76	7.394,32	7.773,57	8.104,32	8.404,66	38.711,96	47,43	0,00	0,00	38.759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikator Kebutuhan di Luar RPHUN							2,00	15,47	26,43	44,08	60,25	148,06	984,42	0,00	0,00	1.132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Matrik Kinerja dan Pendanaan Kementerian Perhubungan 2020-2024

Lamp. 2 - 1

www.peraturan.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024										NON-APBN 2020-2024					PIC
										RUPIAH MURNI (RM)					PNBP / BLU	SBSN	PHLN	TOTAL APBN	KPBU	SUMN	APBD	SWASTA	NON-APBN	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	RM											
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN									30.116,63	56.193,28	62.637,03	66.404,95	66.194,38	281.545,9	23.656,58	27.354,26	7.999,91	340.156,7	148.780,1	153.932,0	62.379,00	6.324,00	370.985,1	
01	Sekretariat Jenderal									709,30	743,88	844,20	956,35	1.097,11	4.350,84	0,00	0,00	0,00	4.350,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prioritas Bidang									16,22	21,96	29,12	40,95	52,98	161,22	0,00	0,00	0,00	161,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prioritas K/L									244,95	296,85	363,07	428,90	512,79	1.846,55	0,00	0,00	0,00	1.846,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Belanja Non-Operasional Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis									190,91	140,89	148,57	162,44	185,22	828,03	0,00	0,00	0,00	828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Belanja Operasional									257,22	275,22	294,49	315,11	337,16	1.479,19	0,00	0,00	0,00	1.479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN									0,00	8,96	8,96	8,96	8,96	35,84	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Inspektorat Jenderal									124,61	123,30	146,85	169,11	194,14	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Belanja Non-Operasional Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis									79,63	76,48	98,41	119,81	144,29	518,63	0,00	0,00	0,00	518,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Belanja Operasional									44,98	46,81	48,44	49,30	49,85	239,38	0,00	0,00	0,00	239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Ditjen Perhubungan Darat									5.100,72	9.125,27	9.350,59	9.949,62	10.220,25	43.746,44	561,35	868,68	0,00	45.176,47	5.327,00	255,00	2.100,00	0,00	7.682,00	
	Prioritas Nasional									2.286,04	3.800,06	3.695,38	4.249,18	4.433,63	18.464,29	0,00	545,88	0,00	19.010,17	5.237,00	255,00	2.100,00	0,00	7.592,00	
	Prioritas Bidang									1.121,29	1.736,27	1.543,54	2.074,48	1.808,80	8.284,37	161,63	209,89	0,00	8.655,89	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
	Prioritas K/L									284,52	469,50	239,00	270,50	208,50	1.472,02	0,00	0,00	0,00	1.472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Belanja Non-Operasional Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis									273,80	246,58	258,90	271,85	285,23	1.336,36	244,10	0,00	0,00	1.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Belanja Operasional									1.004,56	1.075,60	1.151,66	1.233,10	1.320,30	5.785,21	0,00	0,00	0,00	5.785,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN									130,50	1.797,27	2.462,11	1.850,52	2.163,79	8.404,19	155,63	112,91	0,00	8.672,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Ditjen Perhubungan Laut									6.359,23	8.881,06	10.320,04	11.386,70	11.440,94	48.387,97	9.440,01	519,32	5.890,71	64.228,00	4.566,36	125.875,0	0,00	0,00	130.441,3	
	Prioritas Nasional									1.775,35	2.259,36	3.761,88	4.089,16	3.946,40	15.832,15	189,29	214,32	5.876,21	22.111,96	4.566,36	125.875,00	0,00	0,00	130.441,36	
	Prioritas Bidang									761,26	1.980,34	2.139,61	2.547,14	2.422,17	9.850,52	3.858,83	305,00	4,50	16.018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prioritas K/L									406,21	965,69	672,07	703,99	751,96	3.499,92	4,00	0,00	0,00	3.503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Belanja Non-Operasional Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis									498,45	465,41	375,60	507,00	603,62	2.450,07	5.387,89	0,00	0,00	7.837,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Belanja Operasional									2.917,97	3.210,26	3.370,87	3.539,42	3.716,79	16.755,31	0,00	0,00	0,00	16.755,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Ditjen Perhubungan Udara									6.021,26	15.186,19	16.709,12	17.342,43	17.025,63	72.344,64	6.918,06	2.167,42	48,20	81.478,32	1.000,00	10.420,00	0,00	5.974,00	17.394,00	
	Prioritas Nasional									1.508,42	5.767,41	5.956,17	5.801,69	4.539,44	23.573,13	41,82	2.162,59	0,00	25.777,53	1.000,00	10.420,00	0,00	5.974,00	17.394,00	
	Prioritas Bidang									194,78	262,00	310,01	326,11	338,36	1.431,26	0,00	0,00	0,00	1.431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prioritas K/L									2.189,42	3.278,13	3.762,50	3.812,37	3.837,97	16.880,39	1.170,58	4,84	0,00	18.055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Belanja Non-Operasional Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis									538,58	555,06	557,85	560,66	563,48	2.795,62	5.705,66	0,00	0,20	8.501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Belanja Operasional									1.570,06	1.678,67	1.794,80	1.918,96	2.051,71	9.014,20	0,00	0,00	0,00	9.014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN									0,00	3.644,93	4.387,79	4.922,63	5.694,68	18.650,04	0,00	0,00	48,00	18.698,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Ditjen Perkeretaapian									7.830,34	13.745,15	17.863,11	18.346,12	18.308,03	76.092,75	89,41	23.798,84	1.671,00	101.652,0	124.246,7	16.952,00	32.769,00	350,00	174.317,7	
	Prioritas Nasional									3.003,20	8.144,01	11.572,77	12.087,60	11.341,73	46.149,11	0,00	20.642,51	1.670,00	68.461,62	117.783,94	1.010,00	32.769,00	0,00	151.562,94	
	Prioritas Bidang									149,00	163,90	180,28	198,31	221,14	912,63	0,00	0,00	0,00	912,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prioritas K/L									1.137,22	1.195,00	1.539,31	1.271,50	1.620,35	6.763,37	37,41	0,00	1,00	6.801,79	2.914,00	0,00	0,00	0,00	2.914,00	
	Indikasi Belanja Non-Operasional Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis									267,76	290,05	306,60	338,20	371,53	1.574,14	52,00	0,00	0,00	1.626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Belanja Operasional									172,43	184,33	197,05	210,64	225,18	989,63	0,00	0,00	0,00	989,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN									3.100,73	3.767,87	4.067,10	4.240,07	4.528,10	19.703,86	0,00	3.156,33	0,00	22.860,19	3.548,84	15.942,00	0,00	350,00	19.840,84	

www.peraturan.go.id

dalam miliar rupiah

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024										NON APBN 2020-2024					PRIO
										RUPIAH MURNI (RM)						PNBP / BLU	SBSN	PHLN	TOTAL APBN	KPBU	BUMN	APBD	SWASTA	NON APBN	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	RM										
11	**Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan**									**161,32**	**204,94**	**225,21**	**227,77**	**258,14**	**1.077,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.077,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Prioritas Nasional									7,76	6,09	5,90	4,79	5,48	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prioritas Bidang									53,73	62,76	76,02	71,40	87,36	351,25	0,00	0,00	0,00	351,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Belanja Non-Operasional Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis									52,97	49,93	45,47	43,17	46,51	238,05	0,00	0,00	0,00	238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Belanja Operasional									44,91	56,51	50,40	52,12	56,07	260,01	0,00	0,00	0,00	260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN									1,95	29,66	47,42	56,30	62,76	198,07	0,00	0,00	0,00	198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan**									**3.590,72**	**7.635,00**	**6.529,16**	**7.269,93**	**6.889,14**	**31.913,96**	**6.647,76**	**0,00**	**0,00**	**38.561,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Prioritas Nasional									1.555,32	1.723,43	1.758,99	1.896,31	1.994,85	8.928,90	4.051,78	0,00	0,00	12.980,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prioritas Bidang									213,02	314,84	321,34	977,80	375,39	2.202,38	128,25	0,00	0,00	2.330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prioritas K/L									95,16	106,30	120,34	137,59	147,71	607,10	870,87	0,00	0,00	1.477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Belanja Non-Operasional Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis									398,61	635,92	692,27	676,87	850,76	3.036,42	114,42	0,00	0,00	3.168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Belanja Operasional									768,51	769,01	784,39	800,08	816,10	3.938,09	474,91	0,00	0,00	4.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN									560,10	4.085,50	3.051,83	2.781,28	2.704,33	13.183,05	1.007,54	0,00	0,00	14.190,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	**Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek**									**218,84**	**548,49**	**588,75**	**756,92**	**761,00**	**2.874,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.874,00**	**13.640,00**	**0,00**	**27.510,00**	**0,00**	**41.150,00**	
	Prioritas Nasional									32,68	369,96	379,35	540,35	539,75	1.862,10	0,00	0,00	0,00	1.862,10	13.640,00	0,00	27.510,00	0,00	41.150,00	
	Prioritas K/L									64,19	56,54	76,06	76,63	75,09	346,51	0,00	0,00	0,00	346,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Belanja Non-Operasional Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis									67,84	65,28	70,48	72,63	74,09	350,32	0,00	0,00	0,00	350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Belanja Operasional									54,12	57,91	61,97	66,30	70,95	311,25	0,00	0,00	0,00	311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN									0,00	0,80	0,90	1,00	1,12	3,82	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

www.peraturan.go.id

REKAPITULASI INDIKASI PENDANAAN BERDASARKAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS

dalam miliar rupiah

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024											NON-APBN 2020-2024					PIHO
									RINCIAN MURNI (RM)						PNBP / BLU	SBSN	PHLN	TOTAL APBN	KPBU	BUMN	APBD	SWASTA	NON-APBN	
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	RM											
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN								30.114,33	36.193,28	62.637,03	66.404,95	66.194,39	281.545,98	216.96,98	27.359,26	7.599,9	341.196,73	148.780,14	193.903,00	62.179,00	6.324,00	370.985,14	
SS 01	Terwujudnya Konektivitas Nasional								8.795,32	18.274,41	23.113,74	24.210,63	23.896,07	98.290,17	47,894	26.743,39	7.551,71	133.024,31	145.090,14	143.082,00	56.229,00	950,00	345.311,14	
01	Rasio Konektivitas Nasional		rasio	0,634	0,666	0,695	0,725	0,763	8.795,32	18.274,41	23.113,74	24.210,63	23.896,07	98.290,17	479,94	26.743,39	7.551,71	133.024,31	145.090,14	143.082,00	56.229,00	950,00	345.311,14	
SS 02	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi								5.440,77	13.820,99	15.440,25	16.077,29	16.155,96	66.935,36	900,16	396,27	48,00	68.369,80	1.890,00	10.420,00	4.150,00	5.374,00	23.834,00	
02A	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi		Indeks	80	82	85	88,4	88,5	2.859,65	4.223,71	4.312,13	4.306,74	4.241,82	19.944,05	511,88	45,58	0,00	20.501,51	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	
02B	On Time Performance Layanan Transportasi		%	74,8	76,62	78,44	80,26	82,08	2.581,12	9.597,28	11.128,22	11.770,55	11.914,13	46.991,32	388,28	340,69	48,00	47.868,29	1.890,00	10.420,00	2.100,00	5.374,00	19.784,00	
SS 03	Meningkatnya Keselamatan Transportasi								3.919,28	7.037,43	7.468,10	8.050,67	7.733,79	33.815,24	5.384,64	24,60	0,00	39.224,49	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	
03	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 Juta Kebermanfaatan		rasio	31,99	31,53	28,83	26,39	23,71	3.916,28	7.037,43	7.468,10	8.050,67	7.733,79	33.815,24	5.384,64	24,60	0,00	39.224,49	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	
SSp 04	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum								501,86	713,25	832,83	868,44	938,98	3.855,36	282,12	0,00	0,00	4.137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum		%	73,5	80	85,5	88,5	94,8	501,86	713,25	832,83	868,44	938,98	3.855,36	282,12	0,00	0,00	4.137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SSp 05	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten								1.876,17	3.343,69	3.112,10	3.614,06	3.121,18	15.067,21	4.934,22	0,00	0,00	20.001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten		%	85	85	85	85	85	1.876,17	3.343,69	3.112,10	3.614,06	3.121,18	15.067,21	4.934,22	0,00	0,00	20.001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SSp 06	Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan								3,38	5,07	7,86	11,47	17,12	45,11	0,00	0,00	0,00	45,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Persentase Penurunan Rasio GRK Sektor Transportasi		%	66,67	72,51	81,09	89,88	100	3,38	5,07	7,86	11,47	17,12	45,11	0,00	0,00	0,00	45,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SSp 07	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian								341,16	347,61	403,73	425,24	440,25	1.965,98	1.977,50	0,00	0,00	3.943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian"		%	100	100	100	100	100	341,16	347,61	403,73	425,24	440,25	1.965,98	1.977,50	0,00	0,00	3.943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SSp 08	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik								9.052,38	12.630,82	12.259,33	13.146,95	13.923,07	61.011,55	9.798,99	0,00	0,20	71.410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Indeks RB Kementerian Perhubungan		nilai	78	79	79,5	80	80,5	9.052,38	12.630,82	12.259,33	13.146,95	13.923,07	61.011,55	9.798,99	0,00	0,20	71.410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

www.peraturan.go.id

INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN

www.peraturan.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	SATUAN	TARGET					APBD 2020-2024										RENCANA 2020-2024					
					2020	2021	2022	2023	2024	RINCIAN SUMBER DANA						PERSEN / DAU	DBHP	PAKLN	TOTAL JUMLAH	SPMSI	SPMSN	APBD	SWASTA	SUMBANG	TOTAL
										2020	2021	2022	2023	2024	2025										
(1)	/Jumlah/Jaringan/Jalan/Penghubung/Antar/Kecamatan/yang/Dibangun/dan/Ditingkatkan		Jaring		12,7700	14,0000	14,2000	14,7500	14,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00	0,00	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	**Dikbal Prasarana Keselamatan Pengguna SDM Transportasi Laut**									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,32**	**0,00**	**0,00**	**24,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1)	/Jumlah/Kecelakaan/Dikbal/yang/dapat/dicegah/dan/yang/dapat/dikurangi/dampaknya/dengan/Prasarana/Laut		Jaring		0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	**Dikbal Prasarana Keselamatan Pengguna SDM Transportasi Udara**									**0,00**	**0,00**	**3,20**	**3,00**	**0,00**	**0,74**	**11,32**	**0,00**	**0,00**	**17,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1)	/Jumlah/Kecelakaan/dikbal/yang/dapat/dicegah/dan/yang/dapat/dikurangi/dampaknya/dengan/Prasarana/Udara		Jaring		2,0	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	11,32	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2)	**Pencegahan Dikbal Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dikbal SDM Perhubungan Darat, Laut, Udara dan Perlindungan yang Berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir**				0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	**Pencegahan Kecelakaan Darat dan Prasarana Penunjang Dikbal Transportasi (Kewenangan Nasional)**									**70,40**	**30,00**	**240,70**	**200,00**	**247,00**	**1,00,677**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00,000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub Out	**Pencegahan Kecelakaan Darat dan Prasarana Penunjang Dikbal Darat**									**0,00**	**77,00**	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1)	/Jumlah/Pemeriksaan/Kecelakaan/Darat/dengan/Prasarana/yang/dibuat/SDM/Transportasi/Darat		Kalkar		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	**Pencegahan Kecelakaan Darat dan Prasarana Penunjang Dikbal Laut**									0,00	0,0077	0,70	0,00	0,00	0,0077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1)	/Jumlah/Pemeriksaan/Kecelakaan/Darat/dengan/Prasarana/yang/dibuat/SDM/Transportasi/Laut		Kalkar		0	12	12	12	12	0,00	0,0077	0,00	0,00	0,00	0,0077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	**Pencegahan Kecelakaan Darat dan Prasarana Penunjang Dikbal Udara**									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1)	/Jumlah/Pemeriksaan/Kecelakaan/Darat/dengan/Prasarana/yang/dibuat/SDM/Transportasi/Udara		Kalkar		0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	**Pencegahan Kecelakaan Darat dan Prasarana Penunjang Dikbal Transportasi**									**27,100**	**1,200,70**	**1,20,574**	**1,00,00**	**1,00,12**	**0,00,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub Out	**Pencegahan Kecelakaan Darat dan Prasarana Internal Perhubungan Transportasi Darat**									**0,00**	**0,00,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1)	/Jumlah/Pemeriksaan/Kecelakaan/dan/prasarana/internal/perhubungan/transportasi/darat		Kalkar		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	**Pencegahan Kecelakaan Darat dan Prasarana Internal Perhubungan Transportasi Laut**									**77,00**	**0,00**	**100,00**	**00,00**	**00,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1)	/Jumlah/pemeriksaan/kecelakaan/dan/prasarana/internal/perhubungan/transportasi/laut		Kalkar		10	10	10	10	10	77,00	0,00	100,00	00,00	00,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	**Pencegahan Kecelakaan Darat dan Prasarana Internal Perhubungan Transportasi Udara**									**1,00,00**	**00,00**	**700,00**	**1,00,00**	**00,00**	**1,00,700**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1)	/Jumlah/pemeriksaan/kecelakaan/dan/prasarana/internal/perhubungan/transportasi/udara		Kalkar		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	/Jumlah/Jenis/Diklat/dan/Tempat/Pengajar/yang/Dipendidikan/Dengan/Jurusan/Keahlian/Internasional		Jenis/Diklat		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00,1	00,11	2,1,00	2,1,00	2,0,17	1,00,00	1,0,1,0	0,00	0,00	1,70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1	**Pendidikan Dalam Transportasi**									**2,00,1**	**00,11**	**2,1,00**	**2,1,00**	**2,0,17**	**1,00,00**	**1,0,1,0**	**0,00**	**0,00**	**1,70,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub Out	**Jurnal Nasional**									**0,00**	**0,0,1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0,1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1)	/Jumlah/jurnal/nasional/yang/dibuat		Jurnal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0,1	0,00	0,00	0,00	0,0,1	0,00	0,00	0,00	1,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	**Jurnal Internasional**									**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1)	/Jumlah/jurnal/internasional/yang/dibuat		Jurnal		2,1	2,0	2,1	2,1	2,0	2,00	2,00	3,00	3,10	3,00	1,1,00	0,00	0,00	0,00	1,1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	**Penelitian Dosen**									**2,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**4,00**	**1,7,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1)	/Jumlah/penelitian/dosen		Dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00	4,00	1,7,00	0,00	0,00	0,00	2,1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2	/Jumlah/Bagian/Pengabdian/Masyarakat/yang/Dilaksanakan		Bagian/n		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0,7,0	00,00	1,7,00	1,0,00	1,0,1,0	0,7,7,0	1,00	0,00	0,00	0,0,7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3	**Pengabdian Masyarakat Dikbal SDM Transportasi**									**0,70**	**1,0,0**	**1,7,00**	**1,0,00**	**1,0,12**	**0,7,7,0**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0,7,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub Out	**Pengabdian Masyarakat Dikbal SDM Transportasi Darat**									**0,00**	**7,0,1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,0,0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,0,0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1)	/Jumlah/pengabdian/masyarakat/dikbal/SDM/transportasi/darat		Dokumen		1,70	1,00	1,71	1,7,0	1,00	0,00	7,0,1	0,00	0,00	0,00	4,0,0,0	0,00	0,00	0,00	4,0,0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	**Pengabdian Masyarakat Dikbal SDM Transportasi Laut**									**0,00**	**0,0,1**	**0,00**	**0,0,0**	**0,00**	**0,0,0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0,0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1)	/Jumlah/pengabdian/masyarakat/dikbal/SDM/transportasi/laut		Dokumen		1,70	1,00	1,71	1,7,0	1,00	0,00	0,0,1	0,00	0,0,0	0,00	0,0,0,0	0,00	0,00	0,00	0,0,0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	**Pengabdian Masyarakat Dikbal SDM Transportasi Udara**									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1)	/Jumlah/pengabdian/masyarakat/dikbal/SDM/transportasi/udara		Dokumen		1,70	1,00	1,71	1,7,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Meningkatnya Mutu dan Tata Kelola Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana Transportasi**				0,00	0,0,0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,0,0	0,70	0,00	1,00,00	0,0,0,0	0,10	0,0,0	0,00	0,0,0,0	0,00	0,0,0	0,00	0,0,0	0,00	0,00
4.1	**Tingkat Pemenuhan SNPG SDM Transportasi**				0,00	0,0,0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,0,0	0,70	0,00	1,00,00	0,0,0,0	0,10	0,0,0	0,00	0,0,0,0	0,00	0,0,0	0,00	0,0,0	0,00	0,00
4.1.1	**Pengembangan Mutu dan Tata Kelola Transportasi**				0,0,0,0	0,00,00	0,1,7,0	0,00,00	0,0,0,7	0,00,0,0	0,00,0,0	0,0,0,7	0,00,0,0	0,10	0,0,0,0	0,00	0,0,0	0,00	0,0,0,0	0,00	0,0,0,0	0,00	0,0,0,0	0,00	0,00
4.1.1.1	**Meningkatnya Mutu dan Pemenuhan Standar Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi**				0,00	0,0,0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,0,0	0,70	0,00	1,00,00	0,0,0,0	0,10	0,0,0	0,00	0,0,0,0	0,00	0,0,0	0,00	0,0,0	0,00	0,00

Matrik/Energi dan Pendanaan Kementerian Perhubungan 2020-2024

Lampiran I...

www.peraturan.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	APBN 2020-2024 RUPIAH MURNI (RM) 2020	RM 2021	RM 2022	RM 2023	RM 2024	RM	PNBP / BLU	SBSN	PHLN	TOTAL APBN	NON APBN 2020-2024 KPBU	BUMN	APBD	SWASTA	NON APBN	PRIO
IKSS	Persentase Kesepahaman Antara Permintaan dengan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang sesuai standar serta lembaga yang terakreditasi			%	100	100	100	100	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	Pengembangan Modul dan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pengembangan Modul dan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi Diklat SDM Transportasi Darat									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah modul dan bahan ajar berbasis kompetensi SDM transportasi darat yang dikembangkan			laporan	149	160	165	175	187	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pengembangan Modul dan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi Diklat SDM Transportasi Laut									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah modul dan bahan ajar berbasis kompetensi SDM transportasi laut yang dikembangkan			laporan	149	160	165	175	187	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pengembangan Modul dan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi Diklat SDM Transportasi Udara									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah modul dan bahan ajar berbasis kompetensi SDM transportasi udara yang dikembangkan			laporan	149	160	165	175	187	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	Dukungan Teknis dan Administratif Penyelenggaraan Diklat SDM Transportasi									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Sertifikasi, Standarisasi, Akreditasi dan Manajemen Mutu Diklat SDM Transportasi Darat									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah laporan sertifikasi, standarisasi, akreditasi dan manajemen mutu diklat SDM transportasi darat			laporan	5	5	5	5	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Sertifikasi, Standarisasi, Akreditasi dan Manajemen Mutu Diklat SDM Transportasi Laut									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah laporan sertifikasi, standarisasi, akreditasi dan manajemen mutu diklat SDM transportasi laut			laporan	14	21	21	21	21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Sertifikasi, Standarisasi, Akreditasi dan Manajemen Mutu Diklat SDM Transportasi Udara									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah laporan sertifikasi, standarisasi, akreditasi dan manajemen mutu diklat SDM transportasi udara			laporan	10	61	22	22	22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Penyusunan SKKNI SDM Transportasi Darat									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah laporan SKKNI SDM transportasi darat			laporan	1	1	1	1	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Penyusunan SKKNI SDM Transportasi Laut									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah laporan SKKNI SDM transportasi laut			laporan	1	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Penyusunan SKKNI SDM Transportasi Udara									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah laporan SKKNI SDM transportasi udara			laporan	1	1	1	1	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Penyusunan Grand Desain SDM Transportasi Darat									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah laporan grand desain SDM transportasi darat			laporan	1	1	1	1	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Penyusunan Grand Desain SDM Transportasi Laut									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah laporan grand desain SDM transportasi laut			laporan	1	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Penyusunan Grand Desain SDM Transportasi Udara									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah laporan grand desain SDM transportasi udara			laporan	1	1	1	1	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	Layanan Perencanaan									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Sumber Daya Manusia Transportasi Darat									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis bidang SDM transportasi darat			laporan	2	2	2	2	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Penyusunan dan Kebijakan Teknis Bidang Sumber Daya Manusia Transportasi Laut									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah laporan penyusunan dan kebijakan teknis bidang SDM transportasi laut			laporan	5	12	11	10	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Sumber Daya Manusia Transportasi Udara									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis bidang SDM transportasi udara			laporan	7	6	7	7	7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
SP	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian SDM Transportasi									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IKSP	Tingkat Pengawasan dan Pengendalian SDM Transportasi									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	Pendidikan Transportasi									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
SK	Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IKSK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	Evaluasi Pasca Diklat									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Evaluasi Pasca Diklat SDM Transportasi Darat									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

www.peraturan.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024										NON APBN 2020-2024					PRIO
					2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI (RM) 2020	2021	2022	2023	2024	RM	PNBP / BLU	SBSN	PHLN	TOTAL APBN	KPBU	BUMN	APBD	SWASTA	NON-APBN	
IK	Jumlah laporan evaluasi pasca diklat SDM transportasi darat			laporan	43	42	42	42	42	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Evaluasi Pasca Diklat SDM Transportasi Laut									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah laporan evaluasi pasca diklat SDM transportasi laut			laporan	43	42	42	42	42	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Evaluasi Pasca Diklat SDM Transportasi Udara									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah laporan evaluasi pasca diklat SDM transportasi udara			laporan	43	42	42	42	42	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
SP	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IKP	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran			[illegible]	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
SK	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IKK	Kualitas Pengembangan Pendidikan SDM Transportasi			nilai	85	86	87	88	89	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
RO	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Diklat SDM Transportasi Darat									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah laporan kerjasama dan kemitraan antar instansi dan lembaga diklat SDM transportasi darat			laporan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
RO	Pemenuhan Tenaga Pendidik									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pemenuhan Tenaga Pendidik Diklat SDM Transportasi Udara									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah tenaga pendidik diklat SDM transportasi udara yang mendapat peningkatan kompetensi			orang						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IKK	Kualitas Pengelolaan Dukungan Teknis Pengembangan SDM Transportasi			nilai	85	86	87	88	89	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
RO	Dukungan Teknis dan Administratif Penyelenggaraan Diklat SDM Transportasi									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pendidikan									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan SDM transportasi udara			laporan	7	8	8	8	8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
RO	Layanan Sarana dan Prasarana Internal									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Kendaraan Bermotor									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor			unit	19	5	10	6	9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			paket	5	9	9	11	7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Fasilitas Perkantoran									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah pengadaan fasilitas perkantoran			paket	4	4	4	4	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah pembangunan / renovasi gedung dan bangunan			paket	3	8	8	8	8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
RO	Layanan Dukungan Manajemen Satker									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pengelolaan Sistem Informasi Penunjang Diklat									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi satker				0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Perencanaan, Pemrograman dan Pelaksanaan Anggaran Satker									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah laporan perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan anggaran satker			laporan	1	1	1	1	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pengelolaan Kepegawaian Satker									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian satker			laporan	1	1	1	1	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Satker									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah laporan keuangan dan perbendaharaan satker			laporan	1	1	1	1	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Layanan Umum dan Rumah Tangga Satker									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah laporan pengelolaan layanan umum dan rumah tangga satker			laporan	1	1	1	1	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	Program Infrastruktur Konektivitas									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	Ditjen Perhubungan Darat									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

www.peraturan.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024										NON APBN 2020-2024					[illegible]
					2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI (RM)						PNBP / BLU	SBSN	PHLN	TOTAL APBN	KPBU	BUMN	APBD	SWASTA	NON-APBN	
										2020	2021	2022	2023	2024	RM										
SP	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Darat									2.294,48	2.772,42	2.627,77	4.238,61	4.984,39	16.917,66	0,00	823,11	0,00	19.740,77	1.897,00	285,00	0,00	0,00	1.853,00	
IKP	Rasio Konektivitas Transportasi Darat			rasio	0,64	0,71	0,79	0,86	0,93	2.294,48	2.772,42	2.627,77	4.238,61	4.984,39	16.917,66	0,00	823,11	0,00	19.740,77	1.897,00	285,00	0,00	0,00	1.853,00	
[illegible]	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat									2.294,48	2.772,42	2.627,77	4.238,61	4.984,39	16.917,66	0,00	823,11	0,00	19.740,77	1.897,00	285,00	0,00	0,00	1.853,00	
SK	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi									2.294,48	2.772,42	2.627,77	4.238,61	4.984,39	16.917,66	0,00	823,11	0,00	19.740,77	1.897,00	285,00	0,00	0,00	1.853,00	
IKK	Jumlah lintasan/trayek pelayanan angkutan jalan nasional			trayek	2600	2605	2610	2615	2620	135,00	140,00	200,00	220,00	250,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RO	Layanan Konektivitas Transportasi (Prioritas Nasional)									135,00	140,00	200,00	220,00	250,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Kepastian Angkutan Jalan									135,00	140,00	200,00	220,00	250,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah rute angkutan yang dikompetisi			Trayek	320	325	330	335	360	135,00	140,00	200,00	220,00	250,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Persentase peningkatan keterpaduan antarmoda terhadap baseline 2019			%	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43	64,00	65,75	61,75	61,75	61,75	314,99	0,00	0,00	0,00	314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RO	Layanan Konektivitas Transportasi Darat									64,00	65,75	61,75	61,75	61,75	314,99	0,00	0,00	0,00	314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Layanan Angkutan Perkotaan									64,00	65,75	61,75	61,75	61,75	314,99	0,00	0,00	0,00	314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah kota yang mendapatkan layanan angkutan perkotaan			Lokasi	12	17	17	18	20	64,00	65,75	61,75	61,75	61,75	314,99	0,00	0,00	0,00	314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Persentase [illegible]			%	21,3	35,7	[illegible]	[illegible]	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RO	Layanan Konektivitas Transportasi Darat									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Layanan Keperintisan Angkutan Barang									20,00	49,98	65,08	80,27	102,02	317,30	0,00	0,00	0,00	317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah rute pelayanan publik untuk angkutan barang di jalan			layanan	13	25	40	50	61	20,00	49,98	65,08	80,27	102,02	317,30	0,00	0,00	0,00	317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Waktu tempuh pada jalan lintas utama per pulau			menit/100km	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RO	Layanan Konektivitas Transportasi Darat									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Pembangunan Arteria (Transport Management System) (ATMS)									0,00	600,00	550,00	750,00	659,97	2.559,97	0,00	0,00	0,00	2.559,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah ATMS yang dibangun			lokasi	0	12	11	15	33	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.559,97	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.559,97	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IKK	Tingkat pemanfaatan pemberian bantuan bus sekolah			unit	78	100	100	100	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RO	Layanan Konektivitas Transportasi Darat									140,00	179,00	180,00	250,95	280,00	1.029,95	0,00	0,00	0,00	1.029,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Pemberian Bantuan Bus Sekolah									140,00	179,00	180,00	250,95	280,00	1.029,95	0,00	0,00	0,00	1.029,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah pemberian bus sekolah bantuan			unit	280	290	300	360	400	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.029,95	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.029,95	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IKK	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi dan siap dioperasikan			lokasi	108	108	111	111	114	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RO	Pembangunan Infrastruktur Konektivitas (Prioritas Nasional)									105,00	242,00	0,00	0,00	100,00	447,00	0,00	65,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Pembangunan Terminal Tipe A (Prioritas Nasional)									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah terminal tipe A (prioritas nasional) yang dibangun			unit	0	0	0	0	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pembangunan Terminal Barang (Prioritas Nasional)									105,00	242,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	65,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah terminal barang (prioritas nasional) yang dibangun			unit	6	6	1	0	0	105,00	242,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	65,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RO	Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Pembangunan / Replacement Terminal Tipe A									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah terminal tipe A yang dibangun			unit	5	3	2	1	1	30,50	118,20	120,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Jumlah pengembangan fasilitas pendukung dan integrasi moda			lokasi	8	11	19	28	38	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	1.897,00	[illegible]	0,00	[illegible]	1.897,00	
RO	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur KBS (Prioritas Nasional)									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.597,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.597,00	
Sub Out	Pembangunan Infrastruktur Transportasi Darat di IKN									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,00	0,00	0,00	0,00	1.897,00	
IK	Jumlah pembangunan infrastruktur transportasi darat di IKN			Lokasi	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,00	0,00	0,00	0,00	1.597,00	
RO	Layanan Konektivitas Transportasi Darat									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah simpul transportasi nasional yang terintegrasi fasilitas pendukung dan integrasi moda			Lokasi	0	0	0	2	1	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah kawasan strategis nasional yang terintegrasi fasilitas pendukung dan integrasi moda			lokasi	3	8	4	8	9	20,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	72,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IKK	Jumlah lintas pelayanan angkutan penyeberangan			lintas	306	357	382	392	402	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	

www.peraturan.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET 2020	2021	2022	2023	2024	APBN 2020-2024 RUPIAH MURNI (RM) 2020	2021	2022	2023	2024	RM	PNBP / BLU	SBSN	PHLN	TOTAL APBN	NON APBN 2020-2024 KPBU	BUMN	APBD	SWASTA	NON-APBN	PRIO
304	Layanan Konektivitas Transportasi (Prioritas Nasional)									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IO	Jumlah layanan angkutan penyeberangan perintis			lintas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IKK	Jumlah kapal ASP perintis yang beroperasi dan siap dioperasionalkan			unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
301	Pembangunan Sarana Konektivitas (Prioritas Nasional)									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional)									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IO	Jumlah kapal penyeberangan perintis (prioritas nasional) yang dibangun			unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
301	Pembangunan Sarana Konektivitas									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IO	Jumlah kapal penyeberangan perintis yang dibangun			unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pembangunan Bus Air									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IO	Jumlah bus air yang dibangun			unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IKK	Jumlah pelabuhan ASDP yang beroperasi dan siap dioperasikan			lokasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	Pembangunan Infrastruktur Konektivitas (Prioritas Nasional)									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pembangunan Pelabuhan Sungai									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IO	Jumlah pelabuhan sungai (prioritas nasional) yang dibangun			lokasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pembangunan Pelabuhan Danau									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IO	Jumlah pelabuhan danau (prioritas nasional) yang dibangun			lokasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IO	Jumlah pelabuhan penyeberangan (prioritas nasional) yang dibangun			lokasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas (Prioritas Nasional)									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IO	Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dikembangkan			lokasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	Pembangunan Infrastruktur Konektivitas									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pembangunan / Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IO	Pelabuhan penyeberangan yang dibangun			lokasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pembangunan Dermaga Sungai									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IO	Jumlah pelabuhan sungai yang dibangun			lokasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pembangunan Dermaga Danau									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IO	Jumlah pelabuhan danau yang dibangun			lokasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IKK	Kapasitas angkutan subsidi penyelenggaraan transportasi perkotaan skema buy the service			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
304	Layanan Konektivitas Transportasi (Prioritas Nasional)									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Jumlah kota yang menerima subsidi angkutan perkotaan melalui skema buy the service									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IO	Jumlah kota yang menerima subsidi angkutan perkotaan melalui skema buy the service			kota	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
SP	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IKSP	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi Darat			nilai	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	Pelayanan Transportasi Darat									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
SK	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IKK	Persentase pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di Terminal Tipe A			%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
303	Rehabilitasi Infrastruktur Konektivitas									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Rehabilitasi Terminal Tipe A									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IO	Jumlah terminal tipe A direhabilitasi			unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

www.peraturan.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024										NON APBN 2020-2024					[illegible]
					2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI (RM) 2020	2021	2022	2023	2024	RM	PNBP / BLU	SBSN	PHLN	TOTAL APBN	KPBU	BUMN	APBD	SWASTA	NON APBN	
IKK	Persentase pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di pelabuhan ASP			%	71	72	74	76	79	205,00	280,00	350,00	340,00	290,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RO	Rehabilitasi Infrastruktur Konektivitas									205,00	280,00	350,00	340,00	290,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Jumlah pelabuhan penyeberangan yang direhabilitasi									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IO	Jumlah pelabuhan penyeberangan yang direhabilitasi			unit	8	8	9	9	7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Jumlah dermaga sungai yang direhabilitasi									30,00	100,00	140,00	120,00	100,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IO	Jumlah pelabuhan sungai yang direhabilitasi			unit	3	7	6	6	4	30,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Jumlah dermaga danau yang direhabilitasi									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IO	Jumlah pelabuhan danau yang direhabilitasi			unit	1	2	1	1	0	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A			%	70,55	72,7	77,05	80,4	83,75	17,55	77,00	105,00	96,00	63,00	358,55	0,00	0,00	0,00	358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RO	Pengelolaan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Digitalisasi Terminal Tipe A									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IO	Jumlah lokasi digitalisasi terminal tipe A			unit	6	11	15	14	9	17,00	77,00	105,00	96,00	63,00	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKP	CSP Transportasi Jalan			%	50	55	60	65	70	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	Pelayanan Transportasi Transportasi Darat									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
SK	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan									43,70	489,00	420,00	540,00	274,30	1.736,00	0,00	0,00	0,00	1736,00	1.890,00	0,00	2.100,00	0,00	3.990,00	
IKK	Rata-rata persentase okupansi / penumpang angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan yang diberikan buy the service			%	30	40	50	60	70	42,70	489,00	420,00	540,00	274,30	1.736,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	1.890,00	0,00	2.100,00	0,00	3.990,00	
RO	Layanan Transportasi Perkotaan (Prioritas Nasional)									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan									43,70	489,00	420,00	540,00	274,30	1.736,00	0,00	0,00	0,00	1736,00	1.890,00	0,00	2.100,00	0,00	3.990,00	
IO	Jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan umum massal berbasis jalan			lokasi	11	4	6	11	12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IO	Jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan umum massal berbasis jalan			lokasi	2	5	5	5	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
SP	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IKP	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Kendaraan			rasio	0,02	0,019	0,016	0,014	0,011	804,52	2.158,02	2.405,36	2.717,67	2.473,58	10.557,40	317,28	0,00	0,00	10874,68	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	
[illegible]	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
SS	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IKK	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal			%	5	9	16	22	29	[illegible]	1.798,74	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.856,07	0,00	0,00	0,00	7.856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RO	Peningkatan Keselamatan Transportasi (Prioritas Nasional)									618,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Perlengkapan Jalan									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IO	Jumlah lokasi pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan			provinsi	33	33	33	33	33	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
RO	Pengelolaan Infrastruktur Keselamatan Transportasi Darat									33,33	79,24	91,51	79,74	83,25	366,07	0,00	0,00	0,00	366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan									5,10	5,90	5,66	5,75	3,73	26,15	0,00	0,00	0,00	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IO	Jumlah lokasi perbaikan rawan kecelakaan			unit	18	22	21	21	9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	[illegible] Keselamatan Jalan									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IO	Jumlah lokasi pemeliharaan perlengkapan jalan			provinsi	33	33	33	33	33	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IKK	Persentase [illegible] UPPKB [illegible]			%	50	35	30	25	20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
RO	Pembangunan / Pengadaan Prasarana Keselamatan Jalan									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)									52,80	50,00	275,00	370,00	350,00	1.097,80	0,00	0,00	0,00	1097,80	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
IO	Jumlah prasarana penimbangan kendaraan bermotor dibangun			unit	6	3	12	20	26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Rehabilitasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IO	Jumlah prasarana penimbangan kendaraan bermotor direhabilitasi			unit	8	20	25	25	29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IKK	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan [illegible] dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional			lokasi	59	92	125	158	189	33,51	96,50	102,40	98,50	94,90	425,81	0,00	0,00	0,00	425,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RO	Penyediaan dan Infrastruktur Keselamatan Transportasi Darat									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

www.peraturan.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024										NON APBN 2020-2024					[illegible]
										RUPIAH MURNI (RM)						PNBP / BLU	SBSN	PHLN	TOTAL APBN	KPBU	BUMN	APBD	SWASTA	NON-APBN	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	RM										
Sub Out	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)									23,51	98,60	103,60	98,60	[illegible]	435,91	0,00	0,00	0,00	435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Jumlah lokasi zona selamat sekolah (ZoSS) dibangun			unit	7	25	25	25	25	19,51	75,00	75,00	75,00	75,00	319,51	0,00	0,00	0,00	319,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Jumlah lokasi [illegible] dibangun			unit	3	5	7	4	6	4,00	15,00	21,00	12,00	18,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Jumlah lokasi [illegible] sekolah (RASS) dibangun			unit	4	2	2	2	2	0,00	8,40	[illegible]	8,40	[illegible]	36,40	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Jumlah Keterediaan taman edukatif			lokasi	2	4	5	7	8	0,00	12,00	6,00	12,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2xx	Pengelolaan Infrastruktur Keselamatan Transportasi Darat									[illegible]	12,00	[illegible]	12,00	[illegible]	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Pembangunan Taman Edukasi									[illegible]	12,00	[illegible]	12,00	[illegible]	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Jumlah taman edukasi yang dibangun			unit	0	2	1	2	1	0,00	12,00	6,00	12,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Jumlah masyarakat yang [illegible] tentang keselamatan transportasi jalan			orang	15000	39000	39000	39000	39000	15,00	38,00	38,00	38,00	38,00	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2xx	Pengelolaan Keselamatan Transportasi Darat									15,00	38,00	38,00	38,00	38,00	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Jumlah Pelaku Keselamatan Diselenggarakan									15,00	38,00	38,00	38,00	38,00	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Jumlah pelaku keselamatan diselenggarakan			unit	11	38	34	34	38	15,00	38,00	38,00	38,00	38,00	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar internasional (UN ECE)			unit	3	6	10	14	17	5,00	20,00	16,00	250,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	
2xx	Peningkatan Keselamatan Transportasi ([illegible])									5,00	20,00	16,00	250,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	
Sub Out	Prasarana Alat Uji Kendaraan Bermotor									5,00	20,00	16,00	250,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	
IKK	Jumlah fasilitas proving ground (BPLJSKB) dibangun			lokasi	1	1	1	1	0	5,00	20,00	20,00	250,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	
IKK	Persentase standardisasi pengujian [illegible] kendaraan bermotor			%	48	52	56	59	60	13,98	14,74	21,73	23,36	26,27	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2xx	Pengelolaan Alat Infrastruktur Keselamatan Transportasi Darat									17,98	19,75	21,73	23,90	26,27	109,62	0,00	0,00	0,00	109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Pengadaan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor									17,98	19,75	21,73	23,90	26,27	109,62	0,00	0,00	0,00	109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Jumlah alat [illegible] uji berkala kendaraan bermotor yang diadakan			unit	25	25	25	25	25	17,98	19,75	21,73	23,90	26,27	109,62	0,00	0,00	0,00	109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2xx	Pengelolaan Keselamatan Transportasi Darat									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,28	0,00	0,00	317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Jumlah bukti lulus uji elektronik dicetak									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,28	0,00	0,00	317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Jumlah bukti lulus uji elektronik dicetak			unit	263.498	1.000.000	1.500.000	1.750.000	1.875.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,28	0,00	0,00	317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0xx	Penunjang Teknis Transportasi Darat									4,92	4,92	4,92	4,92	5,31	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SS	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat									4,92	4,92	4,92	4,92	5,31	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Terbentuknya Lembaga Keselamatan Transportasi			Laporan	1	1	1	1	1	4,92	4,92	4,92	4,92	5,31	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2xx	Kebijakan Keselamatan Transportasi									4,92	4,92	4,92	4,92	5,31	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Rekomendasi Kebijakan Keselamatan Transportasi									4,92	4,92	4,92	4,92	5,31	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Jumlah kebijakan keselamatan transportasi yang dibentuk			lokasi	20	20	20	20	20	4,92	4,92	4,92	4,92	5,31	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKP	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi SDP per 10.000 Pelayaran			rasio	0,088	0,086	0,085	0,084	0,083	105,48	331,10	418,00	332,40	387,10	1.574,09	0,00	0,00	0,00	1.574,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0xx	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SS	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Jumlah alur pelayaran sungai yang ditetapkan			lokasi	13	18	22	26	29	112,34	313,70	418,80	202,30	218,00	1.265,14	0,00	0,00	0,00	1.265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2xx	Pengelolaan Infrastruktur Keselamatan Transportasi Darat									37,84	98,20	63,30	88,60	72,80	332,64	0,00	0,00	0,00	332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)									37,84	[illegible]	63,30	[illegible]	72,80	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Jumlah sarana bantu navigasi pelayaran yang dibangun			unit	3	7	4	6	4	8,84	16,80	13,00	20,00	20,00	78,64	0,00	0,00	0,00	78,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Jumlah pengadaan rambu sungai [illegible]			unit	5	9	6	6	3	9,40	23,40	25,80	13,50	7,50	80,40	0,00	0,00	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Jumlah rambu sungai yang dibangun			unit	8	8	4	4	4	19,60	55,00	22,50	22,50	45,00	164,60	0,00	0,00	0,00	164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2xx	Pengelolaan Keselamatan Transportasi Darat									74,28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	146,30	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Sistem/Prasarana [illegible] Lalu Lintas Kapal Sungai, Danau, dan Penyeberangan									4,00	8,50	6,00	6,50	6,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Jumlah sistem pemantauan lalu lintas kapal SDP (VTS) dibangun			lokasi	1	2	1	1	1	5,00	7,00	5,00	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Jumlah [illegible] sistem [illegible] SDP			sistem	25	25	25	25	25	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

www.peraturan.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024										NON APBN 2020-2024					PRIO
					2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI (RM)						PNBP / BLU	SBSN	PHLN	TOTAL APBN	KPBU	BUMN	APBD	SWASTA	NON-APBN	
										2020	2021	2022	2023	2024	RM										
Sub Out	Revitalisasi Alur Pelayaran Sungai, Danau dan Penyeberangan									70,00	210,00	350,00	140,00	140,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan direvitalisasi			lokasi	1	5	9	2	2	70,00	210,00	350,00	140,00	140,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	[illegible]			[illegible]	3	21	33	44	41	23,15	17,40	19,20	20,10	28,10	107,95	0,00	0,00	0,00	107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	Pengadaan dan Infrastruktur Keselamatan Transportasi Darat									23,15	17,40	19,20	20,10	28,10	107,95	0,00	0,00	0,00	107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Jumlah kapal patroli KSOP yang dibangun									23,15	17,40	19,20	20,10	28,10	107,95	0,00	0,00	0,00	107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	[illegible]			unit	3	3	3	4	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
SP	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Transportasi Darat									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKSP	Tingkat Penerapan NSPK Transportasi Darat			%	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	Penunjang Teknis Transportasi Darat									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SK	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Transportasi Darat									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Tersusunnya NSPK Transportasi Darat				0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	Layanan Perencanaan									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Perencanaan dan Kebijakan Teknis Transportasi Darat									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	[illegible]			laporan	1	1	1	1	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
SP	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Transportasi Darat									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKSP	Tingkat Pengawasan dan Pengendalian Transportasi Darat									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	Penunjang Teknis Transportasi Darat									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SK	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Transportasi Darat									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Transportasi Darat				0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	Layanan Monitoring dan Evaluasi									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Pengawasan dan Pengendalian Transportasi Darat									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	[illegible]									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SP	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik									154,42	131,28	127,34	133,70	140,39	677,13	164,48	0,00	0,00	841,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKSP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat			[illegible]	100	100	100	100	100	154,42	131,28	127,34	133,70	140,39	677,13	164,48	0,00	0,00	841,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	Penunjang Teknis Transportasi Darat									154,42	131,28	127,34	133,70	140,39	677,13	164,48	0,00	0,00	841,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SK	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat									154,42	131,28	127,34	133,70	140,39	677,13	164,48	0,00	0,00	841,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	[illegible]			nilai	83	84	87	88	89	154,42	131,28	127,34	133,70	140,39	677,13	164,48	0,00	0,00	841,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	Layanan Sarana dan Prasarana Internal									49,48	11,58	11,48	13,33	12,84	97,48	164,28	0,00	0,00	261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Kendaraan Bermotor									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor			layanan	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi									3,33	3,36	3,36	3,74	3,92	17,63	1,88	0,00	0,00	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	[illegible]			laporan	1	1	1	1	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Peralatan Perkantoran									7,34	7,70	8,09	8,49	8,92	40,54	23,29	0,00	0,00	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	[illegible]			laporan	1	1	1	1	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan									39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	138,21	0,00	0,00	177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah pembangunan / renovasi gedung dan bangunan			layanan	1	1	1	1	1	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	138,21	0,00	0,00	177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	Layanan Dukungan Manajemen Satker									104,74	120,18	115,69	121,46	127,55	579,64	0,20	0,00	0,00	579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran Satker									66,27	69,79	73,28	76,94	80,79	367,08	0,20	0,00	0,00	367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	[illegible]			laporan	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pengelolaan Kepegawaian Satker									5,73	6,00	6,30	6,62	6,95	31,58	0,00	0,00	0,00	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	[illegible]			laporan	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Satker									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Perhubungan 2020-2024

www.peraturan.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	APBN RM 2020	APBN RM 2021	APBN RM 2022	APBN RM 2023	APBN RM 2024	RM	PNBP / BLU	SBSN	PHLN	TOTAL APBN	KPBU	BUMN	APBD	SWASTA	NON APBN	PRIO
IK	Jumlah laporan keuangan dan perbendaharaan sektor			laporan	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Layanan Hukum									1,18	1,24	1,30	1,37	1,43	6,53	0,00	0,00	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah laporan pengelolaan hukum			laporan	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Sektor									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah laporan pengelolaan humas dan informasi			laporan	1	1	1	1	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Layanan Umum dan Rumah Tangga Sektor									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah laporan pengelolaan layanan umum dan rumah tangga sektor			laporan	1	1	1	1	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pengelolaan Data dan Informasi Sektor									[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,71	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi sektor			laporan	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Ditjen Perhubungan Laut									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
SP	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Laut									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IKP	Rasio Konektivitas Transportasi Laut			rasio	0,86	0,88	0,89	0,9	0,91	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	
PRO	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
SK	Meningkatnya Kinerja Penyediaan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IKK	Persentase Pencapaian Target Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan			%	0	28,21	53,97	78,92	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	
311	Pembangunan Infrastruktur Konektivitas (Prioritas Nasional)									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pembangunan Pelabuhan									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah pelabuhan laut yang dibangun			lokasi	3	2	7	10	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
312	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas (Prioritas Nasional)									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pengembangan Pelabuhan									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah pelabuhan yang dikembangkan			lokasi	19	16	26	32	20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
313	Rehabilitasi Infrastruktur Konektivitas (Prioritas Nasional)									[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Rehabilitasi Pelabuhan									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah pelabuhan yang direhabilitasi			lokasi	7	0	4	3	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
314	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur KBPU (Prioritas Nasional)									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	
Sub Out	Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut di KBPU									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	
IK	Jumlah pembangunan infrastruktur transportasi laut di KPBU			lokasi	1	1	1	1	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
321	Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pembangunan / Replacement Pelabuhan Laut									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah pelabuhan yang dibangun			lokasi	23	16	27	20	21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
322	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pengembangan Pelabuhan Laut									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah pelabuhan laut yang dikembangkan			lokasi	4	19	7	8	13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rehabilitasi Infrastruktur Konektivitas									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Rehabilitasi Pelabuhan Laut									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah pelabuhan yang direhabilitasi			lokasi	43	105	15	6	8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Persentase Pencapaian Target Kegiatan Pengerukan			%	0	47,5	62,5	81,47	94,75	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas (Prioritas Nasional)									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub Out	Pengerukan Alur Pelayaran									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
IK	Jumlah alur pelayaran yang dikeruk			lokasi	0	5	6	8	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

www.peraturan.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024										NON APBN 2020-2024					PRIO
					2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI (RM)						PNBP / BLU	SBSN	PHLN	TOTAL APBN	KPBU	BUMN	APBD	SWASTA	NON APBN	
										2020	2021	2022	2023	2024	RM										
Sub Out	Pengerukan Alur Pelayaran									0,00	8,19	6,60	9,03	9,49	35,32	7,08	0,00	0,00	42,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX	Jumlah alur pelayaran yang dikeruk			lokasi	1	1	1	1	1	0,00	8,19	6,60	9,03	9,49	35,32	7,08	0,00	0,00	42,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Persentase Pencapaian Target Pengadaan Alat Bongkar Muat			%	0	17,4	54,33	79,17	100	0,00	1,28	20,08	19,40	72,47	113,18	0,00	0,00	0,00	113,18	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
104	Layanan Konektivitas Transportasi (Prioritas Nasional)									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
Sub Out	Pengadaan Fasilitas Bongkar Muat									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
IX	Jumlah pengadaan peralatan bongkar muat yang diadakan			lokasi	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
204	Layanan Konektivitas Transportasi									0,00	1,28	20,08	19,40	72,47	113,18	0,00	0,00	0,00	113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Pengadaan Fasilitas Bongkar Muat									0,00	1,28	20,08	19,40	72,47	113,18	0,00	0,00	0,00	113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX	Jumlah pengadaan peralatan bongkar muat yang diadakan			lokasi						0,00	1,28	20,08	19,40	72,47	113,18	0,00	0,00	0,00	113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SP	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut									1.647,79	2.155,74	2.774,93	2.333,83	2.944,66	11.856,95	199,77	0,00	0,00	12.056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKP	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi Laut			skala	80	83	85	86,4	88,5	1.647,79	2.149,25	2.287,58	2.417,71	2.613,73	11.115,25	189,27	0,00	0,00	11.304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4009	Pelayanan Transportasi Transportasi Laut									1.687,76	2.149,25	2.287,58	2.417,71	2.613,73	11.156,25	165,17	0,00	0,00	11.320,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SS	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Laut									1.642,27	2.138,23	2.284,28	2.413,22	2.613,56	11.091,58	2,70	0,00	0,00	11.094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Rute Penghubung Wilayah (3TP, KSPN dan Lainnya) yang Disinggahi Kapal Bersubsidi / ANGKUTAN Tol Laut, Wisata, Ternak, Perintis, dll)			rute	1	1	1	1	1	1.611,68	2.133,24	2.284,16	2.411,12	2.613,61	11.058,24	0,00	0,00	0,00	11.058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	Layanan Konektivitas Transportasi (Prioritas Nasional)									1.416,79	1.651,28	1.790,61	1.941,82	2.124,98	8.925,28	0,00	0,00	0,00	8.925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Penyelenggaraan Angkutan Kapal Ternak									7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX	Jumlah rute angkutan kapal ternak			rute	1	1	1	1	1	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Penyelenggaraan Tol Laut									409,84	458,76	479,61	500,46	519,33	2.398,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX	Jumlah rute angkutan tol laut			rute	21	22	23	24	25	409,84	458,76	479,61	500,46	519,33	2.398,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Laut Perintis Barang dan Penumpang									979,25	1.184,83	1.303,30	1.433,66	1.597,93	6.498,98	0,00	0,00	0,00	6.498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX	Jumlah rute angkutan laut perintis			rute	113	113	113	113	113	979,25	1.184,83	1.303,30	1.433,66	1.597,93	6.498,98	0,00	0,00	0,00	6.498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut									123,02	28,22	0,00	0,00	0,00	151,24	0,00	0,00	0,00	151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Kapal Penunjang Konektivitas									63,02	28,22	0,00	0,00	0,00	91,24	0,00	0,00	0,00	91,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX	Jumlah kapal rede/ perintis yang dibangun			unit	8	8	0	0	0	63,02	28,22	0,00	0,00	0,00	91,24	0,00	0,00	0,00	91,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Dukungan Transportasi Terhadap Sektor Lain									60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX	Jumlah kapal yang dibangun untuk mendukung sektor lain			unit	4	0	0	0	0	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Layanan Konektivitas Transportasi Laut									83,33	459,88	492,28	468,88	486,97	1.983,97	0,00	0,00	0,00	1.983,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Subsidi Angkutan Kapal Ternak									38,90	41,23	43,68	46,25	48,94	218,99	0,00	0,00	0,00	218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX	Jumlah rute angkutan kapal ternak			rute	5	5	5	5	5	38,90	41,23	43,68	46,25	48,94	218,99	0,00	0,00	0,00	218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Penyelenggaraan mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut									20,43	21,44	22,51	23,64	24,82	112,83	0,00	0,00	0,00	112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX	Penyelenggaraan mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut			kegiatan	1	1	1	1	1	20,43	21,44	22,51	23,64	24,82	112,83	0,00	0,00	0,00	112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Layanan Pendukung Logistik									24,00	25,20	26,46	27,78	29,17	132,62	0,00	0,00	0,00	132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX	Jumlah kapal rede yang dibangun			unit	20	20	20	20	0	24,00	25,20	26,46	27,78	29,17	132,62	0,00	0,00	0,00	132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Operasional dan Pemeliharaan Kapal Negara									0,00	371,93	379,93	371,63	383,93	1.498,43	0,00	0,00	0,00	1.498,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX	Jumlah armada operasional kapal			kapal	1	1	1	1	1	0,00	371,93	379,93	371,63	383,93	1.498,43	0,00	0,00	0,00	1.498,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Tingkat Kelancaran Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Laut				0	0	0	0	0	9,48	0,13	0,07	0,10	0,13	9,91	2,70	0,00	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Layanan Konektivitas Transportasi Laut									9,48	0,13	0,07	0,10	0,13	9,91	2,70	0,00	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Operasional dan Pemeliharaan Kapal Negara									9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX	Jumlah Penyelenggaraan Kapal Negara			Unit	0	0	0	0	0	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Operasional dan Pemeliharaan Penunjang Transportasi Laut									0,15	0,13	0,07	0,10	0,13	0,58	2,70	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX	Jumlah Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Penunjang Transportasi Laut				0	0	0	0	0	0,15	0,13	0,07	0,10	0,13	0,58	2,70	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

www.peraturan.go.id

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | KATEGORI | SATUAN | TARGET | | | | | APBN TAHUN 2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | KATEGORI | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	APBN 2020-2024																													
										KEBUTUHAN DANA																													
										2020	2021	2022	2023	2024	RM	PNBP / BLU	BMN	PHLN	TOTAL APBN	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL APBN						
(X)	Jumlah layanan elektronik/ standardisasi dimensi teknis bidang navigasi penerbangan			Layanan	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
IKK	**Tingkat Ketersediaan SDM Bidang Keamanan Penerbangan**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,82**	**1,82**	**1,84**	**1,85**	**1,86**	**9,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							
IK 7	**Regulasi, Pengadilan dan Penilaian Kredibilitas Transportasi Udara**									**1,82**	**1,82**	**1,84**	**1,85**	**1,86**	**9,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							
Sub Out	**Bahan/Materi/Petunjuk Teknis Bidang Keamanan Penerbangan**				**1,82**	**1,82**	**1,84**	**1,85**	**1,86**	**9,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,19**															
(X)	Jumlah layanan elektronik/ standardisasi dimensi teknis bidang keamanan penerbangan			Layanan	0	0	0	0	0	1,82	1,82	1,84	1,85	1,86	9,19	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
IP	**Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pengadilan Transportasi Udara**									**170,00**	**170,00**	**170,00**	**170,70**	**171,40**	**852,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**852,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							
IKP	**Tingkat Pengawasan dan Pengadilan Transportasi Udara**	%			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170,00**	**170,00**	**170,00**	**170,70**	**171,40**	**852,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**852,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							
4.04.7	**Prasarana Teknis Transportasi Udara**				**276,00**	**278,00**	**279,00**	**280,70**	**281,40**	**1.395,10**	**0,00**	**0,00**	**1.395,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**												
IKK	**Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengadilan Transportasi Udara**				**276,00**	**278,00**	**279,00**	**280,70**	**281,40**	**1.395,10**	**0,00**	**0,00**	**1.395,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**												
IKK	**Tingkat Pengawasan dan Pengadilan Ketandardasan**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24,47**	**24,64**	**24,82**	**25,00**	**25,17**	**124,11**	**42,34**	**0,00**	**0,00**	**166,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							
IK 7	**Regulasi, Pengadilan dan Penilaian Kredibilitas Transportasi Udara**				**24,47**	**24,64**	**24,82**	**25,00**	**25,17**	**124,11**	**42,34**	**0,00**	**0,00**	**166,45**																
Sub Out	**Penetapan dan Evaluasi Bidang Ketandardasan**				**16,00**	**16,16**	**16,32**	**16,49**	**16,65**	**81,61**	**16,32**	**0,00**	**0,00**	**97,93**																
(X)	Jumlah layanan pemantauan dan evaluasi bidang ketandardasan			Layanan	0	0	0	0	0	16,00	16,16	16,32	16,49	16,65	81,61	16,32	0,00	0,00	97,93											
Sub Out	**Penilaian dokumen/ Teknis Bidang Ketandardasan**				**8,00**	**8,08**	**8,16**	**8,24**	**8,32**	**40,80**	**8,16**	**0,00**	**0,00**	**48,96**																
(X)	Jumlah layanan pendaftaran dan verifikasi teknis bidang ketandardasan			Layanan	0	0	0	0	0	8,00	8,08	8,16	8,24	8,32	40,80	8,16	0,00	0,00	48,96											
IKK	**Tingkat Pengawasan dan Pengadilan Angkutan Penerbangan**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253,50**	**255,52**	**258,09**	**260,80**	**263,60**	**1.291,51**	**8,50**	**0,00**	**0,00**	**1.299,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							
IK 7	**Regulasi, Pengadilan dan Penilaian Kredibilitas Transportasi Udara**				**33,00**	**33,33**	**33,66**	**33,99**	**34,33**	**168,31**	**8,50**	**0,00**	**0,00**	**176,81**																
Sub Out	**Penetapan dan Evaluasi Bidang Angkutan Udara**				**16,32**	**16,41**	**16,49**	**16,57**	**16,65**	**82,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,44**																
(X)	Jumlah layanan pemantauan dan evaluasi bidang angkutan udara			Layanan	0	0	0	0	0	16,32	16,41	16,49	16,57	16,65	82,44	0,00	0,00	0,00	82,44											
Sub Out	**Penilaian dokumen/ Teknis Bidang Angkutan Udara**				**17,00**	**17,18**	**17,36**	**17,54**	**17,72**	**86,81**	**8,50**	**0,00**	**0,00**	**95,31**																
(X)	Jumlah layanan pemantauan dan evaluasi bidang angkutan udara			Layanan	0	0	0	0	0	17,00	17,18	17,36	17,54	17,72	86,81	8,50	0,00	0,00	95,31											
IKK	**Tingkat Pengawasan dan Pengadilan Keselamatan Penerbangan**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**85,91**	**0,00**	**86,77**	**0,00**	**172,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							
IK 7	**Regulasi, Pengadilan dan Penilaian Kredibilitas Transportasi Udara**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							
Sub Out	**Penetapan dan Evaluasi Bidang Pengawasan Penerbangan**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							
(X)	Jumlah layanan pemantauan dan evaluasi bidang pengawasan penerbangan			Layanan	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Sub Out	**Penilaian dokumen/ Teknis Bidang Keamanan Penerbangan**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							
(X)	Jumlah layanan pemantauan dan evaluasi bidang keamanan penerbangan			Layanan	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
IP	**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Prasarana yang Baik**				**323,91**	**329,22**	**324,82**	**322,44**	**324,07**	**1.624,47**	**4.257,84**	**0,00**	**0,30**	**6.182,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**											
IP	**Nilai Pengelolaan Perkantoran**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**322,91**	**328,22**	**323,82**	**321,44**	**323,07**	**1.619,47**	**4.257,84**	**0,00**	**0,30**	**6.182,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							
4.04.7	**Prasarana Teknis Transportasi Udara**				**323,91**	**329,22**	**324,82**	**322,44**	**324,07**	**1.624,47**	**4.257,84**	**0,00**	**0,30**	**6.182,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**											
IKK	**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Dukungan Teknis Transportasi Udara**				**323,91**	**329,22**	**324,82**	**322,44**	**324,07**	**1.624,47**	**4.257,84**	**0,00**	**0,30**	**6.182,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**											
IKK	**Kualitas Pengelolaan Dukungan Teknis Transportasi Udara**			**nilai**	**85**	**86**	**87**	**88**	**89**	**323,91**	**329,22**	**324,82**	**322,44**	**324,07**	**1.624,47**	**4.257,84**	**0,00**	**0,30**	**6.182,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							
IK 1	**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,40**	**0,00**	**0,00**	**33,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							

www.peraturan.go.id

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | KATEGORI | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | KATEGORI | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN TAHUN 2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | KATEGORI | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | KATEGORI | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024												HORIZON 2020-2024					TREN
					2020	2021	2022	2023	2024	KEBUTUHAN DANA						PAGU / ALLOC	GAP	POLA	TOTAL APBN	REPO	BORR	APBD	SWASTA	NON-APBN	
										2020	2021	2022	2023	2024	RM										
BAK	Layanan Pengawasan Internal									14,00	2,04	3,14	4,25	5,00	28,44	0,00	0,00	0,00	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Perumusan Rencana Kinerja dan Laporan Kinerja									14,00	2,04	3,14	4,25	5,00	28,44	0,00	0,00	0,00	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	Jumlah Perumusan Rencana Kinerja dan Laporan Kinerja Pengawasan			Dokumen	1	1	1	1	1	14,00	2,04	3,14	4,25	5,00	28,44	0,00	0,00	0,00	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKU	Nilai hasil reviu Inspektorat Jenderal			Nilai	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	1,00	1,74	3,40	4,67	5,60	16,41	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BAK	Layanan Pengawasan Internal									1,00	1,74	3,40	4,67	5,60	16,41	0,00	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Pembinaan Unit Kepatuhan Internal (UKI)				0,00	0,27	0,76	0,90	1,20	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	Jumlah Layanan Pembinaan UKI			Layanan	1	1	1	1	1	0,00	0,27	0,76	0,90	1,20	3,13	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Penegakan SDM (Kasus DK, UPG)				1,00	1,47	2,62	3,76	5,00	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72	0,00	0,00	0,00	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	Jumlah Layanan Penegakan SDM			Layanan	1	1	1	1	1	1,00	1,47	2,62	3,76	5,00	13,72	0,00	0,00	0,00	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000.1	Pengadaan Organisasi dan SDM Pengawasan				4,00	6,10	7,70	10,00	12,40	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif				0,00	0,10	0,70	0,90	1,20	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Tingkat Aspirasi ARP			Indeks	0	0	0	0	0	-0,10	-0,10	-0,10	-0,90	1,20	-0,10	-0,00	0,00	-0,00	-0,10	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	
000	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal				0,00	0,10	0,70	0,90	1,20	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Tata Kelola Kapabilitas APIP				0,00	0,10	0,70	0,90	1,20	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	Jumlah Layanan Tata Kelola Kapabilitas APIP			Layanan	1	1	1	1	1	0,00	0,10	0,70	0,90	1,20	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Organisasi Fit For Purpose				2,00	3,20	3,40	4,07	6,00	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13	0,00	0,00	0,00	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKU	Nilai hasil reviu Inspektorat Jenderal			Nilai	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	1,00	2,44	3,01	3,19	4,94	14,61	0,00	0,00	0,00	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal				2,00	3,03	3,01	3,19	3,94	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61	0,00	0,00	0,00	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Ketatausahaan				0,00	0,00	0,02	0,03	0,08	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	Jumlah Layanan Ketatausahaan			Layanan	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,02	0,03	0,08	2,78	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Tata Laksana Organisasi dan Ketatalaksana				0,20	0,27	0,24	0,24	0,41	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	Jumlah Layanan Ketatalaksanaan Organisasi dan Kelembagaan			Layanan	1	1	1	1	1	0,20	0,27	0,24	0,24	0,41	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Referensi Strategi				0,00	0,40	0,80	1,20	1,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	Jumlah Layanan Referensi Reformasi Birokrasi			Layanan	1	1	1	1	1	0,00	0,40	0,80	1,20	1,70	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Pengelolaan Hibah dan Internal SDM Inspektorat Jenderal				0,00	1,20	0,20	0,20	0,20	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	Jumlah Layanan Pengelolaan OJT			Layanan	1	1	1	1	1	0,00	1,20	0,20	0,20	0,20	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Persentase Rencana Tindak Lanjut Pengawasan (RTLP) Inspektorat Jenderal Kemendikbud Ristekdikti			%	80	85	85	100	100	0,00	0,80	1,47	2,40	3,20	8,87	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	Layanan SDM				0,00	0,80	1,47	2,40	3,20	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Pembinaan Pegawai				0,00	0,12	0,32	1,12	1,60	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	Jumlah Layanan SDM Inspektorat Jenderal			Orang	242	280	319	359	403	0,00	0,12	0,32	1,12	1,60	3,16	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengawas				0,00	0,17	0,41	0,79	1,18	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	Jumlah Layanan SDM Inspektorat Jenderal			Orang	242	280	319	359	403	0,00	0,17	0,41	0,79	1,18	3,54	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Bidang dan Pengelolaan Umum				0,00	0,50	0,37	0,50	0,80	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	Jumlah Layanan SDM Inspektorat Jenderal			Orang	242	280	319	359	403	0,00	0,50	0,37	0,50	0,80	2,67	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Administrasi Kepegawaian				0,00	0,21	0,21	0,22	0,24	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	Jumlah Layanan SDM Inspektorat Jenderal			Orang	242	280	319	359	403	0,00	0,21	0,21	0,22	0,24	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Penegakan, Mutasi dan Disiplin Pegawai				0,00	0,05	0,05	0,05	0,06	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	Jumlah Layanan SDM Inspektorat Jenderal			Orang	242	280	319	359	403	0,00	0,05	0,05	0,05	0,06	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Persentase Rencana Tindak Lanjut Pengawasan (RTLP) Inspektorat Jenderal Kemendikbud			%	100	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BAP	Layanan SDM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Dokumen LHRPP dan LHRAKP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	Jumlah Layanan LHRPP dan LHRAKP			Orang	242	280	319	359	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

www.peraturan.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024										RO TAHUN 2020-2024					PIHO
					2020	2021	2022	2023	2024	BERSAMA MUSIM (BM)					PMDP / DLU	DIBB	PNBP	TOTAL ABBN	RPDU	DUMPR	APBD	SWADTA	NON ABBN	
										2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH										
001	000 Program Yang Kompeten									3,00	3,00	3,00	4,11	4,00	17,77	0,00	0,00	0,00	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Persentase Auditor Yang Memenuhi Kompetensi			%	80	80	80	80	80	3,00	3,00	3,00	4,11	4,00	17,77	0,00	0,00	0,00	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal									3,00	3,00	3,00	4,11	4,00	17,77	0,00	0,00	0,00	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi 000 Unit									3,00	3,00	3,00	4,11	4,00	17,77	0,00	0,00	0,00	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	Orang			130	130	130	140	150	3,00	3,00	3,00	4,11	4,00	17,77	0,00	0,00	0,00	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000 1	Pengelola Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Pengawas									30,00	31,63	30,76	31,13	32,32	154,84	0,00	0,00	0,00	154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	Prasarana Pengawasan Yang Mutakhir									0,10	0,17	0,20	0,03	0,06	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Tingkat Maturitas ARP Inspektorat Jenderal			Indeks	3	3	3	3	4	0,10	0,17	0,20	0,03	0,06	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal									0,10	0,17	0,20	0,03	0,06	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Pengelolaan ARP									0,10	0,17	0,20	0,03	0,06	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Jumlah Layanan Pengelolaan ARP Inspektorat Jenderal	Layanan			1	1	1	1	1	0,10	0,17	0,20	0,03	0,06	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Tingkat Kapabilitas ARP			Indeks	3	3	3	3	4	0,00	0,10	0,10	0,27	0,40	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal									0,00	0,10	0,10	0,27	0,40	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)									0,00	0,10	0,10	0,27	0,40	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah Layanan Pengelolaan Program Kerja Pengawasan Tahunan	Layanan			1	1	1	1	1	0,00	0,10	0,10	0,27	0,40	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	Organized It For Purpose									0,82	0,10	0,01	0,73	10,08	11,74	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal			Nilai	81	81	81	83	87	0,81	0,10	0,01	0,73	10,07	11,72	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal									0,74	0,04	0,74	1,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Penyusunan Pengadaan Inspektorat Jenderal									0,02	0,41	0,02	0,69	0,88	2,02	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Jumlah Layanan Penyusunan Pengadaan Internal	Layanan			2	2	2	2	2	0,02	0,41	0,02	0,69	0,88	2,02	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Penyusunan Kinerja Inspektorat Jenderal									0,22	0,13	0,22	0,33	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah Layanan Penyusunan Kinerja Inspektorat Jenderal	Layanan			2	2	2	2	2	0,22	0,13	0,22	0,33	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal									4,19	3,08	3,09	4,04	4,07	18,69	0,00	0,00	0,00	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Layanan Kinerja Inspektorat Jenderal									4,18	3,08	3,08	4,04	4,07	18,69	0,00	0,00	0,00	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Jumlah Layanan Layanan Kinerja Inspektorat Jenderal	Layanan			2	2	2	2	2	4,18	3,08	3,08	4,04	4,07	18,69	0,00	0,00	0,00	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Nilai Informasi Akuntansi Inspektorat Jenderal			Nilai	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	3,09	2,47	2,47	3,04	3,71	17,19	0,00	0,00	0,00	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005	Layanan Sarana Internal									3,09	2,47	2,47	3,04	3,71	17,19	0,00	0,00	0,00	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Peralatan Kantor Dilaksanakan									3,00	2,47	2,47	3,04	3,71	17,19	0,00	0,00	0,00	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Jumlah Layanan Sarana Internal	Unit			100	114	60	80	100	3,00	2,47	2,47	3,04	3,71	17,19	0,00	0,00	0,00	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006	Dukungan Anggaran Yang Berkualitas									47,11	30,03	31,24	31,84	31,27	202,49	0,00	0,00	0,00	202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Nilai Realisasi Anggaran			Nilai	80	81	81	83	90	47,11	30,03	31,24	31,84	31,27	202,49	0,00	0,00	0,00	202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Layanan Perkantoran									40,00	40,01	40,04	40,03	40,00	200,03	0,00	0,00	0,00	200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Gaji dan Tunjangan									39,02	41,49	41,32	42,74	43,17	209,15	0,00	0,00	0,00	209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah Layanan Operasional Perkantoran	Layanan			2	2	2	2	2	39,02	41,49	41,32	42,74	43,17	209,15	0,00	0,00	0,00	209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran									7,36	5,53	6,12	6,55	6,67	32,22	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Jumlah Layanan Operasional Perkantoran	Layanan			2	2	2	2	2	7,36	5,53	6,12	6,55	6,67	32,22	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	Layanan Umum									2,11	2,11	2,00	2,03	2,42	10,11	0,00	0,00	0,00	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Pengelolaan Pengadaan dan Umum									0,00	0,11	1,00	1,07	1,00	4,18	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Jumlah Layanan Umum Inspektorat Jenderal	Layanan			2	2	2	2	2	0,00	0,11	1,00	1,07	1,00	4,18	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Layanan Keuangan dan Dukungan Anggaran									1,00	1,11	1,12	1,20	1,30	6,40	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah Layanan Umum Inspektorat Jenderal	Layanan			2	2	2	2	2	1,00	1,11	1,12	1,20	1,30	6,40	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000 2	Pengelola Data dan Informasi dan Teknologi Pengawasan									1,00	0,00	0,00	0,00	0,91	2,91	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

www.peraturan.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024											RO TAHUN 2020-2024					TREO
					2020	2021	2022	2023	2024	KEBUTUHAN DANA						PHOP / DLL	DDPB	PNBP	TOTAL ABM		RPOM	RDMP	APBN	RMATA	RDP-ABM	
										2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH											
001	Sistem Informasi Manajemen Yang Handal dan Aktual									1,19	2,94	4,18	5,34	6,51	20,16	0,00	0,00	0,00	20,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Pengawasan			%	75	80	85	90	95	1,19	2,94	4,18	5,34	6,51	20,16	0,00	0,00	0,00	20,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Layanan Data dan Informasi									1,18	2,94	4,18	5,34	6,51	20,16	0,00	0,00	0,00	20,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Data dan Informasi Pengawasan									0,44	0,64	0,74	0,84	1,41	3,68	0,00	0,00	0,00	3,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah Layanan Data dan Informasi Pengawasan			Layanan	2	2	2	2	2	0,44	0,62	0,73	0,84	1,01	3,65	0,00	0,00	0,00	3,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Aplikasi dan Sistem Informasi Pengawasan									0,74	1,30	2,00	2,50	3,00	9,54	0,00	0,00	0,00	9,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah Layanan Aplikasi dan Sistem Informasi Pengawasan			Layanan	2	2	2	2	2	0,74	1,30	2,00	2,50	3,00	9,54	0,00	0,00	0,00	9,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Pembangunan Sistem Informasi Pengawasan									0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah Layanan Data dan Informasi Pengawasan			Layanan	2	2	2	2	2	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengawasan									0,00	1,04	1,07	3,14	7,27	14,49	0,00	0,00	0,00	14,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Optimal Sesuai Dengan Fungsi									0,00	1,04	1,07	3,14	7,27	14,49	0,00	0,00	0,00	14,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Persentase Sumber Daya Manusia Pengawasan Yang Bekerja Sesuai Dengan Fungsi			%	100	100	100	100	100	0,00	1,00	1,00	3,14	7,27	12,41	0,00	0,00	0,00	12,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021	Layanan									0,00	0,04	1,04	2,94	3,40	8,22	0,00	0,00	0,00	8,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Layanan Bidang Pengawasan									0,00	0,04	1,04	2,94	3,40	8,22	0,00	0,00	0,00	8,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah Kesepakatan Layanan Bidang Pengawasan			Kesepakatan	1	1	1	1	1	0,00	0,30	1,30	2,30	3,00	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022	Konstruksi									0,00	0,00	1,03	2,07	3,42	6,51	0,00	0,00	0,00	6,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Konstruksi Bidang Pengawasan									0,00	0,00	1,03	2,07	3,42	6,51	0,00	0,00	0,00	6,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah Konstruksi Kantor Bidang Pengawasan			Kantor pusat	1	1	1	1	1	0,00	0,00	1,03	2,07	3,42	6,51	0,00	0,00	0,00	6,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pengawasan									0,02	1,04	1,08	2,72	5,00	10,06	0,00	0,00	0,00	10,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Optimal Sesuai Dengan Fungsi									0,02	1,04	1,08	2,72	5,00	10,06	0,00	0,00	0,00	10,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Jumlah Layanan Komunikasi dan Informasi Pengawasan			Layanan	1	1	1	1	1	0,02	1,04	1,08	2,72	5,00	10,06	0,00	0,00	0,00	10,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	Layanan Kehumasan dan Protokoler									0,02	1,04	1,08	2,72	5,00	10,06	0,00	0,00	0,00	10,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Protokoler Pimpinan									0,02	0,49	0,52	0,55	0,57	2,15	0,00	0,00	0,00	2,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah Layanan Komunikasi dan Informasi Pengawasan			Layanan	4	4	4	4	4	0,02	0,49	0,52	0,55	0,57	2,15	0,00	0,00	0,00	2,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Hubungan Kemasyarakatan									0,00	0,16	0,17	0,16	0,19	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah Layanan Komunikasi dan Informasi Pengawasan			Layanan	4	4	4	4	4	0,00	0,16	0,17	0,16	0,19	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Majalah, Buletin, Media Informasi dan Dokumentasi									1,00	0,77	0,81	0,85	0,88	4,31	0,00	0,00	0,00	4,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah Layanan Komunikasi dan Informasi Pengawasan			Layanan	4	4	4	4	4	1,00	0,77	0,81	0,85	0,88	4,31	0,00	0,00	0,00	4,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Dejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)									0,97	0,18	0,89	1,20	2,21	6,45	0,00	0,00	0,00	6,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah Layanan Komunikasi dan Informasi Pengawasan			Layanan	4	4	4	4	4	0,97	0,18	0,89	1,20	2,21	6,45	0,00	0,00	0,00	6,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	Layanan dan Dukungan Pengawasan				2,20	2,16	2,77	3,84	4,72	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77	0,00	0,00	0,00	14,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Optimal Sesuai Dengan Fungsi				0,70	0,37	0,90	1,84	2,48	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	6,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	Persentase Peraturan Yang Ditetapkan			%	100	100	100	100	100	-0,70	-0,37	-0,90	-1,84	-2,48	-6,29	-0,00	-0,00	-0,00	-6,29		-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	
041	Peraturan Lainnya				0,70	0,37	0,90	1,84	2,48	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	6,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Peraturan Bidang Pengawasan				0,70	0,37	0,90	1,84	2,48	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	6,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah Peraturan Inspektorat Jenderal yang ditetapkan			Peraturan	2	3	4	5	6	0,70	0,37	0,90	1,84	2,48	6,29	0,00	0,00	0,00	6,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Dukungan Pengawasan Yang Efektif				1,50	1,73	1,97	2,24	2,58	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	10,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1XX	Dapat Dipublikasi ARP		Inspektorat	Jenjang	3	3	3	3	4	1,50	1,73	1,97	2,24	2,58	10,18	0,00	0,00	0,00	10,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	Layanan Hukum				1,00	1,13	1,35	1,57	1,81	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	7,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Bantuan Hukum				1,00	1,13	1,35	1,57	1,81	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	7,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah Layanan Hukum			Layanan	1	1	1	1	1	1,00	1,13	1,35	1,57	1,81	7,05	0,00	0,00	0,00	7,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Hasil Audit				0,50	0,60	0,62	0,67	0,77	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	3,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

www.peraturan.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024										RO RAMPS 2020-2024					PIC
					2020	2021	2022	2023	2024	BUKAN HIBAH (R M)					PHLN / BLU	RMP	PHLN	TOTAL ARMS	RPMJ	RPMN	APBD	SWASTA	NON ARMS	
										2020	2021	2022	2023	2024	R M										
	IX. Jumlah Layanan Pelabuhan			Layanan	1	1	1	1	1	2,50	1,30	1,60	1,75	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]			%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Judul Informasi Hukum Dijen Perhubungan Darat			nilai	72	73	74	75	76	21,61	22,93	24,03	25,15	26,31	120,52	0,00	0,00	0,00	120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I									21,61	22,93	24,03	25,15	26,31	120,52	0,00	0,00	0,00	120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub Out. Layanan Hukum									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	10 Jumlah layanan hukum			layanan	1	1	1	1	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]			nilai	75	76	77,5	80	80,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Judul AMR Kemenhub Perhubungan			nilai	0,8	0,9	0,95	0,98	1,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Judul Bidang Dijen Perhubungan Darat			nilai	70	75,5	79	79,5	80	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	900 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Sub Out. Layanan Manajemen Organisasi									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	10 Jumlah layanan manajemen organisasi			layanan	1	1	1	1	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Judul Tindak Lanjut Manajemen ARR Dijen Perhubungan Darat			nilai	0,8	0,9	0,92	0,94	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	900 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Sub Out. Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	10 Jumlah layanan manajemen SDM			layanan	1	1	1	1	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Nilai SAKIP Dijen Perhubungan Darat			nilai	0,5	0,6	0,8	0,9	0,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	900 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Sub Out. Layanan Monitoring dan Evaluasi									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	10 Jumlah layanan pemantauan dan evaluasi			layanan	1	1	1	1	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Judul Pengawasan Bangunan Dijen Perhubungan Darat			nilai	81,5	81,7	81,8	82	82,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	900 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Sub Out. Layanan Umum dan Rumah Tangga									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	10 Jumlah layanan umum dan rumah tangga			layanan	1	1	1	1	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Judul Perencanaan Dijen Perhubungan Darat			nilai	78	80	82	84	85	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	900 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Sub Out. Layanan Perencanaan									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

www.peraturan.go.id

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | KATEGORI | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024										RO RAMPS 2020-2024					PIC
					2020	2021	2022	2023	2024	BUKAN HIBAH (B.H)					PHBW / BLU	BMN	PNBP	TOTAL APBN	RPMU	RPMN	APBD	BMDATA	NON APBN	
										2020	2021	2022	2023	2024	B.H										
2K	Jumlah kegiatan evaluasi pasca diklat			Kegiatan	0	0	0	0	0	0,00	1,49	1,49	1,50	1,00	6,18	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90.0	**Pengelolaan Sistem Informasi Pemanjang Diklat**									**1,79**	**1,94**	**3,13**	**3,40**	**3,98**	**13,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Sub Out	**Pengadaan Sistem Informasi Pemanjang Diklat**				1,79	1,94	3,13	3,40	3,98	13,24	0,00	0,00	0,00	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1K	Jumlah kegiatan pengadaan sistem informasi pemanjang diklat			Kegiatan	0	0	0	0	0	1,79	1,94	3,13	3,40	3,98	11,85	0,00	0,00	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4GE0	**Pengelolaan Organisasi dan SDM BPSDM Transportasi**				**25,02**	**32,02**	**35,32**	**38,79**	**42,47**	**173,24**	**1,02**	**0,00**	**0,00**	**174,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0A	**Meningkatnya ulang akses ulang generasi ulang stand Kementerian Perhubungan**				**20,02**	**23,02**	**30,32**	**33,79**	**42,47**	**149,62**	**1,02**	**0,00**	**0,00**	**150,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1E2	**Indeks Akuntabilitas APBN Perhubungan**			nilai	70	74,2	76	78,8	80	1,20	1,29	1,38	1,47	1,58	6,91	0,00	0,00	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9E0	**Layanan Dukungan Manajemen Eselon I**				**1,20**	**1,29**	**1,38**	**1,47**	**1,58**	**6,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Sub Out	**Layanan Manajemen Organisasi**				**1,20**	**1,29**	**1,38**	**1,47**	**1,58**	**6,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1E	Jumlah layanan manajemen organisasi			Kegiatan	1	1	1	1	1	1,20	1,29	1,38	1,47	1,58	6,91	0,00	0,00	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1E2	**Indeks Profesionalisme ASN BPSDM Perhubungan**			nilai	72	73	74	74	75	4,40	4,84	5,31	5,72	6,18	26,45	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9E0	**Layanan Dukungan Manajemen Satker**				**4,40**	**4,84**	**5,31**	**5,72**	**6,18**	**26,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Sub Out	**Pengadaan Sarana Satker**				4,40	4,84	5,31	5,72	6,18	26,45	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1E	Jumlah layanan pengadaan sarana satker			Kegiatan	1	1	1	1	1	4,40	4,84	5,31	5,72	6,18	26,45	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1AK	**Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPSDM Perhubungan**			nilai	**0,8**	**0,9**	**0,92**	**0,94**	**1**	**2,512**	**28,40**	**2,615**	**32,00**	**34,00**	**149,53**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**149,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9E0	**Layanan Dukungan Manajemen Eselon I**				**16,00**	**18,42**	**19,71**	**21,09**	**22,58**	**97,78**	**1,02**	**0,00**	**0,00**	**98,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Sub Out	**Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia**				16,00	18,42	19,71	21,09	22,58	97,78	1,02	0,00	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1E	Jumlah layanan manajemen SDM			Kegiatan	1	1	1	1	1	16,00	18,42	19,71	21,09	22,58	97,78	1,02	0,00	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9E0	**Layanan Dukungan Manajemen Satker**				**6,90**	**7,97**	**9,14**	**10,51**	**12,10**	**46,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Sub Out	**Pengadaan Sarana Satker**				6,90	7,97	9,14	10,51	12,10	46,72	0,00	0,00	0,00	46,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1E	Jumlah layanan pengadaan sarana satker			Kegiatan	1	1	1	1	1	6,90	7,97	9,14	10,51	12,10	46,72	0,00	0,00	0,00	46,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4GE7	**Pengelolaan Prasarana dan Sarana BPSDM Transportasi**				**80,00**	**88,44**	**90,40**	**94,20**	**101,00**	**454,04**	**1,02**	**0,00**	**0,00**	**455,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0A	**Meningkatnya Akses Publik BPSDM Perhubungan Aksesibel**				**80,00**	**88,44**	**90,40**	**94,20**	**101,00**	**454,04**	**1,02**	**0,00**	**0,00**	**455,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1E2	**Nilai AKIP BPSDM Perhubungan**			nilai	80	81	82	83	85	2,42	2,66	2,92	3,22	3,54	12,67	0,00	0,00	0,00	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9E0	**Layanan Dukungan Manajemen Eselon I**				**2,42**	**2,66**	**2,92**	**3,22**	**3,54**	**12,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Sub Out	**Layanan Akuntabilitas Kinerja**				2,42	2,66	2,92	3,22	3,54	12,67	0,00	0,00	0,00	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1K	Jumlah layanan kinerja			Kegiatan	0	0	0	0	0	2,42	2,66	2,92	3,22	3,54	12,67	0,00	0,00	0,00	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1E2	**Indeks Pengamanan Aset BPSDM Perhubungan**			nilai	91,5	91,7	91,8	92	92,2	14,17	14,77	15,41	16,08	16,78	77,21	0,00	0,00	0,00	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9E0	**Layanan Dukungan Manajemen Eselon I**				**4,20**	**4,61**	**5,10**	**5,61**	**6,18**	**25,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Sub Out	**Layanan Umum dan Rumah Tangga**				4,20	4,61	5,10	5,61	6,18	25,66	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1E	Jumlah layanan umum dan rumah tangga			Kegiatan	1	1	1	1	1	4,20	4,61	5,10	5,61	6,18	25,66	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9E0	**Layanan Dukungan Manajemen Satker**				**9,87**	**9,86**	**10,26**	**10,67**	**10,88**	**51,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Sub Out	**Layanan Umum dan Rumah Tangga Satker**				9,87	9,86	10,26	10,67	10,88	51,13	0,00	0,00	0,00	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1K	Jumlah layanan pengadaan barang umum dan rumah tangga satker			Kegiatan	1	1	1	1	1	9,87	9,86	10,26	10,67	10,88	51,13	0,00	0,00	0,00	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1E2	**Indeks Maturitas SPIP BPSDM Perhubungan**			nilai	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,04	3,16	3,29	3,42	3,56	16,47	0,00	0,00	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9E0	**Layanan Dukungan Manajemen Eselon I**				**3,04**	**3,16**	**3,29**	**3,42**	**3,56**	**16,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Sub Out	**Layanan Monitoring dan Evaluasi**				3,04	3,16	3,29	3,42	3,56	16,47	0,00	0,00	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1E	Jumlah layanan pemantauan dan evaluasi			Kegiatan	1	1	1	1	1	3,04	3,16	3,29	3,42	3,56	16,47	0,00	0,00	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1E2	**Indeks Perencanaan BPSDM Perhubungan**			nilai	78	80	82	84	85	21,41	24,14	26,94	27,64	28,78	128,93	0,00	0,00	0,00	128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9E0	**Layanan Dukungan Manajemen Eselon I**				**17,00**	**18,23**	**19,00**	**20,87**	**22,10**	**97,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Sub Out	**Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran**				17,00	18,23	19,00	20,87	22,10	97,96	0,00	0,00	0,00	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1E	Jumlah layanan perencanaan			Kegiatan	1	1	1	1	1	17,00	18,23	19,00	20,87	22,10	97,96	0,00	0,00	0,00	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

www.peraturan.go.id

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | KATEGORI | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATUAN | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2020-2024

INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN KEGIATAN STRATEGIS

(dalam miliar rupiah)

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024										RO RAMP 2020-2024					PRIO
					2020	2021	2022	2023	2024	BERSAMA BUMN (B.M)						PNBP / BLU	BMN	PHLN	TOTAL ABM	RPMU	BUMN	APBN	SWASTA	NON ABM	
										2020	2021	2022	2023	2024	B.M										
12	Pembangunan Terminal Angkutan	Kab. Bengkayang, Kalbar	APD Wilayah XIV	Lokasi	0 -	0 -	0 -	0 -	1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
13	Pembangunan Terminal Tipe A Kecuali Air	Bantar	APD Wilayah V	Lokasi	1 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
14	Pembangunan Terminal Tipe A Tanjung Selor	Kalimantan	APD Wilayah XIV	Lokasi	0 -	0 -	0 -	1 -	0 -	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
15	Pembangunan Terminal Tipe Bodes	Kab. Kepulauan Seribu, Kalbar	APD Wilayah XIV	Lokasi	1 -	1 -	0 -	0 -	0 -	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	13,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
16	Pembangunan Terminal Mimika	Kab. Belu, NTT	APD Wilayah XIV	Lokasi	1 -	1 -	0 -	0 -	0 -	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
17	Pembangunan Terminal Tipe A Bintang Mengendor	Aceh	APD Wilayah XIII	Lokasi	1 -	1 -	0 -	0 -	0 -	97,50	100,00	0,00	0,00	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
18	Pembangunan Terminal Tengah Orang	Sulsel	APD Wilayah XIX	Lokasi	0 -	0 -	0 -	0 -	1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non
19	Pembangunan Terminal Tipe A Palapa	Sulsel	APD Wilayah XIX	Lokasi	1 -	1 -	0 -	0 -	0 -	70,00	100,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
20	Pembangunan Terminal Tipe A Bonak	Jateng	APD Wilayah X	Lokasi	1 -	0 -	0 -	0 -	0 -	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
21	Pembangunan Terminal Mimika	Kab. Jayapura, Papua	APD Wilayah XVII	Lokasi	1 -	1 -	0 -	0 -	0 -	10,00	12,75	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
22	Pembangunan Terminal Tipe A Lamentalau	Kalteng	APD Wilayah XIV	Lokasi	0 -	0 -	1 -	0 -	0 -	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non
23	Pembangunan Terminal Mimika	Kab. Malaka, NTT	APD Wilayah XIV	Lokasi	1 -	1 -	0 -	0 -	0 -	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
24	Pembangunan Terminal Tenajak	Kab. Sumba, Kalbar	APD Wilayah XV	Lokasi	0 -	0 -	0 -	0 -	1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
25	Pembangunan Terminal Tipe A Kupang	NTT	APD Wilayah XII	Lokasi	1 -	1 -	0 -	0 -	0 -	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
26	Pembangunan Terminal Tipe Atur Kelik	Kalbar	APD Wilayah XIV	Lokasi	0 -	0 -	1 -	0 -	0 -	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
XXX	**Jumlah pengadaan/peningkatan prasarana transportasi darat**			**Lokasi**	**5**	**11**	**10**	**20**	**36**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**[illegible]**	**[illegible]**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**[illegible]**	
27	Pembangunan/Peningkatan Prasarana Lalu Lintas Jembatan RUMN Mimika	Mimika/Papua	APD Wilayah XXIV	Lokasi	0 -	1 -	1 -	0 -	0 -	0,00	20,50	49,20	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
28	Pembangunan/Peningkatan Prasarana Lalu Lintas Jembatan RUMN Pangandaran	Jabar	APD Wilayah VII	Lokasi	0 -	0 -	0 -	1 -	0 -	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non
29	Pembangunan/Peningkatan Prasarana Lalu Lintas Jembatan RUMN Lapar Barat	Jogja	APD Wilayah IV	Lokasi	0 -	0 -	0 -	0 -	1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
30	Pembangunan/Peningkatan Prasarana Lalu Lintas Jembatan RUMN Sikuning (Jembatan Gantung Lamahong)	Aceh	APD Wilayah XIII	Lokasi	0 -	1 -	1 -	2 -	1 -	0,00	20,50	49,20	80,00	40,00	189,70	0,00	0,00	0,00	189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
31	Pembangunan/Peningkatan Prasarana Lalu Lintas Jembatan RUMN Terminal Tanjung Merak	Banten	APD Wilayah VII	Lokasi	0 -	0 -	1 -	0 -	0 -	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
32	Pembangunan/Peningkatan Prasarana Lalu Lintas Jembatan RUMN Sulawesi Raja	NTT	APD Wilayah XII	Lokasi	1 -	1 -	0 -	0 -	0 -	30,00	20,50	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
33	Pembangunan/Peningkatan Prasarana Lalu Lintas Jembatan RUMN Bukit Lagi (Bogkinda)	Bantar	APD Wilayah XI	Lokasi	0 -	0 -	0 -	2 -	0 -	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non
34	Pembangunan/Peningkatan Prasarana Lalu Lintas Jembatan RUMN Wakatobi	Sultra	APD Wilayah XVII	Lokasi	0 -	1 -	1 -	0 -	0 -	0,00	20,50	49,20	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
35	Pembangunan/Peningkatan/Pengaspalan Jalan di RUMN **Wilayah Regional I - XIV**	Kab. Bengkulu Utara, Kaltim	DK Angkutan Jalan	Lokasi	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50 [illegible]	0,00	0,00	0,00	1,50 [illegible]	PN
36	Pembangunan/Peningkatan Prasarana Lalu Lintas Jembatan RUMN Pelabuhan Ketapang - Gilimanuk	Jatim	APD Wilayah XI	Lokasi	0 -	0 -	0 -	1 -	0 -	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
37	Pembangunan/Peningkatan Prasarana Lalu Lintas Jembatan RUMN Tempo	Sulsel	APD Wilayah XIX	Lokasi	0 -	0 -	0 -	1 -	0 -	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non
38	Pembangunan/Peningkatan Prasarana Lalu Lintas Jembatan RUMN Bendungan Cibuk, dengan ruas, penlingkaran selatan	Jateng	APD Wilayah X	Lokasi	1 -	2 -	0 -	1 -	0 -	30,00	70,00	0,00	40,00	200,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
39	Pembangunan/Peningkatan Prasarana Lalu Lintas Jembatan Kuasan Air Gopur JIP, JBG (Bandung)	Jatim	APD Wilayah IX	Lokasi	0 -	0 -	0 -	1 -	0 -	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
40	Pembangunan/Peningkatan Prasarana Lalu Lintas Jembatan RUMN Tanjung Gunung	Banten	APD Wilayah X	Lokasi	0 -	0 -	0 -	1 -	0 -	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non
41	Pembangunan/Peningkatan Prasarana Lalu Lintas Jembatan Bunan - Terminal Bunan	Jateng	APD Wilayah X	Lokasi	0 -	0 -	0 -	0 -	1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
42	Pembangunan/Peningkatan Prasarana Lalu Lintas Jembatan RUMN Bunan Tuna	Sumut	APD Wilayah VI	Lokasi	1 -	1 -	0 -	0 -	0 -	30,00	20,50	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
43	Pembangunan/Peningkatan Prasarana Lalu Lintas Jembatan RUMN Bruno Tunggal Jemeru	Jatim	APD Wilayah XI	Lokasi	0 -	1 -	1 -	0 -	0 -	0,00	20,50	49,20	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
44	Pembangunan/Peningkatan Prasarana Lalu Lintas Jembatan RUMN Kota Bambang (Bangkalan/Madura)	Jabar	APD Wilayah II	Lokasi	0 -	0 -	0 -	0 -	2 -	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non
XXX	**Jumlah Unit pelayanan angkutan penyeberangan**			**Unit**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
45	Pelayanan Lintas/Pelayanan Perintis Angkutan Lembar - NTT	Kota/Kabupaten Jatim	DK Transportasi ASDP	Unit	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
46	Pelayanan/Operasi Angkutan Penyeberangan	DK Jakarta	DK Transportasi ASDP	Unit	[illegible] -	[illegible] -	[illegible] -	[illegible] -	[illegible] -	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
XXX	**Jumlah Angkutan ASDP perintis yang transportasi dan alat dipertahankan**			**Unit**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**[illegible]**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
47	Pembangunan/Rehab Air Bersih I	Papua	APD Wilayah XXV	Unit	1 -	0 -	0 -	0 -	0 -	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
48	Pembangunan/Rehab Air Minum (Bakim)	Mimika/Papua	APD Wilayah XXV	Unit	0 -	0 -	0 -	1 -	1 -	0,00	0,00	0,00	312,50	412,50	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB

PN: Prioritas Nasional, PB: Prioritas Bidang, KL: Prioritas K/L, DK: Indikasi Non Ops Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis, Ops: Indikasi Belanja Operasional, Keb: Indikasi Kebutuhan di Luar RUMN

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Perhubungan 2020-2024

www.peraturan.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024																		PRIO
					2020	2021	2022	2023	2024	KEBUTUHAN DANA						PAGU / ALOK	SISWA	PELJA	TOTAL ANGG	REPUJ	REMIN	APBD	SWASTA	NON APBD		
										2020	2021	2022	2023	2024	JUM													
49	Pembangunan/rehab Air Sumur 2	Sumut	BPPW Wilayah I	unit	1	0	0	0	0	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
50	Pembangunan/rehab Air Jambi (Sp.Jelutung/Tenar)	Jambi	BPPW Wilayah V	unit	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	30,25	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Baik
51	Pembangunan/rehab Air Sumsel (Sp.Lalang/Kuang/Tanjung Lago/Sp.Pagar/Sp.Lubuk Kelim/Sp.Kelekar/Sp.Pedamaran/Sp.Ujung Tanjung/Sp.Ujung Tanjung Ilir/Sp.Ujung Tanjung Ilir/Sp.Ujung Tanjung Ilir

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024											RO RAMP 2020-2024					PIC
					2020	2021	2022	2023	2024	BUKAN BUKTI (RB)						PNBP / BLU	BMN	PHLN	TOTAL ABM		RPMJ	RKMP	APBD	SWASTA	NON ABM	
										2020	2021	2022	2023	2024	RM											
2.38	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Kembang Pati	Jakbar	APD Wilayah XI	Lokasi	0 -	0 -	1 -	0 -	0 -	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB	Rob
2.39	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Kalimanan	Jakteng	APD Wilayah X	Lokasi	0 -	0 -	1 -	0 -	0 -	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB	Rob
2.39	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Cilacap	Jawa Tengah	APD Wilayah VII	Lokasi	0 -	0 -	0 -	0 -	1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB	Rob
2.40	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Bogalakasa	Lampung	APD Wilayah VI	Lokasi	1 -	0 -	0 -	0 -	0 -	2.225,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB	
2.41	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Bhakti Bunga	Jambi	APD Wilayah V	Lokasi	0 -	0 -	0 -	0 -	1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB	
2.42	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Angkasa	Jawa Timur	APD Wilayah IX	Lokasi	1 -	0 -	0 -	0 -	0 -	1.100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB	
2.43	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Bocoro	Jawa Timur	APD Wilayah XIII	Lokasi	0 -	0 -	0 -	0 -	1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL	
2.44	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Tanjung	Jakteng	APD Wilayah X	Lokasi	0 -	1 -	0 -	0 -	0 -	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB	
2.45	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Mendoleh	Aceh	APD Wilayah I	Lokasi	0 -	0 -	1 -	0 -	0 -	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB	
2.46	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Bojong Lebang	Bengkulu	APD Wilayah VI	Lokasi	0 -	0 -	0 -	0 -	1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rob	
2.47	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Tugal	Jawa Tengah	APD Wilayah X	Lokasi	0 -	1 -	0 -	0 -	0 -	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB	
2.48	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Pulau Legundi	Jakteng	APD Wilayah X	Lokasi	1 -	0 -	0 -	0 -	0 -	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL	
2.49	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Mambulu	Sulawesi	APD Wilayah XII	Lokasi	1 -	0 -	0 -	0 -	0 -	97,50	100,00	0,00	0,00	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB	
2.50	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Mamasapan	Jatim	APD Wilayah XI	Lokasi	0 -	0 -	1 -	0 -	0 -	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rob	
2.51	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Cadangan	Jabar	APD Wilayah IX	Lokasi	0 -	0 -	1 -	0 -	0 -	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rob	
2.52	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Dilidaya	Jakpus	APD Wilayah II	Lokasi	0 -	0 -	0 -	1 -	0 -	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL	
2.53	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Bengkulu	Jawa Timur	APD Wilayah V	Lokasi	0 -	0 -	0 -	0 -	1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rob	
2.54	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Pelang Baru	Jawa Timur	APD Wilayah IX	Lokasi	0 -	0 -	0 -	1 -	0 -	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB	
2.55	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Cadangan	Aceh	APD Wilayah I	Lokasi	0 -	0 -	1 -	0 -	0 -	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB	
2.56	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Bangkal	Jawa Timur	APD Wilayah IX	Lokasi	0 -	1 -	0 -	0 -	0 -	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rob	
2.57	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Sumalidoro	Jatim	APD Wilayah XI	Lokasi	0 -	0 -	0 -	0 -	1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rob	
2.58	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Bonto	Aceh	APD Wilayah I	Lokasi	0 -	0 -	1 -	0 -	0 -	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB	
2.59	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Dhudamrugo	DIY	APD Wilayah X	Lokasi	0 -	0 -	1 -	0 -	0 -	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rob	
2.60	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Mandalika	NTB	APD Wilayah XII	Lokasi	0 -	0 -	1 -	0 -	0 -	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB	
2.61	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Bawean	Jawa Timur	APD Wilayah X	Lokasi	0 -	1 -	0 -	0 -	0 -	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB	
2.62	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Mangkalung	Jakteng	APD Wilayah X	Lokasi	1 -	0 -	0 -	0 -	0 -	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB	
2.63	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Madiun	Jawa Timur	APD Wilayah IX	Lokasi	0 -	0 -	0 -	1 -	0 -	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rob	
2.64	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Purwokerto	Jawa Tengah	APD Wilayah X	Lokasi	1 -	0 -	0 -	0 -	0 -	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL	
2.65	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Purbinga	Jatim	APD Wilayah XI	Lokasi	1 -	1 -	0 -	0 -	0 -	275,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL	
2.66	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Mungkid	Bali	APD Wilayah XII	Lokasi	1 -	0 -	0 -	0 -	0 -	175,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB	
2.67	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Lamongan	Jawa Timur	APD Wilayah IX	Lokasi	1 -	0 -	0 -	0 -	0 -	1.225,00	325,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB	
2.68	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Arjosari	Jatim	APD Wilayah XI	Lokasi	0 -	0 -	1 -	0 -	0 -	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB	
2.69	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Tamanan	Jatim	APD Wilayah XI	Lokasi	1 -	1 -	0 -	0 -	0 -	375,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL	
2.70	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Ex. Dukuhtria	Jawa Timur	APD Wilayah X	Lokasi	0 -	1 -	0 -	0 -	0 -	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB	
2.71	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Batu Raden	Jawa Timur	APD Wilayah VII	Lokasi	0 -	0 -	0 -	0 -	1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rob	
2.72	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Langsa	Aceh	APD Wilayah I	Lokasi	0 -	0 -	0 -	1 -	0 -	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rob	
2.73	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Argo Wiyanto	Jatim	APD Wilayah XI	Lokasi	0 -	1 -	0 -	0 -	0 -	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rob	
2.74	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Bonto Bulu	Sulawesi	APD Wilayah VII	Lokasi	0 -	0 -	0 -	1 -	0 -	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rob	
2.75	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Mondoke	Jawa Timur	APD Wilayah X	Lokasi	0 -	0 -	1 -	0 -	0 -	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rob	
2.76	Aktualisasi/ Penegakan Terminal Pagar Dewa	Aceh	APD Wilayah I	Lokasi	0 -	0 -	1 -	0 -	0 -	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rob	

PN: Prioritas Nasional; PB: Prioritas Bidang; KL: Prioritas K/L; IM: Indikator Non Ops Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis; Ops: Indikator Belanja Operasional; Kab: Indikator Kabupaten di Luar RPJMN

www.peraturan.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024											RO RAMP 2020-2024					PIC
					2020	2021	2022	2023	2024	BUKAN BUKTI (BB)						PNBP / BLU	BMN	PHLN	TOTAL ABM		RPM	RKBR	APBD	SWASTA	NON ABM	
										2020	2021	2022	2023	2024	BB											
276	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal Amamapare	Jawa	BPTD Wilayah V	Unit	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
277	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal Giwangan	DIY	BPTD Wilayah X	Unit	0	0	1	0	0	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
278	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal Pancasila	Sulsel	BPTD Wilayah XVII	Unit	1	0	0	0	0	75,00	22,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
279	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal Patria	Jatim	BPTD Wilayah XI	Unit	0	0	1	0	0	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non
280	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal Sunan Pagung	NTB	BPTD Wilayah XII	Unit	0	0	1	0	0	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non
281	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal Angkutan	Jatim	BPTD Wilayah IX	Unit	1	0	0	0	0	100,00	145,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
282	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal Induk Lampung	Sulsel	BPTD Wilayah XVI	Unit	1	1	0	0	0	100,00	165,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Al
283	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal Ciel	Sumbar	BPTD Wilayah II	Unit	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
284	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal Tanjung Pinang	Sumut	BPTD Wilayah VI	Unit	0	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
285	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal Sido Aji	Jateng	BPTD Wilayah X	Unit	0	0	1	0	0	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non
286	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal Gunung Kidul	Jatim	BPTD Wilayah IX	Unit	1	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
287	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal Tawangmangu	Jatim	BPTD Wilayah IX	Unit	0	0	1	0	0	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non
288	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal Induk Pemalang	Jateng	BPTD Wilayah X	Unit	0	1	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
289	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal Pakuparan	Banten	BPTD Wilayah VII	Unit	0	1	0	0	0	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
290	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal Tipar cuja	Jabar	BPTD Wilayah XIX	Unit	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non
XXX	**Persentase pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di pelabuhan laut**			**%**	**71**	**72**	**74**	**76**	**79**	**1.023,00**	**1.400,00**	**1.000,00**	**1.300,00**	**1.400,00**	**7.123,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.123,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
291	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga Tambat (Pier)	Aceh	BPTD Wilayah IV	Unit	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non
292	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga Multiguna (Jetty)	Jatim	BPTD Wilayah XIII	Unit	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
293	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga Ice Factory (Pier Ice)	Sulsel	BPTD Wilayah XIV	Unit	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
294	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga Wisata (Jetty)	Jateng	BPTD Wilayah X	Unit	0	0	1	0	0	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non
295	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga Pelantar (Deck)	Jatim	BPTD Wilayah XIII	Unit	0	0	1	1	0	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
296	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga Muara Telang (Palembang)	Sumsel	BPTD Wilayah VII	Unit	1	1	0	0	0	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
297	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga Simpang 30 (Sumsel)	Sumsel	BPTD Wilayah VII	Unit	0	1	0	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Al
298	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga Tanjung Api-Api (Sumsel)	Sumsel	BPTD Wilayah VII	Unit	1	1	0	0	0	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
299	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga Kalianyar (Jetty)	Jatim	BPTD Wilayah XI	Unit	0	1	0	0	0	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Al
300	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga Nongsa (NTB)	NTB	BPTD Wilayah XII	Unit	0	1	0	0	0	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Al
301	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga Muara Kuto Mas (Sumbar)	Sumbar	BPTD Wilayah II	Unit	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non
302	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga Tuk Bik (Bulung)	Bulung	BPTD Wilayah XX	Unit	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non
303	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga (Bulung)	Bulung	BPTD Wilayah XX	Unit	0	0	1	0	0	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non
304	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga Silungkang (Sumbar)	Sumbar	BPTD Wilayah II	Unit	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Al
305	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga Cikandang (Sukabumi)	Jabar	BPTD Wilayah X	Unit	0	0	1	0	0	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non
306	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga Bakauheni (Bakau)	Aceh	BPTD Wilayah XIII	Unit	0	0	1	0	0	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
307	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga Bumiratu (Bakau)	Sulsel	BPTD Wilayah XIV	Unit	0	1	0	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
308	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga Kalianyar (Bakau)	Jatim	BPTD Wilayah XIII	Unit	0	1	0	0	0	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
309	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga Sinabang (Bank)	Aceh	BPTD Wilayah I	Unit	1	0	0	0	0	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Al
310	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga Pasir Rempah (Bapak)	Jogja	BPTD Wilayah IV	Unit	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Al
311	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga Kangean (Jetty)	Jatim	BPTD Wilayah XI	Unit	0	0	1	0	0	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Al
312	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga Dumai (Papan)	Riau	BPTD Wilayah XIII	Unit	0	1	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
313	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga Kuala (Papan)	Riau	BPTD Wilayah XIII	Unit	0	1	0	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non
314	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga Bontang - Kumai (Bulat)	Kalbar	BPTD Wilayah XIV	Unit	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB

PN: Prioritas Nasional; PB: Prioritas Bidang; KL: Prioritas K/L; IM: Indikator Non Ops Kegiatan Dukungan Manajemen / Perangkat Teknis; Ops: Indikator Belanja Operasional; Kab: Indikator Kabupaten di Luar RPJMN

www.peraturan.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024										RO RAMPI 2020-2024					PIC
					2020	2021	2022	2023	2024	BUKAN BUKTI (BB)						PNBP / BLU	BMN	PHLN	TOTAL ABM	RPJMJ	RPJMD	APBD	SWASTA	NON ABM	PIC
										2020	2021	2022	2023	2024	B.M.										
2.15	Aktualisasi Aktualisasi Pengaktualisasian Kalimantan (Data)	Acid	APIS Wilayah XIII	Lokasi	0 -	0 -	1 -	0 -	0 -	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
2.16	Aktualisasi Aktualisasi Pengaktualisasian Sulawesi (Kalsel)	Kalsel	APIS Wilayah XVII	Lokasi	0 -	1 -	0 -	0 -	0 -	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
2.17	Aktualisasi Aktualisasi Sungai Sukayan (Kalteng)	Kalteng	APIS Wilayah XIV	Lokasi	0 -	0 -	0 -	0 -	1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
2.18	Aktualisasi Aktualisasi Pengaktualisasian Bouman (Jatim)	Jatim	APIS Wilayah XI	Lokasi	0 -	0 -	0 -	1 -	0 -	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
2.19	Aktualisasi Aktualisasi Pengaktualisasian Sibirut (Sumbar)	Sumbar	APIS Wilayah II	Lokasi	0 -	0 -	0 -	1 -	0 -	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
2.20	Aktualisasi Aktualisasi Pengaktualisasian Kendari (Sultra)	Sultra	APIS Wilayah XVII	Lokasi	0 -	0 -	1 -	0 -	0 -	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
2.21	Aktualisasi Aktualisasi Pengaktualisasian Sampali (Riau)	Riau	APIS Wilayah V	Lokasi	0 -	0 -	0 -	0 -	1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
2.22	Aktualisasi Aktualisasi Pengaktualisasian Bhakti (Gorontalo)	Gorontalo	APIS Wilayah XIX	Lokasi	1 -	0 -	0 -	0 -	0 -	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
2.23	Aktualisasi Aktualisasi Pengaktualisasian Sicile (Riau)	Riau	APIS Wilayah IV	Lokasi	0 -	0 -	1 -	0 -	0 -	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
2.24	Aktualisasi Aktualisasi Sungai Q Alangan - Muat Kalang (Kaltim)	Kaltim	APIS Wilayah XV	Lokasi	0 -	0 -	0 -	0 -	1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
2.25	Aktualisasi Aktualisasi Sungai Kumeno (Papua Barat)	Papua Barat	APIS Wilayah XIX	Lokasi	0 -	1 -	0 -	0 -	0 -	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
2.26	Aktualisasi Aktualisasi Sungai (Kaltim)	Kaltim	APIS Wilayah XIV	Lokasi	0 -	0 -	1 -	0 -	0 -	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aub
2.27	Aktualisasi Aktualisasi Pengaktualisasian Sei Jepara (Kaltim)	Kaltim	APIS Wilayah XIV	Lokasi	0 -	1 -	0 -	0 -	0 -	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
2.28	Aktualisasi Aktualisasi Pengaktualisasian Bintang (Papua Barat)	Papua Barat	APIS Wilayah XIX	Lokasi	0 -	0 -	0 -	1 -	0 -	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
2.29	Aktualisasi Aktualisasi Pengaktualisasian Mengkapan (Riau)	Riau	APIS Wilayah IV	Lokasi	0 -	1 -	0 -	0 -	0 -	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
2.30	Aktualisasi Aktualisasi Pengaktualisasian Tapa (Jambi) (Data)	Jambi	APIS Wilayah XII	Lokasi	0 -	0 -	0 -	0 -	1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
2.31	Aktualisasi Aktualisasi Pengaktualisasian Belang (Maluku)	Maluku Utara	APIS Wilayah XXIV	Lokasi	0 -	0 -	0 -	0 -	1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aub
2.32	Aktualisasi Aktualisasi Sungai Tanjung Jetor - Angan V (Kaltim)	Kaltim	APIS Wilayah XIV	Lokasi	0 -	0 -	0 -	1 -	0 -	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
2.33	Aktualisasi Aktualisasi Sungai (Jambi)	Jambi	APIS Wilayah IV	Lokasi	0 -	0 -	0 -	1 -	1 -	0,00	0,00	0,00	75,00	7,50	1,30,00	0,00	0,00	0,00	1,30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
2.34	Aktualisasi Aktualisasi Sungai (Jambi)	Jambi	APIS Wilayah XI	Lokasi	0 -	0 -	0 -	1 -	0 -	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aub
2.35	Aktualisasi Aktualisasi Sungai (Jambi)	Jambi	APIS Wilayah V	Lokasi	0 -	0 -	1 -	0 -	0 -	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
2.36	Aktualisasi Aktualisasi Sungai Tanjung Jetor - Angan IV (Kaltim)	Kaltim	APIS Wilayah XIV	Lokasi	0 -	0 -	0 -	1 -	0 -	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
2.37	Aktualisasi Aktualisasi Pengaktualisasian Tua Apit (Sumbar)	Sumbar	APIS Wilayah II	Lokasi	0 -	0 -	1 -	0 -	0 -	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
2.38	Aktualisasi Aktualisasi Sungai Tekal (Kalteng) (Kalteng)	Kalteng	APIS Wilayah XIV	Lokasi	0 -	0 -	1 -	0 -	0 -	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aub
2.39	Aktualisasi Aktualisasi Pengaktualisasian Tersebut (Kaltim)	Kaltim	APIS Wilayah XIV	Lokasi	0 -	0 -	0 -	0 -	1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
2.40	Aktualisasi Aktualisasi Sungai Kemu (Papua Barat)	Papua Barat	APIS Wilayah XXX	Lokasi	1 -	0 -	0 -	0 -	0 -	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
2.41	Aktualisasi Aktualisasi Sungai Jenkitah (Kalteng)	Kalteng	APIS Wilayah XIV	Lokasi	0 -	1 -	0 -	0 -	0 -	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aub
2.42	Aktualisasi Aktualisasi Pengaktualisasian Sele (Maluku)	Maluku	APIS Wilayah XIII	Lokasi	1 -	1 -	0 -	0 -	0 -	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
2.43	Aktualisasi Aktualisasi Sungai Long Pasu (Kaltara)	Kaltara	APIS Wilayah XVII	Lokasi	0 -	0 -	1 -	0 -	0 -	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
2.44	Aktualisasi Aktualisasi Sungai Tolo - Pengaruan (Sumut)	Sumut	APIS Wilayah VI	Lokasi	0 -	0 -	0 -	0 -	1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
2.45	Aktualisasi Aktualisasi Pengaktualisasian Lembah (Aceh)	Aceh	APIS Wilayah XXI	Lokasi	1 -	0 -	0 -	0 -	0 -	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
2.46	Aktualisasi Aktualisasi Pengaktualisasian Ruas (Jatim)	Jatim	APIS Wilayah XI	Lokasi	0 -	0 -	0 -	1 -	0 -	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
2.47	Aktualisasi Aktualisasi Sungai Mentaya (Kalteng)	Kalteng	APIS Wilayah XIV	Lokasi	0 -	0 -	0 -	1 -	0 -	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
2.48	Aktualisasi Aktualisasi Sungai Tanjung Jetor - Angan III (Kaltim)	Kaltim	APIS Wilayah XIV	Lokasi	0 -	0 -	1 -	0 -	0 -	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
2.49	Aktualisasi Aktualisasi Pengaktualisasian Sooko (Bali)	Bali	APIS Wilayah III	Lokasi	0 -	0 -	1 -	0 -	0 -	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
2.50	Aktualisasi Aktualisasi Sungai Oyong (Sumut)	Sumut	APIS Wilayah VI	Lokasi	0 -	0 -	0 -	0 -	1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
2.51	Aktualisasi Aktualisasi Pengaktualisasian Tekal (Sumbar) (Sumbar)	Sumbar	APIS Wilayah II	Lokasi	1 -	1 -	0 -	0 -	0 -	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	1,50,00	0,00	0,00	0,00	1,50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
2.52	Aktualisasi Aktualisasi Sungai Mentaya (Kalteng)	Kalteng	APIS Wilayah XIV	Lokasi	0 -	1 -	0 -	0 -	0 -	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
2.53	Aktualisasi Aktualisasi Pengaktualisasian Sarera (Maluku)	Maluku	APIS Wilayah XIII	Lokasi	0 -	0 -	0 -	0 -	1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
2.54	Aktualisasi Aktualisasi Pengaktualisasian Nusa Penida (Bali)	Bali	APIS Wilayah III	Lokasi	0 -	0 -	0 -	1 -	0 -	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aub

PN: Prioritas Nasional, PB: Prioritas Bidang, KL: Prioritas K/L, IM: Indikator Non Ops Kegiatan Dukungan Manajemen / Perangkat Teknis, Ops: Indikator Belanja Operasional, Kab: Indikator Kabupaten di Luar RPJMN

www.peraturan.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024																	PIC
					2020	2021	2022	2023	2024	KEBUTUHAN DANA (RP)						PHLN / BLU	RDMP	PHLN	TOTAL ABM	REALISASI 2020-2024					
										2020	2021	2022	2023	2024	RM					REALI	REMB	APBD	SWASTA	NON ABM	
3.35	Aktualisasi Pelaksanaan Sarana Kantor Kepang Lyfas-V (Kantor)	Jember	APD Wilayah II	Unit	0 - -	0 - -	1 - -	0 - -	0 - -	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rob
3.36	Aktualisasi Pelaksanaan Sarana Cicurug Mayjend (Kantor)	Jember	APD Wilayah II	Unit	0 - -	0 - -	1 - -	0 - -	0 - -	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rob
3.37	Aktualisasi Pelaksanaan Sarana Sri Rejeki (Kantor)	Aceh	APD Wilayah XV	Unit	0 - -	1 - -	0 - -	0 - -	0 - -	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rob
3.38	Aktualisasi Pelaksanaan Sarana Cijulang Kertajaya (Kantor)	Jakarta	APD Wilayah IX	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	0 - -	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rob
3.39	Aktualisasi Pelaksanaan Sarana Kayan (Kantor)	Kaltara	APD Wilayah XVII	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	0 - -	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
3.40	Aktualisasi Pelaksanaan Pengadaan Sepeda (Unit)	Jatim	APD Wilayah IV	Unit	0 - -	0 - -	1 - -	0 - -	0 - -	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
3.41	Aktualisasi Pelaksanaan Pengadaan Tulpa (Dalam)	Sulteng	APD Wilayah XX	Unit	1 - -	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
3.42	Aktualisasi Pelaksanaan Sarana Kota Kotamaya (Kantor)	Kaltim	APD Wilayah XVII	Unit	0 - -	0 - -	1 - -	1 - -	0 - -	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
3.43	Aktualisasi Pelaksanaan Sarana Merdeka (Kantor)	Sulteng	APD Wilayah XIV	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	0 - -	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rob
3.44	Aktualisasi Pelaksanaan Sarana Bengawan Solo (Unit) Jateng	Jateng	APD Wilayah X	Unit	0 - -	0 - -	1 - -	0 - -	0 - -	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rob
3.45	Aktualisasi Pelaksanaan Wahid Hakim Cianjur (Unit)	Jabar	APD Wilayah IX	Unit	1 - -	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
3.46	Aktualisasi Pelaksanaan Sarana Sangatta (Unit)	Kaltim	APD Wilayah XIV	Unit	0 - -	0 - -	1 - -	0 - -	0 - -	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
3.47	Aktualisasi Pelaksanaan Sarana Kendari (Unit)	Aceh	APD Wilayah XV	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
3.48	Aktualisasi Pelaksanaan Sarana Bengkulu Pontianggelan (Sumber)	Sumber	APD Wilayah III	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	0 - -	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rob
3.49	Aktualisasi Pelaksanaan Sarana Kotakarno (Sis Antara)	Kaltara	APD Wilayah XVII	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	0 - -	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
3.50	Aktualisasi Pelaksanaan Sarana Bhara Bakti (Unit)	Jambi	APD Wilayah V	Unit	0 - -	1 - -	0 - -	0 - -	0 - -	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rob
3.51	Aktualisasi Pelaksanaan Pengadaan Longgam (Unit)	Jatim	APD Wilayah XIII	Unit	0 - -	0 - -	1 - -	0 - -	0 - -	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rob
3.52	Aktualisasi Pelaksanaan Pengadaan Kerapung (Kantor)	Aceh	APD Wilayah XV	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
3.53	Aktualisasi Pelaksanaan Sarana Acos (Kantor)	Kaltim	APD Wilayah XVII	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	0 - -	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rob
3.54	Aktualisasi Pelaksanaan Pengadaan Pakaian (Bengkulu)	Bengkulu	APD Wilayah II	Unit	0 - -	0 - -	1 - -	0 - -	0 - -	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
3.55	Aktualisasi Pelaksanaan Pengadaan Gerontak (Gerontak)	Gorontalo	APD Wilayah XIV	Unit	1 - -	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
3.56	Aktualisasi Pelaksanaan Pengadaan Kerapun (NTT)	NTT	APD Wilayah XXI	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	0 - -	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rob
3.57	Aktualisasi Pelaksanaan Pengadaan Lingung (Unit)	Aceh	APD Wilayah XIII	Unit	1 - -	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
3.58	Aktualisasi Pelaksanaan Sarana Jual Tanah (Unit)	Jatim	APD Wilayah I	Unit	1 - -	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
3.59	Aktualisasi Pelaksanaan Pengadaan Tribal Bus (Maluku)	Maluku	APD Wilayah XVII	Unit	1 - -	1 - -	0 - -	0 - -	0 - -	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
3.60	Aktualisasi Pelaksanaan Sarana Pagaran (Kantor)	Sulteng	APD Wilayah XIV	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
3.61	Aktualisasi Pelaksanaan Sarana Pesona Jaya (Kantor)	Aceh	APD Wilayah XV	Unit	0 - -	0 - -	1 - -	0 - -	0 - -	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
3.62	Aktualisasi Pelaksanaan Pengadaan Sofil (Unit)	Maluku Utara	APD Wilayah XXII	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	0 - -	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
3.63	Aktualisasi Pelaksanaan Sarana Kaltara (Kantor)	Kaltara	APD Wilayah XVII	Unit	0 - -	0 - -	1 - -	0 - -	0 - -	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
3.64	Aktualisasi Pelaksanaan Wahid Sugiding Mendi (Unit)	Jabar	APD Wilayah IX	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rob
3.65	Aktualisasi Pelaksanaan Sarana Solar (Kantor)	Sulteng	APD Wilayah XIV	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
3.66	Aktualisasi Pelaksanaan Pengadaan Air Pamung (Maluku)	Maluku	APD Wilayah XXII	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
3.67	Aktualisasi Pelaksanaan Sarana Malinau (Kantor)	Kaltara	APD Wilayah XVII	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	0 - -	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rob
3.68	Aktualisasi Pelaksanaan Tanjung Selor - Bayan (Kantor)	Kaltara	APD Wilayah XVI	Unit	0 - -	0 - -	1 - -	0 - -	0 - -	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
3.69	Aktualisasi Pelaksanaan Pengadaan Lawas (Unit)	Papua	APD Wilayah XIII	Unit	1 - -	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
3.70	Aktualisasi Pelaksanaan Sarana Sapang Dalem (Kantor)	Sulteng	APD Wilayah XIV	Unit	0 - -	1 - -	0 - -	0 - -	0 - -	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rob
3.71	Aktualisasi Pelaksanaan Pengadaan Sakeiru (Unit)	Maluku Utara	APD Wilayah XXII	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rob
3.72	Aktualisasi Pelaksanaan Sarana Tulus Ikhlas - Pangi Pos (Kantor)	Aceh	APD Wilayah XV	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
3.73	Aktualisasi Pelaksanaan Pengadaan Mampu (Unit)	Aceh	APD Wilayah XIII	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
3.74	Aktualisasi Pelaksanaan Sepeh Mengkurai (Sarana)	Jateng	APD Wilayah X	Unit	0 - -	0 - -	1 - -	0 - -	0 - -	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rob

PN: Prioritas Nasional, PB: Prioritas Bidang, KL: Prioritas K/L, IM: Indikasi Non Ops Kegiatan Dukungan Manajemen / Perangkat Teknis, Ops: Indikasi Belanja Operasional, Keb: Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Perhubungan 2020-2024

www.peraturan.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024											RO RAMP 2020-2024					PIC
					2020	2021	2022	2023	2024	BERSAMA BUMN (B.M)						PNBP / BLU	BMN	PHLN	TOTAL ANGG		RPMU	RPMN	APBD	SWASTA	NON APBD	PIC
										2020	2021	2022	2023	2024	B.M											
2.15	Rehabilitasi Prasarana Pengairan Rawa (Saka)	Aceh	BPSDA Wilayah XIII	Lokasi	0	0	1	0	0	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
2.16	Rehabilitasi Prasarana Pengairan Tambak (Maluku Utara)	Maluku Utara	BPSDA Wilayah XXV	Lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab
2.17	Rehabilitasi Prasarana Sungai Kontinu Tukuak Aruan (Dumbria)	Sumber	BPSDA Wilayah IV	Lokasi	0	0	1	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab
2.18	Rehabilitasi Prasarana Pengairan Rawa (Maluku)	Maluku Utara	BPSDA Wilayah XXV	Lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
2.19	Rehabilitasi Prasarana Pengairan Rawa (Maluku)	Maluku	BPSDA Wilayah XXII	Lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KL
2.2	**Persentase jaringan IRIGASI Tersisa/Tipes**			**%**	**35,55**	**35,7**	**72,08**	**80,4**	**82,75**	**14,31**	**1.115,00**	**811,00**	**4.00,00**	**315,00**	**1.603,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.603,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4.01	Rehabilitasi Tersisa (Sulut Maut)	Jabar	BPSDA Wilayah X	Lokasi	0	1	0	0	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.02	Rehabilitasi Tersisa Arjawat	Jatim	BPSDA Wilayah XI	Lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.02	Rehabilitasi Tersisa Nusa	Jatim	BPSDA Wilayah XI	Lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.03	Rehabilitasi Tersisa Jaringan Nilai	Riau	BPSDA Wilayah IV	Lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.04	Rehabilitasi Tersisa Mandalah	Aceh	BPSDA Wilayah I	Lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.05	Rehabilitasi Tersisa Pekalongan	Jateng	BPSDA Wilayah X	Lokasi	1	0	0	0	0	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.06	Rehabilitasi Tersisa Purworejo	Jateng	BPSDA Wilayah X	Lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.07	Rehabilitasi Tersisa Gunungkidul	DIY	BPSDA Wilayah X	Lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.08	Rehabilitasi Tersisa Mengwi	Bali	BPSDA Wilayah XII	Lokasi	0	1	0	0	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.09	Rehabilitasi Tersisa Aryo Wiraraja	Jatim	BPSDA Wilayah XI	Lokasi	0	0	1	0	0	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.10	Rehabilitasi Tersisa Sayang/Pengga	Aceh	BPSDA Wilayah I	Lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.11	Rehabilitasi Tersisa Jatilihung	Jabar	BPSDA Wilayah X	Lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.12	Rehabilitasi Tersisa Kesamadal	Jabar	BPSDA Wilayah X	Lokasi	1	0	0	0	0	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.13	Rehabilitasi Tersisa Jatluh Amelang	Jateng	BPSDA Wilayah X	Lokasi	0	0	1	0	0	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.14	Rehabilitasi Tersisa Jasuripanjang	Jabar	BPSDA Wilayah X	Lokasi	0	1	0	0	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.15	Rehabilitasi Tersisa Jangan	Aceh	BPSDA Wilayah I	Lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.16	Rehabilitasi Tersisa Matyo	Sumut	BPSDA Wilayah IV	Lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.17	Rehabilitasi Tersisa Batu Bitak	Sumber	BPSDA Wilayah IV	Lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.18	Rehabilitasi Tersisa Mandiro	Bulung	BPSDA Wilayah XX	Lokasi	0	0	1	0	0	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.19	Rehabilitasi Tersisa Bulu Sari	Jateng	BPSDA Wilayah X	Lokasi	0	0	1	0	0	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.20	Rehabilitasi Tersisa D. Sakarno	Jateng	BPSDA Wilayah X	Lokasi	0	0	1	0	0	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.21	Rehabilitasi Tersisa Tegal	Jateng	BPSDA Wilayah X	Lokasi	0	0	1	0	0	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.22	Rehabilitasi Tersisa Purwodo	Jateng	BPSDA Wilayah X	Lokasi	0	1	0	0	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.23	Rehabilitasi Tersisa Bocoran	Jateng	BPSDA Wilayah X	Lokasi	0	0	1	0	0	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.24	Rehabilitasi Tersisa Jatluh Jatujoe	Sulsel	BPSDA Wilayah XX	Lokasi	0	1	0	0	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.25	Rehabilitasi Tersisa Glonggo	Jateng	BPSDA Wilayah X	Lokasi	1	0	0	0	0	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.26	Rehabilitasi Tersisa Bocoran	Jateng	BPSDA Wilayah X	Lokasi	1	0	0	0	0	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.27	Rehabilitasi Tersisa Rajabasa	Lampung	BPSDA Wilayah IV	Lokasi	0	1	0	0	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.28	Rehabilitasi Tersisa Bto Ai	Jatim	BPSDA Wilayah XI	Lokasi	0	0	1	0	0	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.29	Rehabilitasi Tersisa Matyo	Sumut	BPSDA Wilayah IV	Lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.30	Rehabilitasi Tersisa Aceh	Aceh	BPSDA Wilayah I	Lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.31	Rehabilitasi Tersisa Jat	Sumber	BPSDA Wilayah IV	Lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.32	Rehabilitasi Tersisa Ratugaten	Banten	BPSDA Wilayah VII	Lokasi	0	0	1	0	0	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
4.33	Rehabilitasi Tersisa Nalakuwaja	DIY	BPSDA Wilayah X	Lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB

PN: Prioritas Nasional; PB: Prioritas Bidang; KL: Prioritas K/L; IM: Indikator Non Ops Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis; Ops: Indikator Belanja Operasional; Keb: Indikator Kebutuhan di Luar BBUMN

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Perhubungan 2020-2024

www.peraturan.go.id

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024																	PIC
					2020	2021	2022	2023	2024	KEBUTUHAN DANA (RP)						PAGU / ALLOC	SISA	PELN	TOTAL ADM	REALISASI						
										2020	2021	2022	2023	2024	RM												
5.50	Aktualisasi OPMAB (Sentosa/Kalbar)	Kalbar	BPTD Wilayah XIV	Unit	1 - -	1 - -	1 - -	0 - -	0 - -	15,00	12,50	17,50	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.51	Aktualisasi OPMAB (Nusa Bunan Timur/NTT)	NTT	BPTD Wilayah XIV	Unit	0 - -	1 - -	0 - -	0 - -	0 - -	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.52	Aktualisasi OPMAB (Ketapang/Kalbar)	Kalbar	BPTD Wilayah XIV	Unit	1 - -	1 - -	1 - -	0 - -	0 - -	15,00	12,50	17,50	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.53	Pembangunan OPMAB Dalfas 3	Kalbar	BPTD Wilayah XVII	Unit	0 - -	0 - -	1 - -	1 - -	1 - -	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Baru
5.54	Pembangunan OPMAB Dalfas 2	Kalbar	BPTD Wilayah XVII	Unit	0 - -	0 - -	1 - -	1 - -	1 - -	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Baru
5.55	Pembangunan OPMAB Kalfas 2	Kalbar	BPTD Wilayah XIV	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	1 - -	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Baru
5.56	Aktualisasi OPMAB (Sambang/Kalbar)	Kalbar	BPTD Wilayah X	Unit	1 - -	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.57	Aktualisasi OPMAB (Belimbing/Kalbar)	Kalbar	BPTD Wilayah XIX	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	0 - -	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.58	Pembangunan OPMAB Dalfas 1	Kalbar	BPTD Wilayah XVII	Unit	0 - -	0 - -	1 - -	1 - -	1 - -	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.59	Aktualisasi OPMAB (Sintang/Kalbar)	Kalbar	BPTD Wilayah XIV	Unit	0 - -	1 - -	1 - -	1 - -	0 - -	0,00	12,50	17,50	12,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.60	Pembangunan OPMAB Pulau	Kaltim	BPTD Wilayah XIV	Unit	1 - -	1 - -	1 - -	0 - -	0 - -	40,00	50,00	50,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.61	Aktualisasi OPMAB (Maros Jaminu/Papua)	Papua	BPTD Wilayah IV	Unit	0 - -	1 - -	1 - -	1 - -	1 - -	0,00	12,50	17,50	12,50	12,50	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.62	Aktualisasi OPMAB (Sampar/Aceh)	Aceh	BPTD Wilayah XIX	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.63	Aktualisasi OPMAB (Sambi/Opu/Aceh)	Aceh	BPTD Wilayah XIX	Unit	0 - -	1 - -	0 - -	0 - -	0 - -	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.64	Aktualisasi OPMAB (Sanjung/Jateng)	Jateng	BPTD Wilayah X	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.65	Aktualisasi OPMAB (Sadmoto/Aceh)	Aceh	BPTD Wilayah XIX	Unit	1 - -	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	15,00	0,00	0,00	0,00	12,50	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.66	Aktualisasi OPMAB (Pilanggi/Aceh)	Aceh	BPTD Wilayah XIX	Unit	0 - -	1 - -	0 - -	0 - -	0 - -	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.67	Aktualisasi OPMAB (Sewaktu/Aceh/Sumut)	Aceh	BPTD Wilayah XI	Unit	0 - -	0 - -	1 - -	1 - -	0 - -	0,00	0,00	17,50	12,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.68	Aktualisasi OPMAB (Sukamara/Jatim)	Jatim	BPTD Wilayah XI	Unit	0 - -	0 - -	1 - -	0 - -	0 - -	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.69	Aktualisasi OPMAB (Sawahan/Jatim)	Jatim	BPTD Wilayah XI	Unit	0 - -	0 - -	1 - -	0 - -	0 - -	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.70	Aktualisasi OPMAB (Mojokerto/Jatim)	Jatim	BPTD Wilayah XI	Unit	0 - -	0 - -	1 - -	0 - -	0 - -	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.71	Aktualisasi OPMAB (Kusuma/Jatim)	Jatim	BPTD Wilayah XI	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.72	Pembangunan OPMAB Dumai 1	Dumai	BPTD Wilayah IV	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.73	Aktualisasi OPMAB (Pematang/Dalat)	Dalat	BPTD Wilayah XIV	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.74	Aktualisasi OPMAB (Kelay/Kalbar)	Kalbar	BPTD Wilayah XV	Unit	0 - -	1 - -	0 - -	0 - -	0 - -	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.75	Pembangunan OPMAB Aspri 1	Aspri	BPTD Wilayah IX	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	1 - -	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.76	Aktualisasi OPMAB (Jilimanang/Jateng)	Jateng	BPTD Wilayah X	Unit	0 - -	0 - -	1 - -	0 - -	0 - -	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.77	Pembangunan OPMAB Bahal 2	Dalat	BPTD Wilayah XI	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	1 - -	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Baru
5.78	Aktualisasi OPMAB (Sungai Penuh/Jambi)	Jambi	BPTD Wilayah V	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	0 - -	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.79	Aktualisasi OPMAB (Kringin/Pasir/Sumbar)	Sumbar	BPTD Wilayah II	Unit	0 - -	1 - -	0 - -	0 - -	0 - -	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.80	Pembangunan OPMAB Batu 2	Papua	BPTD Wilayah IV	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Baru
5.81	Aktualisasi OPMAB (Bengawan/Jateng)	Jateng	BPTD Wilayah XI	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	0 - -	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.82	Aktualisasi OPMAB (Morotai/Ternate/Ternate)	Ternate	BPTD Wilayah XIII	Unit	1 - -	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.83	Pembangunan OPMAB Dumai (Cilacap/Jateng)	Jawa tengah	BPTD Wilayah VII	Unit	1 - -	1 - -	1 - - 200	0 - - 80	0 - -	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00			PB
5.84	Aktualisasi OPMAB (Bengkulu/Jateng)	Jawa tengah	BPTD Wilayah X	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	0 - -	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.85	Aktualisasi OPMAB (Lubuk Dalam/Jambi)	Sumbar	BPTD Wilayah II	Unit	0 - -	1 - -	1 - -	1 - -	0 - -	0,00	12,50	17,50	12,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.86	Aktualisasi OPMAB (Ngale/Jateng)	Jatim	BPTD Wilayah XI	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.87	Aktualisasi OPMAB (Mojosongo/Jateng)	Jatim	BPTD Wilayah XI	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.88	Pembangunan OPMAB Jembatabatah 3	Riau	BPTD Wilayah VI	Unit	0 - -	0 - -	0 - -	1 - -	1 - -	0,00	0,00	0,00	225,00	50,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB
5.89	Aktualisasi OPMAB (Saso/Maluku)	Maluku	BPTD Wilayah XIII	Unit	0 - -	1 - -	0 - -	0 - -	0 - -	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			PB

PN: Prioritas Nasional; PB: Prioritas Bidang; K/L: Prioritas K/L; IM: Indikasi Non-Ops Kegiatan Dukungan Manajemen / Perangkat Teknis; Ops: Indikasi Belanja Operasional; Keb: Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN

www.peraturan.go.id

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024																		PIC
										KEBUTUHAN DANA (RP)						PHOK / BLU	SDMB	PNBLN	TOTAL ANGG	REALISASI						
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH					2020	2021	2022	2023	2024		
5.16	Rehabilitasi OPWS Mamis Sentosa (Jawa)	Jawa	BPTD Wilayah V	Satuan	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.17	Pembangunan OPWS Kalim 1	Kalim	BPTD Wilayah XVII	Satuan	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.18	Rehabilitasi OPWS Ayamrubu (Sulteng)	Sulteng	BPTD Wilayah XX	Satuan	0	1	1	1	0	0,00	12,50	17,50	12,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.19	Rehabilitasi OPWS Salwah (Jateng)	Jateng	BPTD Wilayah X	Satuan	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.20	Pembangunan OPWS Talaitiang	Sulut	BPTD Wilayah XV	Satuan	1	1	1	1	0	40,00	30,00	30,00	30,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.21	Rehabilitasi OPWS Aceitrus (BY)	BY	BPTD Wilayah X	Satuan	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.22	Pembangunan OPWS Pulau 1	Aceh	BPTD Wilayah IV	Satuan	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.23	Rehabilitasi OPWS Mesuta (NTT)	NTT	BPTD Wilayah XIV	Satuan	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.24	Pembangunan OPWS Dumai 2	Sumut	BPTD Wilayah VI	Satuan	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Rab
5.25	Rehabilitasi OPWS Aceitrus (DY)	DY	BPTD Wilayah X	Satuan	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.26	Rehabilitasi OPWS Mudungi (Sulteng)	Sulteng	BPTD Wilayah XX	Satuan	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.27	Rehabilitasi OPWS Mayoa (Sulteng)	Sulteng	BPTD Wilayah XX	Satuan	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.28	Pembangunan OPWS Mokai	Maluku Utara	BPTD Wilayah XXIV	Satuan	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.29	Pembangunan OPWS Sungai Bengalung	Sulteng	BPTD Wilayah XIV	Satuan	0	1	1	1	0	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.30	Pembangunan OPWS Jelutubuhuk 4	Jabar	BPTD Wilayah IX	Satuan	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	225,00	50,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Rab
5.31	Rehabilitasi OPWS Batu Bara (Sulsel)	Sulsel	BPTD Wilayah XIX	Satuan	0	1	0	0	0	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.32	Pembangunan OPWS Aceh 2	Aceh	BPTD Wilayah I	Satuan	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Rab
5.33	Rehabilitasi OPWS Batu Raja (Riau)	Riau	BPTD Wilayah V	Satuan	0	1	1	1	1	0,00	12,50	17,50	12,50	12,50	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.34	Rehabilitasi OPWS Bojo (Sulsel)	Sulsel	BPTD Wilayah XIX	Satuan	0	1	0	0	0	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.35	Pembangunan OPWS Kim Mohandajo	Kaltim	BPTD Wilayah XVI	Satuan	1	1	1	0	0	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.36	Rehabilitasi OPWS Aujh (Sengari) (Sulteng)	Sulteng	BPTD Wilayah XIV	Satuan	1	0	0	0	0	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.37	Rehabilitasi OPWS Mowanja (Jateng)	Jateng	BPTD Wilayah X	Satuan	0	0	1	1	0	0,00	0,00	17,50	12,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.38	Pembangunan OPWS Jelutubuhuk 1	Jabar	BPTD Wilayah IX	Satuan	0	0	1	1	1	0,00	0,00	212,50	300,00	50,00	562,50	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
TOTAL	***Jumlah Anggaran/Insentif Pengelola Irrigasi, BAKB dan Biaya Koordinasi Jaringan Nasional***			***Paket***	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**[illegible]**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
5.39	Pembangunan/Implementasi sistem/Instrumen/Pengelola/Pengelola irigasi di Jawa Tengah	Jateng	BPTD Wilayah X	Satuan	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.40	Pembangunan/Implementasi sistem/Instrumen/Pengelola/Pengelola irigasi di Sulawesi Tenggara	Sultra	BPTD Wilayah XVII	Satuan	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.41	Pembangunan/Implementasi sistem/Instrumen/Pengelola/Pengelola irigasi di Sulawesi Barat	Sulbar	BPTD Wilayah XV	Satuan	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.42	Pembangunan/Implementasi sistem/Instrumen/Pengelola/Pengelola irigasi di Kalimantan Timur	Kaltim	BPTD Wilayah XVI	Satuan	1	1	0	0	0	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.43	Pembangunan/Implementasi sistem/Instrumen/Pengelola/Pengelola irigasi di Kalimantan Tengah	Kalteng	BPTD Wilayah XVI	Satuan	0	1	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.44	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi (BOR)	DKI Jakarta	BP Jaringan Pengairan Jakarta	Satuan	7	25	25	25	25	97,50	250,00	250,00	250,00	250,00	1.097,50	0,00	0,00	0,00	1.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.45	Pembangunan/Implementasi sistem/Instrumen/Pengelola/Pengelola irigasi di Sumatera Utara	Sumut	BPTD Wilayah II	Satuan	0	0	1	0	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.46	Pembangunan/Implementasi sistem/Instrumen/Pengelola/Pengelola irigasi di Gorontalo	Gorontalo	BPTD Wilayah XIV	Satuan	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.47	Pembangunan/Implementasi sistem/Instrumen/Pengelola/Pengelola irigasi di Nusa Tenggara Timur	Kaltara	BPTD Wilayah XVII	Satuan	0	1	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.48	Pembangunan/Implementasi sistem/Instrumen/Pengelola/Pengelola irigasi di Sumatera Barat	Sumut	BPTD Wilayah II	Satuan	1	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.49	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Kewenangan Provinsi di Jawa Barat	Jabar	BPTD Wilayah IX	Satuan	0	0	1	0	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.50	Rehabilitasi OPWS Rawa Pening (Jateng)	Jateng	BPTD Wilayah X	Satuan	1	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB
5.51	Pembangunan/Implementasi sistem/Instrumen/Pengelola/Pengelola irigasi di Sumatera Barat	Sumbar	BPTD Wilayah II	Satuan	0	0	1	0	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PB

PN: Prioritas Nasional, PB: Prioritas Bidang, K/L: Prioritas K/L, IM: Indikasi Non Opsi Kegiatan Dukungan Manajemen / Perangkat Teknis, Opsi: Indikasi Belanja Operasional, Keb: Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Perhubungan 2020-2024

Lampiran I ... 84

www.peraturan.go.id

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024										RO RAMPI 2020-2024					PIC
					2020	2021	2022	2023	2024	BERSAH BERSIH DIRI						PNBP / BLU	SBSN	PHLN	TOTAL ABM	RPJMN	RENSTRA	APBN	RWPTA	RKN ABM	
										2020	2021	2022	2023	2024	R.M.										
0.53	Pengadaan Sarana Bantu Nelayan/Pengadaan Kendaraan Roda	Kulon	BPPD Wilayah XVII	Unit	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.54	Pembangunan/Rehab Dermaga di Jawa Tengah	Jateng	BPPD Wilayah X	Unit	0	1	0	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
0.55	Pembangunan/Rehab/Pemasangan/Instalasi/Revitalisasi BPPd Kalimantan Timur	Kaltim	BPPD Wilayah XIV	Unit	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.56	Pengadaan Bantu Sungai Danau di Bengkulu	Bengkulu	BPPD Wilayah VI	Unit	0	1	0	0	0	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.57	Pengadaan Sarana Bantu Nelayan Pengapu di Sulawesi Utara	Sulut	BPPD Wilayah XIII	Unit	0	0	1	1	1	0,00	0,00	0,75	1,00	1,50	3,75	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.58	Pembangunan/Rehab/Pemasangan/Instalasi/Revitalisasi BPPd Sumatera Barat	Sumbar	BPPD Wilayah II	Unit	1	1	0	0	0	15,00	10,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.59	Pengadaan Sarana Bantu Nelayan Pengapu di Maluku	Maluku	BPPD Wilayah XIII	Unit	0	0	1	1	1	0,00	0,00	0,75	1,00	1,50	3,75	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.60	Pembangunan/Rehab/Pemasangan/Instalasi/Revitalisasi BPPd Papua	Papua	BPPD Wilayah XXV	Unit	0	0	1	0	0	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.61	Pengadaan Bantu Sungai Danau di Kalimantan Utara	Kaltara	BPPD Wilayah XVII	Unit	0	0	1	1	0	0,00	0,00	13,40	6,65	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.62	Pembangunan/Rehab Dermaga di Sulawesi Barat	Sulbar	BPPD Wilayah XIX	Unit	0	1	0	0	1	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
0.63	Pengadaan Bantu Sungai Danau di Kalimantan Selatan	Kalsel	BPPD Wilayah XV	Unit	1	1	1	0	0	6,40	7,50	13,40	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.64	Pembangunan/Rehab di Banten	Banten	BPPD Wilayah VII	Unit	0	0	1	1	0	0,00	0,00	16,75	10,75	21,25	48,75	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
0.65	Pengadaan Bantu Sungai Danau di Sumatera Selatan	Sumsel	BPPD Wilayah III	Unit	1	1	0	1	0	6,40	7,50	0,00	6,65	0,00	20,55	0,00	0,00	0,00	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.66	Pembangunan/Rehab di Kalimantan Timur	Kaltim	BPPD Wilayah XIV	Unit	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
0.67	Pembangunan/Rehab/Pemasangan/Instalasi/Revitalisasi BPPd Jangkar Jangkar	Babel	BPPD Wilayah VIII	Unit	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bab
0.68	Pembangunan/Rehab di Kalimantan Barat	Kalbar	BPPD Wilayah XIV	Unit	0	1	0	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
0.69	Pengadaan Sarana Bantu Nelayan Pengapu di Sulawesi Tengah	Sulteng	BPPD Wilayah XX	Unit	0	1	0	1	0	0,00	7,50	0,00	10,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.70	Pembangunan/Rehab di Kalimantan Barat	Kalbar	BPPD Wilayah XIV	Unit	0	0	1	0	0	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
0.71	Pengadaan Sarana Bantu Nelayan Pengapu di Lampung	Lampung	BPPD Wilayah VI	Unit	0	1	0	0	0	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.72	Pembangunan/Rehab di Jawa Barat	Jabar	BPPD Wilayah IX	Unit	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	16,75	21,25	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
0.73	Pengadaan Sarana Bantu Nelayan Pengapu di Bali	Bali	BPPD Wilayah IV	Unit	0	0	1	0	0	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.74	Pengadaan Bantu Sungai Danau di Sulawesi Tengah	Sulteng	BPPD Wilayah XX	Unit	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.75	Pengadaan Bantu Sungai Danau di Lampung	Lampung	BPPD Wilayah VI	Unit	0	1	0	0	0	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.76	Pengadaan Sarana Bantu Nelayan Pengapu di Sulawesi Tenggara	Sultra	BPPD Wilayah XXII	Unit	1	1	0	1	1	16,75	7,50	0,00	10,00	1,50	35,75	0,00	0,00	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.77	Pengadaan Bantu Sungai Danau di Riau	Riau	BPPD Wilayah V	Unit	1	1	0	1	0	6,40	7,50	0,00	6,65	0,00	20,55	0,00	0,00	0,00	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.78	Pengadaan Sarana Bantu Nelayan Pengapu di Bangka Belitung	Babel	BPPD Wilayah VII	Unit	0	1	0	0	0	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.79	Pembangunan/Rehab Dermaga di Sulawesi Selatan	Sulsel	BPPD Wilayah XX	Unit	0	1	0	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
0.80	Pembangunan/Rehab di Kalimantan Tengah	Kalteng	BPPD Wilayah XIV	Unit	0	1	0	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
0.81	Pengadaan Bantu Sungai Danau di Kalimantan Barat	Kalbar	BPPD Wilayah XIV	Unit	0	1	0	0	1	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.82	Pengadaan Alsus/Peralatan	DKI Jakarta	Ditjen Perikanan Tangkap	Unit	1	2	2	1	1	200,00	700,00	700,00	550,00	250,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.83	Pengadaan Sarana Bantu Nelayan Pengapu di Gorontalo	Gorontalo	BPPD Wilayah XIII	Unit	0	1	0	0	0	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.84	Pembinaan/Bantuan Teknis Perikanan Pengapu BPP	DKI Jakarta	Ditjen Perikanan Tangkap	Unit	25	25	25	25	25	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
0.85	Pengadaan Bantu Sungai Danau di Kalimantan Tengah	Kalteng	BPPD Wilayah XIV	Unit	1	1	1	1	0	6,40	7,50	13,40	6,65	0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.86	Pengadaan Bantu Sungai Danau di Aceh	Aceh	BPPD Wilayah I	Unit	1	1	0	0	1	6,40	7,50	0,00	6,65	7,50	28,05	0,00	0,00	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.87	Pembangunan/Rehab di Kalimantan Timur	Kaltim	BPPD Wilayah XIV	Unit	0	1	0	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
0.88	Pembangunan/Rehab di Sulawesi Tengah	Sulteng	BPPD Wilayah XX	Unit	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	21,25	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
0.89	Pembangunan/Rehab di Kalimantan Timur	Kaltim	BPPD Wilayah XIV	Unit	0	0	1	0	0	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
0.90	Pengadaan Bantu Sungai Danau di Sumatera Barat	Sumbar	BPPD Wilayah II	Unit	0	0	1	0	0	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.91	Pengadaan Bantu Sungai Danau di Aceh	Aceh	BPPD Wilayah I	Unit	0	0	1	0	0	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
0.92	Pengadaan Bantu Sungai Danau di Papua	Papua	BPPD Wilayah XXV	Unit	0	1	0	0	0	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB

PN: Prioritas Nasional, PB: Prioritas Bidang, KL: Prioritas K/L, IM: Indikasi Non Ops Kegiatan Dukungan Manajemen / Perangkat Teknis, Ops: Indikasi Belanja Operasional, Keb: Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Perhubungan 2020-2024

Lampiran I ... 86

www.peraturan.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024										RO RAMPS 2020-2024					PIC
					2020	2021	2022	2023	2024	BUKAN BUKAN DIPA					PNBP / BLU	SBSN	PHLN	TOTAL ABM	RPMU	RPMN	APBD	SWASTA	NON ABM	
										2020	2021	2022	2023	2024											
0.00	Pembangunan/Rehab Dermaga di Jawa	Jawa	BPTD Wilayah V	Unit	0	1	0	1	1	96,00	250,0	0,00	167,5	0,00	1.750,0	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
0.00	Pengadaan/Sarana/Rambu/Rambu/Pengadaan/Pos di Sangatta Timur	NTT	BPTD Wilayah XIV	Unit	1	1	0	1	0	14,75	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.00	Pembangunan/Rehab Dermaga di Sumatera Barat	Sumat	BPTD Wilayah VI	Unit	0	1	0	0	1	0,00	250,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
0.00	Pengadaan/Rambu/Rambu/Rambu di Jawa Timur	Jatim	BPTD Wilayah XI	Unit	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.00	Pengadaan/Rambu/Rambu/Rambu di Kalimantan Timur	Kaltim	BPTD Wilayah XVII	Unit	0	0	1	1	0	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.00	Pembangunan/Sarana/Pemasangan/Lalu lintas/Rambu/Pos/Sangatta	Sumat	BPTD Wilayah VI	Unit	0	1	0	0	0	0,00	250,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.00	Pengadaan/Rambu/Rambu/Rambu di Jawa Barat	Jabar	BPTD Wilayah IX	Unit	0	0	1	0	0	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.00	Pengadaan/Sarana/Rambu/Rambu/Pengadaan di Jawa Timur	Jatim	BPTD Wilayah XI	Unit	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.00	Pengadaan/Sarana/Rambu/Rambu/Pengadaan di Maluku Utara	Maluku Utara	BPTD Wilayah XIII	Unit	1	0	0	0	1	14,75	0,00	0,00	0,00	1.500	28,75	0,00	0,00	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.00	Pengadaan/Sarana/Rambu/Rambu/Pengadaan di Sumatera Utara	Sumat	BPTD Wilayah II	Unit	0	1	0	0	0	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.00	**Jumlah/Jenis/Jenis/Rambu/Pengadaan/Lalu lintas/Pengadaan/Jaga/Patrol multiguna**			**Unit**	**3**	**10**	**3,3**	**4,0**	**4,0**	**114,75**	**857,4**	**94,40**	**100,16**	**341,50**	**2.30,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.175,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0.00	Pembangunan/Kapal Patrol Multipurpose di Wakah Cirebon	Jabar	BPTD Wilayah IX	Unit	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	15,75	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auto
0.00	Pembangunan/Kapal Patrol Multipurpose di Kaimana	Papua	BPTD Wilayah XVI	Unit	1	0	0	0	0	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.00	Pembangunan/Kapal Patrol Multipurpose di Wakah Wakah Lirung	Jateng	BPTD Wilayah X	Unit	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auto
0.00	Pembangunan/Kapal Patrol Multipurpose di Wakah Kalabahi	NTT	BPTD Wilayah XIV	Unit	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.00	Pembangunan/Kapal Patrol Multipurpose di Wakah Gajah Mungkur	Jateng	BPTD Wilayah X	Unit	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auto
0.00	Pembangunan/Kapal Patrol Multipurpose di Sungai Kampar	Riau	BPTD Wilayah XII	Unit	0	0	1	0	0	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.00	Pembangunan/Kapal Patrol Multipurpose di Sarana Tulis	Sumat	BPTD Wilayah II	Unit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.00	Pembangunan/Kapal Patrol Multipurpose di Sungai Sungai Bakar	Bali	BPTD Wilayah XI	Unit	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.00	Pembangunan/Kapal Patrol Multipurpose di Bunting	Maluku Utara	BPTD Wilayah XIII	Unit	1	0	0	0	0	45,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.00	Pembangunan/Kapal Patrol Multipurpose di Wakah Wakah Pekalongan	Jateng	BPTD Wilayah X	Unit	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.00	Pembangunan/Kapal Patrol Multipurpose di Aceut	Papua	BPTD Wilayah XVI	Unit	0	0	1	0	0	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.00	Pembangunan/Kapal Patrol Multipurpose di Wakah Bekok	NTT	BPTD Wilayah XIV	Unit	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,750	0,750	0,00	0,00	0,00	0,750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auto
0.00	Pembangunan/Kapal Patrol Multipurpose di Sungai Musi	Sumat	BPTD Wilayah VI	Unit	1	0	0	0	0	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.00	Pembangunan/Kapal Patrol Multipurpose di Sungai Bengkulu	Jateng	BPTD Wilayah X	Unit	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.00	Pembangunan/Kapal Patrol Multipurpose di Sungai Kuinci	Bulaeng	BPTD Wilayah XIV	Unit	0	0	1	0	0	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
04	**Dipa Pelabuhan Laut**									**3.04,80**	**16.400,0**	**18.010,10**	**16.750,10**	**13.0.16,10**	**66.910,10**	**0,70,20**	**1.710,10**	**3.0.0,70**	**77.40,0**	**0,00,20**	**12.0.0,70,0**	**0,00**	**0,00**	**1.00.40,10**	
04	**Program Infrastruktur Konektivitas**									**3.04,80**	**16.400,0**	**18.010,10**	**16.750,10**	**13.0.16,10**	**66.910,10**	**0,70,20**	**1.710,10**	**3.0.0,70**	**77.40,0**	**0,00,20**	**12.0.0,70,0**	**0,00**	**0,00**	**1.00.40,10**	
07	**GA.01 - Terwujudnya Konektivitas Transportasi Laut**				**2.007,79**	**7.134,26**	**6.505,91**	**6.727,60**	**6.305,32**	**30.130,91**	**304,02**	**1.710,72**	**5.004,71**	**36.130,35**					**4.004,30**	**135.075,0**	**0,00**	**0,00**	**1.04.41,3**	
IKP	**Rasio Konektivitas Transportasi Laut**			**ratio**	**0,86**	**0,89**	**0,89**	**0,9**	**0,91**	**2.007,79**	**7.134,26**	**6.505,91**	**6.727,60**	**6.305,32**	**30.130,91**	**304,02**	**1.710,72**	**5.004,71**	**36.130,35**	**4.004,30**	**135.075,0**	**0,00**	**0,00**	**1.04.41,3**	
004	**Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut**									**2.007,79**	**7.134,26**	**6.505,91**	**6.727,60**	**6.305,32**	**30.130,91**	**304,02**	**1.710,72**	**5.004,71**	**36.130,35**	**4.004,30**	**135.075,0**	**0,00**	**0,00**	**1.04.41,3**	
RO	**Meningkatnya Kinerja Dermaga Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut**				**2.007,79**	**7.134,26**	**6.505,91**	**6.727,60**	**6.305,32**	**30.130,91**	**304,02**	**1.710,72**	**5.004,71**	**36.130,35**					**4.004,30**	**135.075,0**	**0,00**	**0,00**	**1.04.41,3**	
IKK	**Presentase Pencapaian Target Rencana Pembangunan Fasilitas Pelabuhan**			**%**	**0**	**26,21**	**50,97**	**75,30**	**100**	**2.007,79**	**7.130,11**	**6.04,177**	**6.504,51**	**5.750,41**	**28.985,03**	**304,02**	**1.710,72**	**5.004,71**	**35.985,04**	**4.004,30**	**133.075,0**	**0,00**	**0,00**	**1.03.41,3**	
7.10	Pengadaan/Rambu/Rambu/Pelabuhan/Pelaya	Kab Lamongan, Bekasi	OPP/Pelaya		0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	237,24	237,24	0,00	0,00	0,00	237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
7.10	Pengadaan/Rambu/Rambu/Pelabuhan/Jaga (RP-MP)	Kab Jeneponto, Bekasi	OPP/Jaga	Unit	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
7.20	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan/Penyebrangan	Kab Bengkulu, Jatim	KSOP/Penyebrangan		1	0	0	0	0	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
7.21	Pembangunan/Baru/Pelabuhan/Penyebrangan	Kab Jeneponto, Bekasi	OPP Jeneponto	Unit	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
7.22	Pengadaan/Rambu/Rambu/Jaga	Kab Kepulauan Riau, Papua	OPP Jaga	Unit	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
7.23	Pengadaan/Rambu/Rambu/Pelabuhan (Jaga) (RP-MP)	Kab Kepulauan Mentawai, Sumber	OPP Muara Sikeka	Unit	1	1	1	1	0	0,00	11,14	0,00	0,10	0,00	29,50	1,250	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN

PN: Prioritas Nasional, PB: Prioritas Bidang, KL: Prioritas K/L, IM: Indikator Non Opa Kegiatan Dukungan Manajemen / Perangkat Teknis, Opa: Indikator Belanja Operasional, Kab: Indikator Kabupaten di Luar RPJMN

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Perhubungan 2020-2024

Lampiran I - - 87

www.peraturan.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024																		PRIO
					2020	2021	2022	2023	2024	KEBUTUHAN DANA (RM)						PHMP / BLU	SBSN	PNBP	TOTAL APBN	RPNU	RPNN	APBD	SWASTA	NON APBN		
										2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH													
7.26	Intervensi Pengembangan Pelabuhan Sabang	Kab. Sanggau, Kalbar	UPP Sanggau	Satuan	0 -	0 -	0 -	1 unit	0 -	0,00	0,00	0,00	1,50(m)	0,00	1,50(m)	0,00	0,00	0,00	1,50 (M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.8	
7.27	Intervensi Pengembangan Pelabuhan Sabangan	Kab. Mamuju, Sulbar	UPP Mamuju	Satuan	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 (M)	0,00	1,00 (M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.8	
7.28	Pengembangan/Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Pos Jaga Sebu	Kab. Sagang, NTT	KSOP Kupang	Satuan	0	0	1	0	0	0,00	0,00	30,75	0,00	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.8	
7.29	Pembangunan/Baru/Pelabuhan/Bunga (RP-BPN)	Kab. Bulungan, Kaltara	UPP Pulau Bunga	Satuan	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	45(m)	45(m)	90 (M)	0,00	0,00	0,00	90 (M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.5	
7.30	Pengembangan/Fasilitas Pelabuhan Jaga Dalam	Kab. Jayapura, Papua	UPP Biak	Satuan	1	0	0	0	0	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15	0,00	0,00	0,00	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.8	
7.31	Pengembangan/Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Pelabuhan Sumenep (RP-BPN)	Kota Ternate, Kaltim	KSOP Sumenep	Satuan	0	0	1	1	1	0,00	0,00	25,00	30(m)	30(m)	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.5	
7.32	Rehabilitasi dan/Replacement Fasilitas Pelabuhan Jasuda	Kab. Buton, Sultra	UPP Bau - Bau		0	1	0	0	0	0,00	14(P)	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.8	
7.33	Pembangunan/Baru/Pelabuhan/Tidak Jauh	Kab. Buton, Sulsel	KSOP Bajeng	Satuan	0	0	1	0	0	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125(m)	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.8	
7.34	Pengembangan/Fasilitas Pelabuhan Bangsal (RP/AP)	Kab. Bangsal Jaya, Bali ang	UPP Bangsal	Satuan	0	0	1	1	1	0,00	0,00	30,00	30(m)	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.5	
7.35	Intervensi Pengembangan Pelabuhan Sumenep	Kab. Jeneponto, Bali ol	UPP Jeneponto	Satuan	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.8	
7.36	Pembangunan/Fasilitas Jaga Pemuat (RP)	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Dit. Kepelabuhanan	Satuan	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL	
7.37	Rehabilitasi dan/Replacement Fasilitas Pelabuhan Sorong (RP-BPN)	Kab. Jayapura, Papua	UPP Sorong	Satuan	0	0	1	0	0	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.5	
7.38	Pembangunan/Baru/Pelabuhan/Sabakan	Kab. Sanggau, Kalbar	UPP Sanggau	Satuan	0 -	0 -	1 (sebagai	0 -	0 -	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.8	
7.39	Pengembangan/Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kaulo Sembiyo	Kab. Kaur, Bengkulu, Bengkulu	UPP Kaulo Sembiyo	Satuan	0	0	1	1	0	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.8	
7.40	Pengembangan/Fasilitas Pelabuhan Tual (RP/AP)	Kab. Maluku Tenggara, Maluku	UPP Tual	Satuan	0	0	1	1	1	0,00	0,00	15,00	15(m)	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.5	
7.41	Rehabilitasi dan/Replacement Fasilitas Pelabuhan Nusa Penida	Di b. Klungkung, Bali	UPP Nusa Penida		0	1	0	0	0	0,00	107,50	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.8	
7.42	Rehabilitasi dan/Replacement Fasilitas Pelabuhan Wawo (RPJMN) (Major Project - BPJN)	Kab. Bokeratik, Sulbar	Kantor UPP Wawo	Satuan	1	0	0	0	0	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.5	
7.43	Rehabilitasi dan/Replacement Fasilitas Pelabuhan Mayo	Kota Tolore Kepulauan, Maluku Utara	UPP Jailolo		0	1	0	0	0	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.8	
7.44	Pembangunan/Baru/Pelabuhan/Saiwi	Kab. Maluku Tenggara, Maluku	UPP Tual	Satuan	0	0	1	0	0	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.8	
7.45	Intervensi Pengembangan Pelabuhan Jayapura (RPJMN)	Kab. Jayapura, Papua	KSOP Jayapura	Satuan	1 (sebagai	0 (sebagai	0 sebagai	0 -	0 -	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.5	
7.46	Pembangunan/Baru/Pelabuhan/Gesa Jaksen	Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara	Kantor UPP Bulang	Satuan	0	0	1	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.8	
7.47	Intervensi Pengembangan Pelabuhan Sanggiang	Kab. Sanggau, Kalbar	UPP Sanggau	Satuan	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	146,11	0,00	146,11	0,00	0,00	0,00	146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.8	
7.48	Pengembangan/Fasilitas Pelabuhan Kawal (RPJMN)	Kab. Belitung, Babel	KSOP Tanjung Pandan	Satuan	0	0	1	0	0	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.5	
7.49	Rehabilitasi dan/Replacement Fasilitas Pelabuhan Bontang	Kab. Kepulauan Sangihe, Sulut	UPP Sangihe		0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	66,52	0,00	66,52	0,00	0,00	0,00	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.8	
7.50	Rehabilitasi dan/Replacement Fasilitas Pelabuhan Ranjuhan	Kab. Pulau Nias, Aceh	UPP Sinabang		0	0	1	0	0	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.8	
7.51	Intervensi/Pengembangan/Rehabilitasi/Revitalisasi/Pelabuhan Bunga (PKN) (RP-BPN)	Kab. Belitung, Babel	KSOP Belinyu	Satuan	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,21	4.802,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.5	
7.52	Pembangunan Dermaga	Kab. Gorontalo, Gorontalo	UPP Anggrek	Satuan	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.8	
7.53	Pengembangan/Fasilitas Pelabuhan Tanjung	Kab. Kepulauan Meranti, Riau	UPP Selat	Bangunan	0	0	1	0	0	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.8	
7.54	Pengembangan Fasilitas Jaga Pemuat (Major Project - BPJN, BPJN, BPJN)	Kab. Bukalang, Aceh	Dit. Kepelabuhanan	Satuan	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	P.5	
7.55	Pembangunan/Baru/Pelabuhan/Sarua	Kab. Kotawaringin Barat, Papua Barat	KSOP Pulau Bait	Satuan	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25 (M)	0,00	1,25 (M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.8	
7.56	Pembangunan/Fasilitas Pelabuhan	Kab. Jepara, Jateng	UPP Jepara	Satuan	1	0	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.8	
7.57	Pengembangan/Fasilitas Pelabuhan Bonas (Major Project - BPJN)	Kab. Bantaeng, Bali	Dit. Kepelabuhanan	Satuan	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	P.5	
7.58	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan	Kab. Maluku Tengah, Maluku	Kantor UPP Amahai		1	1	0	0	0	12,38	2,20	0,00	0,00	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.8	
7.59	Pengembangan/Fasilitas Pelabuhan Wawo (RP-BPN) (Major Project - BPJN)	Kab. Bokeratik, Sulbar	Kantor UPP Wawo	Satuan	0	0	1	1	0	0,00	0,00	30,00	28,50	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.5	
7.60	Pengembangan/Fasilitas Pelabuhan Tanjung Batu Kendari (RP-BPN)	Kendari, Sulsel	KSOP Tanjung Batu Kendari	Satuan	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0(m)	1,50(m)	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.5	
7.61	Pengembangan/Fasilitas Pelabuhan Sebuhubar	Kab. Maluku Tengah, Maluku	Kantor UPP Buki	Bangunan	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	22,75	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.8	
7.62	Pembangunan/Baru/Pelabuhan/Barunga	Kab. Muna, Sultra	UPP Raha	Satuan	0	0	1	0	0	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P.8	

PN: Prioritas Nasional; PB: Prioritas Bidang; K/L: Prioritas K/L; IM: Indikasi Non Ops Kegiatan Dukungan Manajemen / Perangkat Teknis; Ops: Indikasi Belanja Operasional; Kab: Indikasi Kebutuhan di Luar BUMN

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Perhubungan 2020-2024

Lampiran I - - 88

www.peraturan.go.id

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024																		PRIO
					2020	2021	2022	2023	2024	KEBUTUHAN DANA (RP)						PHOP / DLU	DDDR	PHLN	TOTAL ABM	REFOCUSING							
										2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH													
0.35	Pengembangan/Realisasi Pelaksanaan Kadaster Ruang (PNBP)	Kab. Manggarai, NTT	CIP Ruu	Lokasi	1	0	0	0	0	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
0.36	Pengembangan/Realisasi Pelaksanaan Ruang	Kab. Kupang, NTT	CIP Sabu		0	1	0	0	0	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RL
0.37	Pembinaan/Baru/Pelaksanaan Sabangan	Kab. Morotai, Maluku	CIP Morotai	Lokasi	0	1	0	0	0	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.38	Pengembangan/Realisasi Pelaksanaan Jaringan (PNBP)	Kab. Timor Tengah Selatan, NTT	CIP Jaringan	Lokasi	0	0	1	1	1	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
0.39	Rehabilitasi/Pemeliharaan/Gedung Pemerintah	Kota Palangka Raya, Kalteng	KSOPTidak Bagus		0	1	0	0	0	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.40	Rehabilitasi/dan/Replacement/Realisasi Pelaksanaan Tanjung Batu	Kab. Belitung, Babel	KSOPTanjung Pendam		1	1	0	0	0	1.511	176,50	0,00	0,00	0,00	301,67	0,00	0,00	0,00	301,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RL
0.41	Pembinaan/Baru/Tanjung Ular (PNBP)	Kab. Bangka, Babel	KNIP Muntok	Lokasi	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
0.42	Rehabilitasi/dan/Replacement/Pos Lintas Pelabuhan Perum	Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara	Kantor CIP Weda		0	1	0	0	0	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.43	Pengembangan/Realisasi Pelaksanaan Gunung(PNBP)	Kab. Sumba Barat Daya, Maluku	CIP Gunung	Lokasi	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	10,00	12,80	22,80	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
0.44	Pembinaan/Pelatihan Pelabuhan	Kab. Fak-fak, Papua Barat	CIP Kaimana	Lokasi	0	1	0	0	0	0,00	10,73	0,00	0,00	0,00	10,73	0,00	0,00	0,00	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.45	Pengembangan/Realisasi Pelaksanaan Mesuji (PNBP)	Kab. Tulang Bawang, Lampung	CIP Mesuji	Lokasi	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
0.46	Pembinaan/Baru/Pelaksanaan Pulau Moa	Kab. Maya, Papua	CIP Ilwok	Lokasi	0	0	1	0	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.47	Rehabilitasi/Pemeliharaan/Pelabuhan	Kab. Kepulauan Aru, Maluku	CIP Dobo		1	0	0	0	0	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	4,50	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.48	Pembinaan/Baru/Pelabuhan/Bunggi	Kab. Bunggai Kepulauan, Sulteng	CIP Bunggai	Lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.49	Pengembangan/Realisasi Pelaksanaan Kolaka	Kab. Kolaka, Sulteng	CIP Kolaka	Lapangan	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.50	Rehabilitasi/dan/Replacement/Pos Lintas Pelabuhan Ketahuman	Kab. Pamekasan, Jatim	CIP Tanjung Perak		0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.51	Pembinaan/Baru/Pelabuhan/Samarinda	Kab. Morotai, Papua	CIP Ilwok	Lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.52	Rehabilitasi/dan/Replacement/Pos Lintas Pelabuhan Bengkulu(PNBP)	Kab. Bengkulu, Jakarta	CIP Kepulauan		1	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
0.53	Langkah/Pengembangan/Pelabuhan/Kota Maya	Kab. Maya, Papua	CIP Ilwok	Lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.54	Pembinaan/Baru/Pelabuhan/Kota Gayang	Kab. Kepulauan Aru, Maluku	CIP Dobo	Lokasi	0	0	1	0	0	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.55	Pengembangan/Realisasi Kota Bali (Major Project - KOL)	Kota Denpasar, Bali	KL Kepelabuhanan	Lokasi	0	1	1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	PN
0.56	Pembinaan/Pelatihan Pelabuhan	Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara	CIP Jailolo	Lokasi	1	0	0	0	0	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.57	Pengembangan/Realisasi Kaling (Major Project - KOL)	Kab. Merauke, Papua	KL Kepelabuhanan	Lokasi	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	PN
0.58	Pembinaan/Baru/Pelabuhan/Sampalakara	Kab. Buton Selatan, Sulteng	CIP Pilau - Bau	Lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.59	Rehabilitasi/Pemeliharaan/Pelabuhan	Kab. Maluku Tengah, Maluku	Kantor CIP Buru		1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.60	Langkah/Pengembangan/Pelabuhan/Saleh	Kab. Maluku Tenggara, Maluku	CIP Tual	Lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.61	Langkah/Pengembangan/Pelabuhan/Kota Gayang	Kab. Kepulauan Aru, Maluku	CIP Dobo	Lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.62	Langkah/Pengembangan/Pelabuhan/Bagan siapi api	Kab. Rokan Hilir, Riau	KSOPBagan Siapi Api	Lokasi	0	1	0	0	0	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.63	Pembinaan/Pelatihan Pelabuhan	Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara	CIP Labuha	Lokasi	1	0	0	0	0	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.64	Pembinaan/Baru/Pelabuhan/Lewa	Kab. Mamuju, NTT	CIP Ruu	Lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.65	Rehabilitasi/dan/Replacement/Pos Lintas Pelabuhan Sanggaluri	Kab. Pasir, Kaltim	Kantor CIP Tana Paser		0	1	1	0	0	0,00	177,50	100,00	0,00	0,00	277,50	0,00	0,00	0,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.66	Pengembangan/Realisasi Pelaksanaan Sawahlunto (PNBP)	Kab. Kepulauan Tanimbar, Maluku	CIP Sawahlunto	Lokasi	0	1	1	0	0	0,00	42,50	24,90	0,00	0,00	67,40	0,00	0,00	0,00	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
0.67	Langkah/Pengembangan/Pelabuhan Teluk Sasuch	Kab. Biak-Numfor, Papua	KNIP Sipang	Lokasi	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	40,50	130,00	170,50	0,00	0,00	0,00	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.68	Pengembangan/Realisasi Pelaksanaan Nunkolo	Kab. Kepulauan Aru, Maluku	CIP Nunkolo		0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	117,70	0,00	117,70	0,00	0,00	0,00	117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.69	Rehabilitasi/dan/Replacement/Pos Lintas Pelabuhan Waikelo	Kab. Sumba Timur, NTT	CIP Waikelo		0	0	1	0	0	0,00	0,00	40,75	0,00	0,00	40,75	0,00	0,00	0,00	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.70	Pengembangan/Realisasi Pelaksanaan Sipaing (PNBP)(Major Project - MPA)	Kab. Maybrat, Papua Barat	CIP Sipaing	Lokasi	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN

PN: Prioritas Nasional, PB: Prioritas Bidang, KL: Prioritas K/L, IM: Indikasi Non-Ops Kegiatan Dukungan Manajemen / Perangkat Teknis, Ops: Indikasi Belanja Operasional, Keb: Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN

www.peraturan.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024																		PIC
										KEBUTUHAN DANA						PHOK / BLU	SBSN	PNBP	TOTAL APBN	REALISASI							
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	RM					2020	2021	2022	2023	2024		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500	25.000	0,00	0,00	0,00	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		0	1	0	0	0	0,00	11.250	0,00	0,00	0,00	11.250	0,00	0,00	0,00	11.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		0	1	0	0	0	0,00	60.750	0,00	0,00	0,00	60.750	0,00	0,00	0,00	60.750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		0	1	0	1	0	0,00	92.500	0,00	150.000	0,00	242.500	0,00	0,00	0,00	242.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	1	0	0	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	80,87	0,00	0,00	0,00	80,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	0	1	1	1	101,25	0,00	44,00	155,00	1.215,00	1.515,25	0,00	0,00	0,00	1.515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		0	1	0	0	0	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,15	2.501,15	0,00	0,00	0,00	2.501,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 -	0 -	0 -	0 -	1 unit	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	1	0	0	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,57	0,00	0,00	0,00	259,57	0,00	PN
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	1	0	0	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		0	1	0	0	0	0,00	11.250	0,00	0,00	0,00	11.250	0,00	0,00	0,00	11.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	0	0	0	0	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	1,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	0	0	0	0	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	1	1	0	0,00	0,00	10,00	16,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12,500	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	1	1	1	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	0	0	0	0	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 unit	0 -	0 -	0 -	0 -	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	PN
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	PN
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	1	0	0	0	0,00	1.215,57	0,00	0,00	0,00	1.215,57	0,00	0,00	0,00	1.215,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		1	0	0	0	0	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	1,00	0,00	0,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		0	1	0	0	0	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.26,07	0,00	1.26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB

PN: Prioritas Nasional, PB: Prioritas Bidang, KL: Prioritas K/L, IM: Indikator Non Ops Kegiatan Dukungan Manajemen / Perangkat Teknis, Ops: Indikator Belanja Operasional, Keb: Indikator Kebutuhan di Luar RPJMN

www.peraturan.go.id

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024																		PRIO
					2020	2021	2022	2023	2024	KEBUTUHAN DANA						PHOK / BLU	SBSN	PNBP	TOTAL APBN	REALISASI						
										2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH					2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH	
0.02	Pembangunan/Pemliharaan Perlabuhan	Kab. Bandakan, Papua Barat	OPP Bokon	Lokasi	1	0	0	0	0	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.03	Pengembangan/Pemliharaan Perlabuhan Perikanan Nusantara	Kab. Cianjur, Jabar	OPP Pangandaran	Segmen	0	1	0	0	0	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.12	Pembangunan/Baru/Pemliharaan Jetti	Kab. Merauke, Papua	OPP Bade	Lokasi	0	0	1	0	0	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.13	Rehabilitasi dan/Replacement Fasilitas Pelabuhan Perikanan	Kab. Buton, Sultra	OPP Bau - Bau		0	1	0	0	0	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.00	Pengembangan/Fasilitasi Pelabuhan Muara	Kab. Kepulauan Sangihe, Sulut	OPP Talaud		1	1	0	0	0	130,46	470,00	0,00	0,00	0,00	1.000,92	0,00	0,00	0,00	1.000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
0.03	Pembangunan/Baru/Pemliharaan Pulau Burung	Kab. Bukaram, Sulteng	OPP Pulau Burung	Lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.04	Intensifikasi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (PPP)	Kab. Anggur Kepulauan, Babel	OPP Anggur	Lokasi	1	0	0	0	0	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
0.07	Intensifikasi Pengelolaan Pelabuhan Jetti	Kab. Merauke, Papua	OPP Bade	Lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.00	Pembangunan/Baru/Pemliharaan Pagerungan	Kab. Sumenep, Jatim	OPP Gapetan	Lokasi	0	0	1	0	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.00	Pengembangan/Revitalisasi Pelabuhan Kemaritiman (KIAM) (PP-IPR)	Kota Sabang, Aceh	KKP Balai papan	Lokasi	0	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	PN
0.00	Intensifikasi Pengelolaan Pelabuhan Mini (PPP-IPR)	Kab. Muna, Papua	OPP Bade	Lokasi	1	0	0	0	0	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
0.1	Intensifikasi Pengelolaan Fasyang (Ser)(PP-IPR)	Kab. Sangihe, Sulut	KKP Manado	Lokasi	0	1	1	0	0	0,00	20,00	90,30	0,00	0,00	90,30	0,00	0,00	0,00	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
0.1	Rehabilitasi dan/Replacement Fasilitas Pelabuhan Mini	Kota Makassar, Sulsel, Makassar	OPP Barrang		0	0	1	0	0	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.10	Pembangunan/Baru/Pemliharaan Arwada	Kab. Maluku Barat Daya, Maluku	OPP Barat 1	Lokasi	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.1	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan	Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara	Area OPP Weda		1	0	0	0	0	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	4,70	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.10	Rehabilitasi dan/Replacement Fasilitas Pelabuhan Rudis Gosong	Kab. Indragiri Hilir, Riau	OPP Rudis Gosong		0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
0.10	Rehabilitasi dan/Replacement Fasilitas Pelabuhan Bedinga	Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara	OPP Jailolo		0	1	0	0	0	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
0.1	Pengembangan/Revitalisasi Pelabuhan Mini (PNBM)	Kab. Aceh Timur, Aceh	OPP Tanjung Selamat	Lokasi	0	0	1	1	0	0,00	0,00	20,00	20,50	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
0.10	Pengembangan/Revitalisasi Pelabuhan Pelelian (PNBM)	Kab. Tanah Laut, Kalsel	Kantor OPP Kintap	Lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
0.10	Pengembangan/Revitalisasi Tanjung Apt-apt	Kab. Bangkalan, Jatim	DK Kepelabuhanan	Lokasi	0	0	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	PN
1.00	Rehabilitasi dan/Replacement Fasilitas Pelabuhan Angsoro	Kab. Tojo Una-Una, Sulteng	OPP Angsoro		0	1	0	0	0	0,00	52,10	0,00	0,00	0,00	52,10	0,00	0,00	0,00	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
1.01	Pengadaan/Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Mini (PNBM)	Kab. Bangkalan, Jatim	KKP Sela Pasang	Lokasi	1	0	0	0	0	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.02	Intensifikasi Pengelolaan Pelabuhan Pagerungan	Kab. Sumenep, Jatim	OPP Gapetan	Lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
1.03	Pembangunan/Revitalisasi Tanjung Batu	Kab. Pamekasan, Jatim	OPP Tanjung Batu	Lokasi	1	0	0	0	0	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
1.04	Pembangunan/Baru/Pemliharaan Tetak Sarat (PP-IPR)	Kab. Aceh, Aceh	KKP Alang	Lokasi	0	0	1	1	0	0,00	0,00	15,00	21,50	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.05	Rehabilitasi dan/Replacement Fasilitas Pelabuhan Apung	Kab. Aceh, Papua	OPP Agats		0	0	1	0	0	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
1.06	Pengembangan/Revitalisasi Kolpit	Kab. Pak Pak, Papua Barat	KKP Pak Pak		0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DM
1.07	Pengembangan/Revitalisasi Pelabuhan Talaia (PNBM)	Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara	OPP Talaia	Lokasi	0	1	1	1	0	0,00	11,10	30,00	40,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.08	Pengembangan/Revitalisasi Kenaunan	Kab. Pamekasan, Jatim	OPP Tanjung Batu		0	1	0	0	0	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
1.09	Rehabilitasi dan/Replacement Fasilitas Pelabuhan Jasadelta	Kab. Lembata, NTT	Kantor OPP Jasadelta		0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
1.10	Pengembangan/Revitalisasi Pelabuhan Sabu-Raijua	Kab. Sabu Raijua, NTT	OPP Labuhan Bajo		0	1	0	0	0	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL
JMLH	**Persentase Pencapaian Target Kegiatan Pengerukan**			**%**	**0**	**37,5**	**62,5**	**56,67**	**93,75**	**0,00**	**90,94**	**192,47**	**130,10**	**104,47**	**520,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1.11	Lokasi pengerukan alur pelayaran (alur laut) (PP-IPR)	Kab. Jakarta Pusat, DKI Jakarta	DK Kepelabuhanan	Lokasi	0	5	8	8	8	0,00	92,94	197,47	130,10	104,47	572,42	0,00	0,00	0,00	572,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
JMLH	**Persentase Pencapaian Target Pengadaan Alat Bongkar Muat**			**%**	**0**	**37,5**	**50,13**	**75,17**	**100**	**0,00**	**0,23**	**0,51**	**0,27**	**0,34**	**1,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**		
1.12	Pengadaan peralatan bongkar muat	DKI Jakarta	DK Kepelabuhanan	Lokasi	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	PN

PN: Prioritas Nasional, PB: Prioritas Bidang, KL: Prioritas K/L, DM: Indikasi Non-Ops Kegiatan Dukungan Manajemen / Perangkat Teknis, Ops: Indikasi Belanja Operasional, Keb: Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Perhubungan 2020-2024

Lampiran I - - 95

www.peraturan.go.id

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024										RENAKSI 2020-2024					PRIO
					2020	2021	2022	2023	2024	SUMBER DANA (RUPIAH)						PHLN / BLU	SBSN	PNBP	TOTAL ANGG	SPSU	SUMR	APBD	SWASTA	NON-APBD	
										2020	2021	2022	2023	2024	RM										
1.2.3	Pembangunan/ Pengadaan Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan Pelayanan (RP-JMN)	Kab. Maluku Tenggara, Maluku	Dinkes/Bid	Unit	4	0	0	0	0	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	5,85	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.2.7	Pembangunan/ Pengadaan Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan Pelayanan	Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta	Dinkes/Tanjung Priok	Unit	1	0	0	0	0	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
1.2.12	Pembangunan/ Pengadaan Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan Pelayanan (RP-JMN)	Kab. Merauke, Papua	Dinkes/Merauke	Unit	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.2.13	Pembangunan/ Pengadaan Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan Pelayanan	Kota Sorong, Papua	Dinkes/Sorong	Unit	1	0	0	0	0	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	6,75	0,00	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
1.2.14	Pembangunan/ Pengadaan Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan Pelayanan	Kab. Jayapura, Papua	Dinkes/Jayapura	Unit	1	0	0	0	0	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19	6,23	0,00	0,00	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
1.2.15	Pembangunan/ Pengadaan Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan Pelayanan (RP-JMN)	Kota Jayapura, Papua	Dinkes/Jayapura	Unit	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.2.16	Pembangunan/ Pengadaan Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan Pelayanan (RP-JMN)	Kab. Tanah Bumbu, Kalsel	Dinkes/Tanah Bumbu	Unit	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.2.17	Pembangunan/ Pengadaan Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan Pelayanan (RPJMN)	Kab. Maluku Tenggara, Maluku	Dinkes/Ambon	Unit	7	0	0	0	0	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	10,00	0,00	0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.2.18	Pembangunan/ Pengadaan Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan Pelayanan (RP-JMN)	Kota Sorong, Papua Barat	Dinkes/Sorong	Unit	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.2.19	Pembangunan/ Pengadaan Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan Pelayanan	Kota Tanjung Pinang, Kepri	Dinkes/Tanjung Pinang	Unit	1	0	0	0	0	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	2,45	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
1.2.20	Pembangunan/ Pengadaan Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan Pelayanan	Kab. Sorong, Papua Barat	Dinkes/Sorong	Unit	1	0	0	0	0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
1.2.21	Pembangunan/ Pengadaan Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan Pelayanan (RP-JMN)	Kab. Bintang, Papua	Dinkes Kab. Bintang	Unit	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.2.22	Pembangunan/ Pengadaan Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan Pelayanan (RP-JMN)	Kab. Jayapura, Papua	Dinkes/Jayapura	Unit	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.2.23	Pengadaan sarana bantu mengisap pelayanan (RP-JMN)	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	RS. Fatmawati	Unit	0	97	177	77	77	0,00	112,15	204,26	230,71	264,55	812,45	0,00	0,00	0,00	812,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.2.24	Pembangunan/ Pengadaan Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan Pelayanan (RP-JMN)	Kota Bendel, Aceh	Dinkes/Bendel	Unit	4	0	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,67	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.2.2	**Tingkat Ketersediaan BBKP**				**0**	**90**	**90,25**	**90,5**	**90**	**14,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,70**	**55,16**	**0,00**	**0,00**	**69,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.3.25	Rehabilitasi / Replacement Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan (RPJMN)	Kab. Cilacap, Jateng	Dinkes/Cilacap	Unit	3	0	0	0	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.3.26	Rehabilitasi / Replacement Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan (RPJMN)	Kota Ambon, Maluku	Dinkes/Ambon	Unit	1	0	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.3.27	Rehabilitasi / Replacement Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan (RPJMN)	Kab. Sorong, NTT	Dinkes/Sorong	Unit	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.3.28	Rehabilitasi / Replacement Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan(RPJMN)	Kota Bontotuda, Sulsel	Dinkes/Bontotuda	Unit	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.3.29	Rehabilitasi / Replacement Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan	Kab. Klungkung, Bali	Dinkes/Klungkung	Unit	1	0	0	0	0	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.3.30	Rehabilitasi / Replacement Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan (RPJMN)	Kota Ternate, Maut	Dinkes/Ternate	Unit	2	0	0	0	0	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
1.3.31	Rehabilitasi / Replacement Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan	Kota/Padang, Sumbar	Dinkes/Tanah Datar	Unit	1	0	0	0	0	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
1.3.32	Rehabilitasi / Replacement Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan (RPJMN)	Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta	Dinkes/Tanjung Priok	Unit	5	0	0	0	0	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	2,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.3.33	Rehabilitasi / Replacement Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan(RPJMN)	Kota/Palembang, Sumsel	Dinkes/Palembang	Unit	3	0	0	0	0	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,33	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.3.34	Rehabilitasi / Replacement Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan (RPJMN)	Kota/Padang, Sumbar	Dinkes/Tanah Datar	Unit	3	0	0	0	0	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.3.35	Rehabilitasi / Replacement Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan (RPJMN)	Kota/Balikpapan, Kalsel	Dinkes/Klung Penajam	Unit	2	0	0	0	0	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	2,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.3.36	Rehabilitasi / Replacement Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan (RPJMN)	Kota/Sibolga, Sumut	Dinkes/Sibolga	Unit	4	0	0	0	0	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	6,04	0,00	0,00	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.3.37	Rehabilitasi / Replacement Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan (RPJMN)	Kab. Badung, Bali	Dinkes/Badung	Unit	2	0	0	0	0	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.3.38	Rehabilitasi / Replacement Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan (RPJMN)	Kota/Sabang, Aceh	Dinkes/Sabang	Unit	2	0	0	0	0	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	4,50	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.3.39	Rehabilitasi / Replacement Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan (RPJMN)	Kota/Medan, Sumut	Dinkes/Medan	Unit	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.3.40	Rehabilitasi / Replacement Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan (RPJMN)	Kota/Cilegon, Banten	Dinkes/ Kota Cilegon	Unit	1	0	0	0	0	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.3.41	Rehabilitasi / Replacement Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan (RPJMN)	Kota/Pontianak, Kalbar	Dinkes/Pontianak	Unit	6	0	0	0	0	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	8,04	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.3.42	Rehabilitasi / Replacement Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan	Kota Balikpapan, Kalsel	Dinkes/Balikpapan	Unit	1	0	0	0	0	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
1.3.43	Rehabilitasi / Replacement Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan(RPJMN)	Kota/Sabang, Aceh	Dinkes/Sabang	Unit	1	0	0	0	0	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.3.44	Rehabilitasi / Replacement Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan (RPJMN)	Kota/Sumedang, Jabar	Dinkes/Sumedang	Unit	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.3.45	Rehabilitasi / Replacement Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan (RPJMN)	Kab. Jayapura, Papua	Dinkes/Jayapura	Unit	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
1.3.46	Rehabilitasi / Replacement Sarana/Bantu/Fasilitas Kesehatan (RPJMN)	Kota Bendel, Aceh	Dinkes/Bendel	Unit	1	0	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN

PN: Prioritas Nasional, PB: Prioritas Bidang, KL: Prioritas K/L, IM: Indikasi Non Ops Kegiatan Dukungan Manajemen / Perangkat Teknis, Ops: Indikasi Belanja Operasional, Keb: Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Perhubungan 2020-2024

Lampiran I ... 98

www.peraturan.go.id

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024											REALISASI 2020-2024					PIC
					2020	2021	2022	2023	2024	BUMN/BUMDE/BLU						PNBP / BLU	ABMN	PHLN	TOTAL ABMN		BUMN	BUMDE	APBN	SWASTA	BUMN/BUMDE	
										2020	2021	2022	2023	2024	S.D.											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]																								

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | PAGU | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN SEKSATAR / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN TAHUN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN SEKSATAR / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN SEKSATAR / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN SEKSATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 80 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN

Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	a. Perkembangan industri dan teknologi kendaraan bermotor; b. Perkembangan jenis angkutan berbasis teknologi informasi (*online*); c. Perkembangan di masyarakat mengenai sepeda motor sebagai alat transportasi umum; dan d. Kewenangan penyelenggaraan Terminal dan UPPKB oleh Pihak Ketiga.	Kemenhub/Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.	a. POLRI; b. Kementerian Perindustrian; dan c. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.	Tahun 2021
2.	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.	Perkembangan industri dan teknologi kendaraan bermotor.		a. Kementerian Perindustrian; dan b. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.	Tahun 2021

www.peraturan.go.id

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
3.	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Kewenangan penyelenggaraan Terminal dan UPPKB oleh Pihak Ketiga.		a. Kementerian Perindustrian; dan b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Tahun 2021
4.	Penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK).			a. Kementerian PPN/Bappenas; b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; c. POLRI; dan d. Kementerian Kesehatan.	Tahun 2020
5.	**Penyederhanaan proses perizinan**		Kemenhub/Direktorat Jenderal Perhubungan Laut		
	Omnibus Law	Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *omibus law* di bidang transportasi laut. Perizinan tidak lagi diatur dalam Undang-Undang (UU) tetapi dialihkan dalam turunannya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri Perhubungan. Serta mendukung Inpres Nomor 7 Tahun 2019, terkait kewenangan perizinan	Seluruh direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Tahun 2020-2021

www.peraturan.go.id

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		usaha dari 22 Kementerian melalui BKPM.			
	Deregulasi perizinan di masing-masing Direktorat dalam rangka meningkatkan kemudahan berinvestasi di bidang pelayaran (EoDB).	Deregulasi perizinan dalam rangka mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi di bidang pelayaran. Peringkat *Ease of Doing Business (EoDB)* dari hasil survei *World Bank* posisi tahun 2020 Indonesia berada di peringkat 73 dari 190 negara. Dengan penyederhanaan perijinan investasi khususnya di bidang transportasi laut akan menjadi acuan para investor di bidang pelayaran untuk melakukan usaha atau berinvestasi di Indonesia. Adapun regulasi yang sudah ada adalah terbitnya Instruksi Presiden No 7 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Dalam Inpres tersebut, terdapat enam poin yang pada poinnya memberikan kewenangan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengurus perizinan dan insentif investasi.	Seluruh direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Tahun 2020

www.peraturan.go.id

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Delegasi kewenangan penerbitan izin pada lini terdepan	Pendelegasian kewenangan penerbitan izin pada lini terdepan, dilaksanakan dengan ketentuan Pasal 88, Pasal 89, Pasal 98, dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka diperlukan pengaturan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang Perhubungan Laut, maka diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara lektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut. Dengan Permenhub ini, perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.	Seluruh direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Tahun 2020

www.peraturan.go.id

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
6.	**Peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelayaran**				
	Regulasi pendukung penyelenggaraan dan pengusahaan pelayanan di pelabuhan	Diperlukan regulasi pendukung penyelenggaraan dan pengusahaan pelayanan di pelabuhan selain dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut, PM 146 tahun 2016 tentang perubahan atas PM 51 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.	Direktorat Kepelabuhanan	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Tahun 2020
	Pengelolaan dan pengusahaan pelabuhan oleh Pemerintah Daerah (Pemda)	Pengelolaan dan pengusahaan pelabuhan telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Aspek-aspek yang perlu dipersiapkan Pemda terkait pengelolaan Pelabuhan: a. mempelajari dan memahami aspek legalitas dengan memperhatikan dan mencermati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pelabuhan Regional (PR) dan Pelabuhan Lokal (PL) merupakan urusan Pemerintah	Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Kepelabuhanan	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota)	Tahun 2020

www.peraturan.go.id

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali urusan keselamatan dan keamanan pelayaran yang menjadi urusan Pemerintah Pusat; b. menyiapkan SDM bidang kepelabuhanan, bidang operasional, bidang kemaritiman, bidang pemasaran, dan bidang ekspor-impor. c. memperhatikan aspek perencanaan, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. Perencanaan pembangunan pelabuhan di daerah harus berpedoman pada tata ruang wilayah provinsi dan pemerataan pembangunan antar provinsi serta berpedoman pada tata ruang wilayah Kabupaten/Kota serta pemerataan dan peningkatan pembangunan Kabupaten/Kota. d. menyiapkan secara matang aspek operasional yang terdiri dari kegiatan bongkar muat barang, jasa pergudangan, jasa			

www.peraturan.go.id

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		pemanduan, dan pentarifan. Membangun dan menyiapkan aspek sarana prasarana antara lain adalah fasilitas bongkar muat barang seperti dermaga, peralatan bongkar muat, lapangan penumpukan, gudang, jalan, kendaraan angkutan barang, perlengkapan/peralatan pengemasan, dan kantor penyelenggaraan pelabuhan.			
	Regulasi pendukung pelaksanaan KPBU, KSP, dan KSO pelabuhan	Regulasi pendukung pelaksanaan KPBU, KSP dan KSO sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur kerjasama yang sebelumnya dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) selanjutnya disebut KPBU.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Tahun 2020
	Revisi peraturan dalam rangka memenuhi ketentuan internasional di bidang pelayaran	Revisi peraturan terkait dengan regulasi nasional di bidang pelayaran juga datang dari dunia pelayaran internasional. Berbagai konvensi internasional yang dikeluarkan oleh IMO (*International Maritime Organization*) terutama SOLAS (*International Convention for the Safety of Life at Sea*), MARPOL (*International Convention for the Prevention of*	Kementerian Perhubungan	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	2020-2021

www.peraturan.go.id

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		Pollution from Ships), dan STCW (*Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers*)			
7.	**Transformasi kelembagaan di bidang pelayaran**				
	Penetapan PP tentang Penjagaan Laut dan Pantai.	Penyusunan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan penataan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai dengan mengusulkan revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai serta Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai.	2020-2021
	Penguatan kelembagaan di bidang PLP.	Usulan penguatan kelembagaan *Sea and Coast Guard Base* tersebut dituangkan dalam naskah akademik usulan revisi KM Nomor 65 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai.	Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, serta Pangkalan.	2020-2021

www.peraturan.go.id

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Revisi Peraturan terkait Perubahan Kelembagaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Revisi KM Nomor 65 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai. Untuk penguatan kelembagaan Sea and *Coast Guard*.	Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai serta Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai	2020-2021
	Penetapan regulasi mengenai P3D pelabuhan kepada daerah.	Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018, khususnya Direktur Jenderal Perhubungan Laut terkait penyusunan Roadmap pengalihan Pelabuhan Pengumpan kepada Pemerintah Daerah, menyusun dan menyempurnakan NSPK baik proses pengalihan maupun pembinaan bidang laut kepada Pemerintah Daerah.	Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Kepelabuhanan	2020-2021
	Regulasi pendukung pembentukan BLU atau Bentuk Kelembagaan Lainnya di bidang pelayaran.	Badan Layanan Umum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum belum dapat diimplementasikan dengan baik.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	2020-2021

www.peraturan.go.id

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
8.	**Standarisasi teknis sarana, prasarana, dan SDM bidang transportasi laut.**				
	Reviu RIPN	Reviu atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang telah dirumuskan dengan pertimbangan perkembangan isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap kepelabuhanan, diantaranya adalah pengembangan jaringan jalan, kereta api dan layanan kepelabuhanan, teknologi dan industri dalam pembangunan dan pengembangan kepelabuhanan, teknologi dan industri perkapalan, pengembangan kepelabuhanan yang berwawasan lingkungan, mendukung disabilitas, kesetaraan gender, *poor*, *elderly*, dan anak-anak, investasi dan pendanaan, Otonomi daerah dan seterusnya	Direktorat Kepelabuhanan	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	2020-2021
	Standarisasi pelabuhan pada IPN	Perlu adanya sebuah Peraturan Presiden/Perpres untuk Implementasi *Integrated Port Network* (IPN) yang di dalamnya berdasar pada tiga pilar strategis. "yaitu standardisasi infrastruktur, suprastruktur dan pola operasional di 7 pelabuhan utama, integrasi kawasan industri dengan	Kementerian Perhubungan	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	2020-2021

www.peraturan.go.id

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		pelabuhan, dan membentuk aliansi pelayaran untuk efisiensi operasional jaringan pelayaran melalui peningkatan ukuran kapal dan aktivasi *rute pendulum* (*looping service*)".			
	Blue Print/Masterplan penyelenggaraan tol laut/perintisan	Pemerintah perlu segera merancang dan menetapkan rencana induk (*masterplan*) Tol Laut/Perintis. Rencana induk diperlukan sebagai acuan Kementerian atau Lembaga terkait dalam mengimplementasikan Tol Laut. acuan ini juga diperlukan bagi para pelaku dan para pihak (stakeholders) lainnya untuk terlibat dalam Program Tol Laut, termasuk perusahaan-perusahaan pelayaran. Rencana induk itu mencakup perencanaan rute, pelaku, mekanisme, rencana pengembangan pelabuhan dan infrastruktur lainnya, serta industri pendukung, termasuk galangan kapal.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	2020-2021
	Restrukturisasi jaringan trayek pelayaran nasional	Pembuatan dasar hukum penataan jaringan trayek pelayaran nasional	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	2020-2021

www.peraturan.go.id

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Rencana umum pengembangan bidang kenavigasian (masterplan kenavigasian, penataan ruang wilayah perairan)	tinjau ulang terhadap *masterplan* Rencana Pengembangan Sistem Keselamatan Lalu Lintas Maritim (MTSDP) tahun 2002, dengan menyusun Masterplan Kenavigasian yang efektif dan efisien, yang mencakup aspek SBNP, Telekomunikasi pelayaran, penetapan alur pelayaran, serta penyediaan sarana kapal negara kenavigasian.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	2020-2021
	Rencana umum pengembangan bidang PLP	Revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM Nomor 65 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai. guna penguatan kelembagaan *Sea and Coast Guard*	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Direktorat Kepelabuhanan	2020-2021
	Penguatan pelaksanaan regulasi NCVS	Implementasi Aturan standar kapal nonkonvensi yang tertuang pada Keputuswan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia, dan SK Dirjen Perhubungan Laut No. Um.008/9/20/DJPL-12 tentang Pemberlakuan Standar dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal nonkonvensi berbendera Indonesia.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	2020-2021
	Kewajiban penggunaan AIS terhadap seluruh kapal	Implementasi dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal	2020

www.peraturan.go.id

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) bagi Kapal yang Berlayar di wilayah Perairan Indonesia.		Perhubungan Laut	
	Penerapan SOLAS secara bertahap hingga mencapai standar maksimal	Implementasi SOLAS yang menjadi standar keselamatan maritim yang wajib diterapkan pada kapal niaga (*merchant vessel*) berukuran > 500 DWT dan menjadi induk bagi terbitnya berbagai standar (*code*) bagi konstruksi kapal, peralatan, dan pengoperasian.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	2020-2021
9.	**Pemenuhan (*compliance*) terhadap ketentuan internasional**				
	Ratifikasi sejumlah konvensi IMO terkait dengan kepelabuhanan, kepelautan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.	Ratifikasi konvensi IMO yang belum dilaksanakan, beberapa ratifikasi yang sudah dilaksanakan adalah Perpres Nomor 57 tahun 2017 tentang pengesahan *Protocol of 1988 Relating to The International Convention for the Safety of Life at Sea* (SOLAS), 1974 terkait dengan konvensi internasional untuk keselamatan jiwa di laut, Instrumen IMO di bidang perlindungan lingkungan maritim, yaitu *Anti Fouling System Convention* (AFS), *Ballast Water Management Convention* (BWM) 2004, MARPOL Annex V terkait pencemaran dari	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	2020-2021

www.peraturan.go.id

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		sampah kapal, dan London *Convention/Protocol.*			
10.	**Pemberdayaan angkutan laut nasional**				
	Pelaksanaan *beyond cabotage*	Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu, yang mewajibkan penggunaan kapal nasional untuk ekspor CPO dan batu bara, serta impor beras dilakukan oleh perusahaan pelayaran nasional dengan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	2020-2021
	Fasilitasi permodalan bagi perusahaan pelayaran nasional.	Pasca berlakunya kebijakan *scrapping* yang mengharuskan semua kapal yang umurnya lebih dari 25 tahun	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal	2020-2021

www.peraturan.go.id

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		harus dilebur, pemerintah perlu membantu pengadaan kapal baru dalam hal ini dukungan kebijakan pendanaan terhadap kredit perbankan untuk pengadaan kapal baru.		Perhubungan Laut	
	Pemberdayaan pelayaran rakyat.	Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan diamanatkan bahwa pembinaan angkutan laut pelayaran rakyat dilaksanakan agar kehidupan usaha dan peranan penting angkutan laut Pelayaran Rakyat tetap terpelihara sebagai bagian dari potensi angkutan laut nasional yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional. keberadaan Pelayaran Rakyat akan membantu sistem transportasi nasional, terutama untuk daerah pedalaman, terpencil, dan terisolir.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	2020-2021
	Penyiapan implementasi MEA.	Untuk menghadapi MEA yang berpotensi meningkatkan transaksi ekonomi antar negara ASEAN, salah satunya adalah *Beyond Cabotage*.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	2020-2021
11.	**Fasilitasi peran *stakeholders***				
	Pengembangan kelembagaan penyelenggaraan pelayaran di Daerah (P3D).	Pembuatan dasar hukum untuk pembuatan NSPK baik proses pengalihan maupun pembinaan bidang laut kepada Pemerintah	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	2020-2021

www.peraturan.go.id

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		Daerah.		beserta pemerintah daerah.	
	Regulasi pendukung UMKM (termasuk TKBM) dalam perkuatan peran dan pengusahaannya.	Revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	2020-2021
12.	**Fasilitasi kepada seluruh lapisan masyarakat (secara fisik, ekonomi, dan sosial)**				
	Penyesuaian dasar hukum pelaksanaan pelayaran perintis, *Public Service Obligation* angkutan barang, dan kapal ternak.	Pembuatan dasar hukum khusus pelaksanaan pelayaran perintis, *Public Service Obligation* angkutan barang, dan kapal ternak, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	2022
	Standar pelayanan penumpang difabel serta ibu hamil dan menyusui pada angkutan laut penumpang.	Implementasi dan penyusunan SPM dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	2022
13.	**Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan**	a. hasil *final report* ICAO *Coordinated Validation Mission* tanggal 10-18 Oktober 2018 yang merekomendasikan terhadap *Primary Aviation Law* terkait pelimpahan fungsi dan tanggung jawab dari negara pendaftaran dalam konteks perjanjian sewa dan pengakuan terhadap lisensi	Bagian Hukum.	Seluruh Direktorat dan Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Pusat Penelitan dan Pengembangan Perhubungan Udara, Biro Hukum, dan	2022

www.peraturan.go.id

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		personil pesawat udara, sertifikat kelaikudaraan dan sertifikat radio pesawat udara; ketentuan sanksi untuk pelanggaran terkait intersepsi udara sipil; ketentuan untuk menjamin bahwa KNKT tidak terlibat dalam tindakan penegakan hukum; b. kewenangan bagi KNKT dan investigatornya untuk dapat mengakses dan berwenang terhadap lokasi kecelakaan dan puing-puing pesawat, ketentuan untuk menjamin perlindungan dan kerahasiaan dari seluruh hasil laporan investigasi; c. perubahan lingkungan strategis; d. kekosongan hukum; e. mengakomodir kemajuan teknologi; dan f. kebutuhan masyarakat.		Komite Nasional Keselamatan Transportasi.	
14.	**Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2013 tentang Jaringan dan Rute Penerbangan.**	a. dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2013 tentang Jaringan dan Rute Penerbangan, bahwa jaringan rute hanya ditetapkan sampai dengan Tahun 2017, sehingga butuh penyesuaian. b. saat ini telah banyak perubahan dan penambahan rute-rute baru; dan c. rencana pengaturan penyeimbangan rute (mengatur komposisi berapa % (persen) rute	Direktorat Angkutan Udara.	Direktorat Bandar Udara, Direktorat Navigasi Penerbangan, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	2020

www.peraturan.go.id

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		sangat padat, padat, kurang padat dan tidak padat yang bisa diambil *airline*).			
15.	**Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.**	*mengupdate* amandemen ke-17 dari Annex 17 dan dalam rangka menutup *finding* Audit USAP.	Direktorat Keamanan Penerbangan	Direktorat Keamanan Penerbangan, BUBU, Unit Penyelenggara Bandar Udara, *AIRLINES*, dan *AIRNAV*.	2020
16.	**Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2016 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional.**	Dalam rangka mengakomodir penambahan lokasi kawasan pelatihan terbang (*training* area) dan pemutakhiran (*updating*) program kerja *i* (FIR) ruang udara Jakarta di atas Kepulauan Riau dan Natuna, dipandang perlu menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional.	Direktorat Navigasi Penerbangan	Direktorat Bandar Udara, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.	2020
17.	**Penyusunan peraturan terkait keamanan siber (*cyber security*).**	a. mengakomodir kemajuan teknologi; b. kebutuhan masyarakat; dan c. mempercepat konektivitas transportasi.	Direktorat Bandar Udara, Direktorat Angkutan Udara, dan Direktorat Navigasi Penerbangan.	Direktorat Bandar Udara, Direktorat Angkutan Udara, dan Direktorat Navigasi Penerbangan.	2021
18.	Penyusunan peraturan terkait pengoperasian *drone*	a. mengakomodir kemajuan teknologi; dan b. kebutuhan masyarakat.	Direktorat Navigasi Penerbangan dan Direktorat Kelaikudaraan Pesawat Udara	Direktorat Navigasi Penerbangan, DKPPU, dan Direktorat Bandar Udara.	2020
19.	Penyusunan peraturan terkait pengoperasian *waterbase*	a. mengakomodir kemajuan teknologi; b. kebutuhan masyarakat; dan c. konektivitas transportasi.	Direktorat Bandar Udara	Direktorat Bandar Udara, Direktorat Navigasi Penerbangan, dan	2022

www.peraturan.go.id

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				Direktorat Keamanan Penerbangan.	
20.	Penyusunan peraturan terkait penerapan konsep *smart airport*.	a. mengakomodir kemajuan teknologi; dan b. kebutuhan masyarakat.	Direktorat Bandar Udara	Direktorat Bandar Udara, Direktorat Keamanan Penerbangan, DKPPU.	2021
21.	Penyusunan peraturan terkait penerapan konsep *eco airport*	a. mengakomodir kemajuan teknologi; b. kebutuhan masyarakat; dan c. mengakomodir ketentuan ICAO.	Direktorat Bandar Udara	Direktorat Bandar Udara, Direktorat Keamanan Penerbangan, DKPPU.	2021
22.	Revisi regulasi yang berkaitan dengan kemudahan perizinan berusaha.	Mempermudah proses perizinan dan menarik investasi.	Bagian Hukum	Seluruh Direktorat dan Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Udara.	2020
23.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional.	a. dengan terbitnya ICAO Annex 19 masing-masing negara anggota ICAO harus menetapkan dan menjalankan Program Keselamatan Penerbangan Nasional; dan b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional belum mengakomodir regulasi terkait sistem pelaporan kejadian keselamatan penerbangan yang bersifat wajib dan sistem pelaporan sukarela terkait kejadian yang berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan	Bagian Kerjasama Internasional, Humas dan Umum	Seluruh Direktorat dan Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Udara.	2022

www.peraturan.go.id

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		(*Mandatory Occurrence Report/MOR* dan *Voluntary Reporting System/VRS*).			
24.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	mempermudah investasi di bidang perkeretaapian.	Kemenhub/Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Hukum dan HAM, dan Sekretariat Negara.	2021-2022
25.	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.	a. peraturan turunan atau pelaksana berupa Peraturan Menteri diharapkan dapat segera disusun dan ditetapkan; b. mempermudah Investasi di bidang perkeretaapian; dan c. menyederhanakan persyaratan perizinan berusaha dan perizinan teknis di bidang perkeretaapian.		Kementerian Hukum dan HAM dan Sekretariat Negara	2021-2024
26	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang PNBP di Lingkungan Kementerian Perhubungan	a. merevisi formula perhitungan biaya penggunaan prasarana milik Negara (*Track Acsess Charge*/TAC) dan perubahan besaran tarif/pengenaan PNBP lainnya di bidang perkeretaapian; dan b. beberapa ketentuan yg diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak agar menjadi acuan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang PNBP di Lingkungan Kementerian Perhubungan.		Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Sekretariat Negara	2020

www.peraturan.go.id

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
27	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus.	menyederhanakan persyaratan perizinan berusaha dan perizinan teknis di bidang perkeretaapian Menyesuaikan SOP Perizinan Mengakomodir sektor lain dalam penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus.		Kementerian Hukum dan HAM.	2020-2024
28	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain.	Peningkatan keselamatan, serta menyesuaikan SOP Perizinan.		Kementerian Hukum dan HAM.	2020-2021
29.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api.	mengakomodir perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian.		Kementerian Hukum dan HAM, PT Industri Kereta Api, dan PT Kereta Api Indonesia.	2020-2022
30.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api.	mengakomodir perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian.		Kementerian Hukum dan HAM dan PT Kereta Api Indonesia.	2020
31.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.	mengoptimalkan penggunaan anggaran IMO yang lebih tepat sasaran.		Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM.	2020

www.peraturan.go.id

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
32.	Perubahan Instrumen Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional menjadi Rancangan Undang-Undang.	Revisi Sistem Transportasi Nasional akan dinaikkan posisinya dalam bentuk Undang-Undang sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan transportasi nasional.	Kemenhub/Litbang		2020-2024
33.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Transportasi Nasional.	Pedoman dalam penyusunan Rencana Induk Transportasi yang mengakomodir semua perencanaan transportasi secara holistik, integratif, tematik dan spasial.	Kemenhub/Setjen		2020-2024
34.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Jabodetabek.	Melengkapi perkembangan trayek-trayek perkotaan di wilayah Jabodetabek untuk melengkapi pelayanan transportasi masyarakat di wilayah aglomerasi perkotaan Jabodetabek.	Kemenhub/BPTJ	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Dinas Perhubungan kabupaten/kota di wilayah Jabodetabek.	Tahun 2021-2022
35.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.	Kewenangan Menteri Perhubungan dalam pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Nasional hanya kepada Dirjen Perhubungan Darat, seharusnya untuk jalan nasional wilayah Jabodetabek kewenangannya oleh BPTJ.	Kemenhub/BPTJ	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Dinas Perhubungan kabupaten/kota di wilayah Jabodetabek.	Tahun 2021

www.peraturan.go.id

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
36.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Angkutan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.	Kewenangan penyelenggaraan terminal penumpang tipe a di wilayah Jabodetabek masih berada di Dirjen Perhubungan Darat sehingga harus diubah untuk kepastian hukum kepada BPTJ.	Kemenhub/BPTJ	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Dinas Perhubungan kabupaten/kota di wilayah Jabodetabek.	Tahun 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

www.peraturan.go.id